



UNIVERSITAS INDONESIA

**MODEL REKRUTMEN
DALAM PENENTUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)
pada Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional**

**YOHANIS TANDISOSANG
NPM. 0606023734**

T

24322

**PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA**

2008



**PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : YOHANIS TANDISOSANG
NPM : 0606023734
Tahun Masuk : 2006 / PKN A.25
Program : KAJIAN STRATEJIK KETAHANAN NASIONAL
Judul Tesis : MODEL REKRUTMEN DALAM PENENTUAN
BAKAL CALON KEPALA DAERAH (Studi Kasus
Pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012)

Telah setuju untuk diuji

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Wan Usman, MA

PEMBIMBING II



Dr. Amirsyah Sahil, SE., MSi

**PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEGIK KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA**

LEMBAR PENGESAHAN



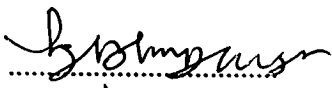
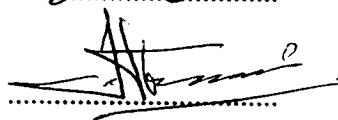

Tesis ini telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** Program Studi Kajian Strategik Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia, pada :

Hari/Tanggal : **Jumat, 9 Mei 2008**
Pukul : **14.00 s/d 16.00 WIB**
Judul Tesis : **MODEL REKRUTMEN DALAM PENENTUAN
BAKAL CALON KEPALA DAERAH (Studi Kasus
Pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012).**

dan dinyatakan : **LULUS**

Selanjutnya telah dilakukan perbaikan dan koreksi berdasarkan arahan hasil sidang Tim Penguji.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Amirsyah Sahil, SE., MSi.** 
Anggota : **Prof. Dr. Wan Usman, MA.** 
Prof. Dr. Burhan D. Magenda 
Sutoyo, SH., MSi. 
Sekretaris : **Dr. Amirsyah Sahil, SE., MSi.** 

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) selama ini pada kenyataannya mengalami beberapa penyimpangan (distorsi) dari ketentuan perundang-undangan dengan politik oligarkhi dimana kepentingan partai bahkan kepentingan segelintir elit partai sering memanipulasi kepentingan masyarakat. Sementara ketentuan perundang-undangan banyak mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung secara demokratis, luber dan jurdil yang merupakan wujud dari semangat pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan demokrasi di tingkat lokal.

Salah satu tahap yang cukup penting dalam pelaksanaan pilkada yakni proses rekrutmen bakal calon oleh partai politik. Namun pertanyaan yang muncul adalah ; pertama, sejauhmana partai yang merupakan pintu satu-satunya dalam pengajuan calon telah membuka ruang bagi aspirasi calon dari luar partai. Ketentuan mengharuskan partai membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Kedua, apakah partai politik akan menjamin terlaksananya mekanisme yang demokratis dan transparan, melaksanakan konvensi penjurangan bakal calon yang diumumkan secara luas kepada masyarakat. Ketiga, Sejauhmana partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat dalam proses penetapan calon.

Berdasarkan latar belakang singkat di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : **"Model Rekrutmen Dalam Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012)"**, dengan tujuan untuk : (a) mengetahui model rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta. (b) mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta. (c) mengetahui dampak rekrutmen bakal calon kepala daerah terhadap ketahanan daerah.

Hasil penelitian bahwa dalam proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai dalam menentukan bakal calon kepala daerah pada Pilkada DKI Jakarta Periode Tahun 2007-2012, secara umum lebih cenderung menerapkan model rekrutmen terbuka dari pada model rekrutmen tertutup. Hal ini karena dalam penjurangan nama bakal calon lebih terbuka kepada umum atau bakal calon berasal dari berbagai kalangan yang bukan kader partai, umumnya melaksanakan proses seleksi yang melibatkan semua unsur partai misalnya melalui konvensi dan lebih memperhatikan kinerja yang dimiliki oleh bakal calon yang meliputi tingkat pendidikan, pengalaman jabatan maupun pengalaman organisasi. Namun demikian belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat misalnya masih terbatasnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam menilai track record bakal calon. Disamping itu, masih mempertimbangkan simbol-simbol yang melekat pada calon seperti agama, suku, putra daerah dan faktor latar belakang sosial ekonomi calon.

Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh dalam rekrutmen bakal calon adalah faktor kinerja calon, faktor dukungan terhadap calon dan faktor ikatan primordial dimana pengaruhnya tergolong kuat dan signifikan. Artinya faktor-faktor tersebut menjadi aspek yang sangat penting bagi partai dalam menetapkan calonnya. Kinerja calon yang meliputi kecakapan yang ditunjang dengan tingkat pendidikan, keahlian, pengalaman dan kepribadian. Disamping kuatnya dukungan dari elemen-elemen masyarakat terhadap calon tertentu. Dan yang terakhir kuatnya sentimen primordial dengan calon dengan tujuan agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat pemilih.

ABSTRACT

The processes of electing head of region held in many regions in Indonesia recently – in fact - led to some distortion to happen, distortion from regulation with oligarchy politic system where the goals and the needs of society are manipulated by the goals and needs of some political party. On the other hands the regulations that controlling and to establish the election processes to be democratically are the manifestation of government will to create and develop democratic spirit in local scope.

A significant phase of the election process is the recruitment process of candidates from some political party. Therefore it led to some questions: Firstly, “how far is the political party -that leads to the open door of opportunity on proposing its candidates- opening the space for aspirations of other political party’s candidates?” The regulation says that a political party should open the door of opportunity widely for the personal candidates through transparent and democratic mechanism. Second, “is there any guarantee from political party upon having transparent and democratic mechanism, and openly to public in doing any selection convention of candidates?” Thirdly, “how far can the political party give any attention to accept society’s responses on process of electing candidates?”

Based upon brief background explanation above, the researcher attempt to do some research entitled “Recruitment patterns on electing the candidates of head of region (Study on case of *Pilkada DKI Jakarta 2007-2012* period)”. The aims are: (a) knowing the recruitment patterns on electing the candidates of head of DKI Jakarta region. (b) Conveying the affecting factors on recruitment towards the electing the candidates of head of DKI Jakarta region. (c) To study the effect of recruitment of candidates on regional scope defense.

The results of the research is that in applying recruitment process of electing candidates in DKI Jakarta 2007-2012 period, the system used is the open recruitment. This system is used because in the candidates are more likely come from public and the selection process of candidates is openly to public view. In other words they came from any segment of society and not from any political party directly. The selection process are involving many substantial of every political party, through some conventional and pay attention more on the works performance of candidates such as, educational history, job experience or organizational experience. Yet, still on some segment of the society the candidates do not meet with their expectation, for the limited access of public to track the record of candidates, consideration based on religion, ethnic, and also social-economic background.

Next, the factors that affect on the recruitment of candidates are their works performance factor, supporting factors toward candidates, and also primordial bounds factors that are significant and strong. It means that all those factors are important aspects to political party in setting their candidates. The performance works are supported by educational background, skill, experience, personalities of candidates. Supporting factors can be seen from every segment in society support the candidates. The last is the strength of primordial sentiment on candidates to gain vote as many as possible from the public.

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbinganNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik. Tesis ini, dengan judul : "MODEL REKRUTMEN DALAM PENENTUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012)," dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Magister Sains (M.Si) Pengkajian Ketahanan Nasional pada Program Studi Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Pascasarjana Universitas Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik mulai dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan Tesis ini. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan RI yang memberi kesempatan dan dukungan biaya dalam melaksanakan pendidikan S2 di Universitas Indonesia.
2. Aspers Kasau, Kepala Dinas Personel dan Kepala Dinas Pendidikan TNI AU yang telah memberikan ijin dan mendukung kegiatan administrasi untuk mengikuti pendidikan tersebut.
3. Prof. Dr. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, selaku Ketua Program Studi Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Pascasarjana UI.
4. Prof. Dr. Wan Usman, MA, selaku Pembimbing I yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan Peneliti dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Amirsyah Sahil, SE, MSi, selaku Sekretaris Program Studi Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Pascasarjana UI sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan Peneliti dalam penyusunan Tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Pascasarjana UI atas segala bimbingan, ilmu serta bantuan yang telah banyak diberikan kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan.
7. Para Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi DKI Jakarta beserta segenap Pengurus dan Staf, masing-masing Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya,

Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Damai Sejahtera yang telah memberikan izin dan bantuannya dalam melakukan penelitian baik sebagai responden maupun menyediakan data yang diperlukan demi penyusunan Tesis ini.

8. Kepada Staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Provinsi DKI Jakarta dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi DKI Jakarta yang telah membantu menyediakan data-data yang diperlukan dalam penelitian.
9. Istri tercinta Dyah Purwanti Anggraini dan putri tersayang Bian Christyabel Tandisosang yang senantiasa setia mendoakan dan memotivasi dalam menyelesaikan kuliah.
10. Kedua orang tua Bapak Moekdjidjat Andreas dan Ibu Sukarni di Kediri, Mama Marthina Roren di Makassar serta segenap keluarga yang telah banyak membantu baik materil maupun moril serta dukungan doa sehingga Peneliti dapat menyelesaikan studi dan tesis.
11. Semua rekan-rekan mahasiswa Program Studi Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Pascasarjana UI Angkatan 25 TA. 2006/2007 yang telah mendukung dan bekerjasama selama mengikuti studi maupun dalam penyusunan tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan materil maupun moril sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Tuhan-lah yang senantiasa melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin.

Jakarta, April 2008

Yohanis Tandisosang

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan Tesis	ii
Lembar Pengesahan Tesis	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pembatasan Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Model.....	9
2.2. Model Rekrutmen (Politik) dalam Pilkada	10
2.3. Partai Politik	18
2.4. Desentralisasi, Demokrasi Lokal dan Otonomi Daerah	27
2.5. Perkembangan Pelaksanaan Pilkada di Indonesia	31
2.6. Ketahanan Nasional dan Ketahanan Daerah	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian.....	40
3.4. Defenisi Operasional Variabel.....	42
3.5. Instrumen Penelitian.....	46

3.6. Metode Analisis Data	53
3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	55
BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	
4.1. Profil Partai Politik.....	66
4.1.1. Partai Persatuan Pembangunan.....	66
4.1.2. Partai Demokrat	69
4.1.3. Partai Amanat Nasional.....	69
4.1.4. Partai Keadilan Sejahtera.....	71
4.1.5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	73
4.1.6. Partai Damai Sejahtera	75
4.1.7. Partai Golongan Karya	76
4.2. Gambaran Umum Wilayah DKI Jakarta.....	79
4.3. Peta Politik Wilayah DKI Jakarta Pasca Reformasi.....	81
4.4. Deskripsi Data Responden	84
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Model Rekrutmen Dalam Penentuan Calon	89
5.2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Rekrutmen.....	96
5.2.1. Pengaruh Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Tertutup	96
5.2.2. Pengaruh Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka	105
5.3. Dampak Rekrutmen Terhadap Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional	115
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	119
6.2. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

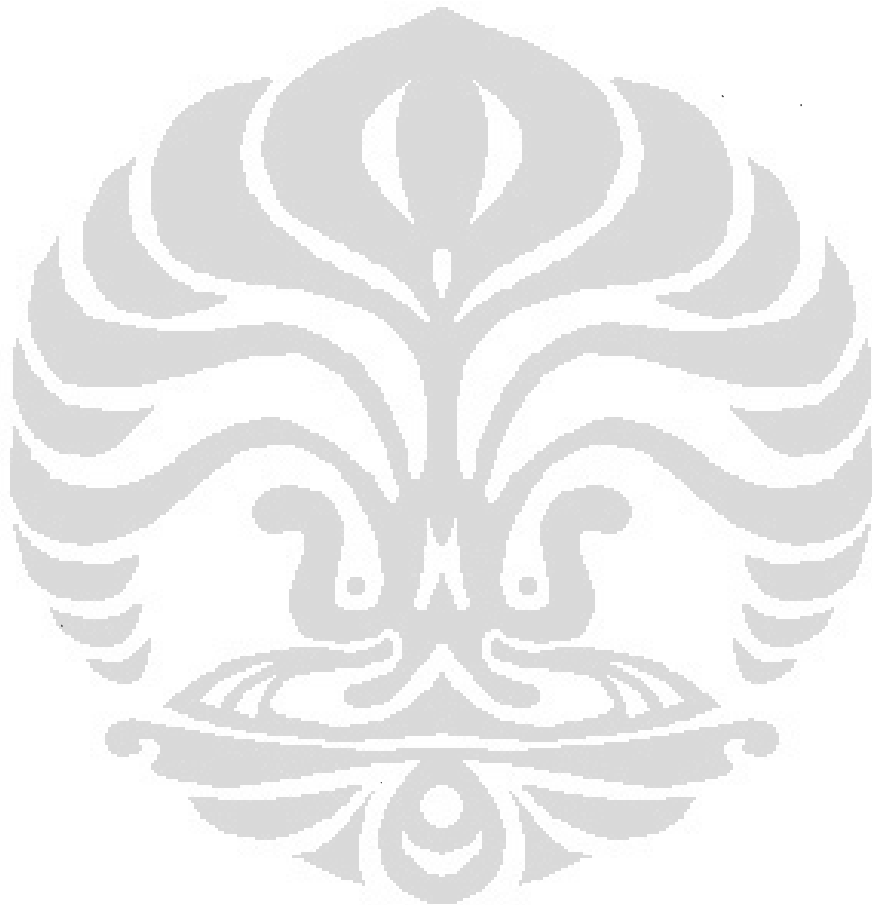
DAFTAR TABEL

1.	Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Rekrutmen Tertutup.....	47
2.	Tabel 3.2. Kisi-Kisi Instrumen Rekrutmen Terbuka.....	48
3.	Tabel 3.3. Kisi-Kisi Instrumen Kinerja	50
4.	Tabel 3.4. Kisi-Kisi Instrumen Dukungan.....	51
5.	Tabel 3.5. Kisi-Kisi Instrumen Ikatan Primordial	52
6.	Tabel 3.6. Uji Validitas Variabel Kinerja	59
7.	Tabel 3.7. Uji Reliabilitas Variabel Kinerja	59
8.	Tabel 3.8. Uji Validitas Variabel Dukungan	60
9.	Tabel 3.9. Uji Reliabilitas Variabel Dukungan	61
10.	Tabel 3.10. Uji Validitas Variabel Ikatan Primordial	61
11.	Tabel 3.11. Uji Reliabilitas Variabel Ikatan Primordial	62
12.	Tabel 3.12. Uji Validitas Variabel Rekrutmen Tertutup	62
13.	Tabel 3.13. Uji Reliabilitas Variabel Rekrutmen Tertutup	63
14.	Tabel 3.14. Uji Validitas Variabel Rekrutmen Terbuka.....	64
15.	Tabel 3.15. Uji Reliabilitas Variabel Rekrutmen Terbuka	65
16.	Tabel 4.1. Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kotamadya/ Kabupaten	80
17.	Tabel 4.2. Persentase Perolehan Suara Pemilu 1999	81
18.	Tabel 4.3. Kursi DPRD DKI Jakarta Pemilu 1999	82
19.	Tabel 4.4. Persentase Perolehan Suara dan Kursi Pemilu 2004	83
20.	Tabel 4.5. Data Responden Berdasarkan Umur	84
21.	Tabel 4.6. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	85
22.	Tabel 4.7. Data Responden Berdasarkan Agama	86
23.	Tabel 4.8. Data Responden Berdasarkan Pendidikan	87
24.	Tabel 4.9. Data Responden Berdasarkan Masa Keanggotaan	88
25.	Tabel 5.1. Frekuensi Rekrutmen Tertutup	91
26.	Tabel 5.2. Frekuensi Rekrutmen Terbuka	92
27.	Tabel 5.3. Deskripsi Rekrutmen Tertutup dan Rekrutmen Terbuka.....	93
28.	Tabel 5.4. Uji Beda Rekrutmen Tertutup dan Rekrutmen Terbuka.....	94
29.	Tabel 5.5. Profil Calon Gubernur & Wakil Gubernur Pada Pilkada DKI Jakarta 2007-2012	94
30.	Tabel 5.6. Korelasi Kinerja dengan Rekrutmen Tertutup	97

31.	Tabel 5.7. Anova Pengaruh Kinerja dengan Rekrutmen Tertutup ...	97
32.	Tabel 5.8. Regresi Kinerja Terhadap Rekrutmen Tertutup.....	98
33.	Tabel 5.9. Korelasi Dukungan Terhadap Rekrutmen Tertutup	99
34.	Tabel 5.10. Uji Anova Pengaruh Dukungan dengan Rekrutmen Tertutup	99
35.	Tabel 5.11. Regresi Dukungan Terhadap Rekrutmen Tertutup	100
36.	Tabel 5.12. Korelasi Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Tertutup	101
37.	Tabel 5.13. Uji Anova Untuk Pengaruh Ikatan Primordial dengan Rekrutmen Tertutup	101
38.	Tabel 5.14. Regresi Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Tertutup	101
39.	Tabel 5.15. Korelasi Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Tertutup	103
40.	Tabel 5.16. Uji Anova Pengaruh Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial dengan Rekrutmen Tertutup	103
41.	Tabel 5.17. Regresi Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Tertutup.....	104
42.	Tabel 5.18. Korelasi Kinerja Terhadap Rekrutmen Terbuka	105
43.	Tabel 5.19. Uji Anova Pengaruh Kinerja dengan Rekrutmen Terbuka	106
44.	Tabel 5.20. Regresi Kinerja Terhadap Rekrutmen Terbuka.....	106
45.	Tabel 5.21. Korelasi Dukungan Terhadap Rekrutmen Terbuka	107
46.	Tabel 5.22. Uji Anova Pengaruh Dukungan Terhadap Rekrutmen Terbuka	108
47.	Tabel 5.23. Regresi Dukungan Terhadap Rekrutmen Terbuka	108
48.	Tabel 5.24. Korelasi Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka	109
49.	Tabel 5.25. Uji Anova Pengaruh Ikatan Primordial dengan Rekrutmen Terbuka	110
50.	Tabel 5.26. Regresi Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka	110
51.	Tabel 5.27. Korelasi Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka.....	111
52.	Tabel 5.28. Uji Anova Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka	112
53.	Tabel 5.29. Regresi Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka.....	112
54.	Tabel 5.30. Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta 2007-2012	117

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Sistem Rekrutmen 11
2. Gambar 2.2 Model Pembangunan Liberal 28



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1a Analisis Validitas Variabel Rekrutmen Tertutup (Y1).
2. Lampiran 1b Analisis Validitas Variabel Rekrutmen Terbuka (Y2).
3. Lampiran 1c Analisis Validitas Variabel Kinerja (X1).
4. Lampiran 1d Analisis Validitas Variabel Dukungan (X2).
5. Lampiran 1e Analisis Validitas Variabel Ikatan Primordial (X3).
6. Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.
7. Lampiran 3a Rekapitulasi Data Variabel Rekrutmen Tertutup (Y1).
8. Lampiran 3b Rekapitulasi Data Variabel Rekrutmen Terbuka (Y2).
9. Lampiran 3c Rekapitulasi Data Variabel Kinerja (X1).
10. Lampiran 3d Rekapitulasi Data Variabel Dukungan (X2).
11. Lampiran 3e Rekapitulasi Data Variabel Ikatan Primordial (X3).
12. Lampiran 4 Tabel Frekuensi Jawaban Responden.
13. Lampiran 5 Uji Normalitas Data dan Uji Asumsi Klasik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses reformasi saat ini terus bergulir di Indonesia terutama di bidang pembangunan politik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Setelah pemilu tahun 2004 yang dinilai “sukses”, maka sejak bulan Juni 2005 bangsa Indonesia memulai babak baru dalam perubahan politik di negeri ini. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung menjadi populer dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa Orde Baru yang cenderung sentralistik. Sehingga sistem pemerintahan masa reformasi lebih diarahkan pada makin menguatnya otonomi pemerintahan di daerah.

Pilkada untuk pertama kalinya dilakukan secara langsung oleh pemilik kedaulatan yakni rakyat. Walaupun konsepsi Pilkada secara langsung pernah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, namun sampai undang-undang tersebut diganti dengan Penetapan Presiden (Penpres) No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, Pilkada secara langsung belum bisa direalisasikan.

Hal ini berbeda dengan sistem dalam Pilkada pada masa Orde Baru dilaksanakan melalui peran wakil-wakil rakyat di DPRD dengan suara terbanyak. Praktek politik ini ternyata menghasilkan situasi yang cenderung mengesampingkan peran rakyat dan menjadikan rakyat sebagai komoditas politik dalam meraih dukungan semata. Partai politik yang berada di dewan lebih dominan (oligarkhi partai) dalam menentukan figur kepala daerah sehingga memunculkan kesenjangan dengan aspirasi rakyat dan menghasilkan ketidakpuasan masyarakat.

Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan selama ini pada kenyataannya mengalami beberapa penyimpangan (distorsi) dari ketentuan perundang-undangan yakni *pertama*, politik oligarkhi yang dilakukan oleh DPRD dalam memilih kepala daerah dimana kepentingan partai bahkan kepentingan segelintir elit partai

sering memanipulasi kepentingan masyarakat. *Kedua*, mekanisme pemilihan kepala yang dijalankan cenderung menciptakan ketergantungan kepala daerah terhadap DPRD sehingga para kepala daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD daripada kepada masyarakat. Juga sering terjadinya kolusi dan *money politics*, khususnya pada proses pemilihan kepala daerah antara calon dengan anggota DPRD. *Ketiga*, seringkali terjadi tindakan-tindakan *over reactive* dari para anggota DPRD seperti penghentian atau pencopotan dari jabatan kepala daerah sehingga menimbulkan instabilitas politik bahkan konflik politik.

Kemudian sejak reformasi politik 1998 membawa sejumlah agenda politik untuk menata kembali pengelolaan negara termasuk perbaikan hubungan pemerintah pusat dengan daerah, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah oleh Presiden BJ. Habibie sebagai respon atas kebutuhan perubahan yang dikehendaki oleh daerah. Namun sejalan dengan dinamika ketatanegaraan dan perkembangan politik di tingkat nasional dan dengan praktek yang keliru di lapangan, maka undang-undang tersebut dirasa perlu untuk direvisi. Revisi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman masing-masing daerah sehingga menimbulkan berbagai masalah dan pelaksanaan yang beranekaragam.

Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang menghasilkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diharapkan dapat mengikuti perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam undang-undang tersebut, secara umum lebih banyak mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat secara demokratis.

Pemilihan kepala daerah langsung dalam rangka upaya penguatan otonomi pemerintahan daerah merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen kedua yang disahkan tanggal 18 Agustus 2000) yang berbunyi :

"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis."

Untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, maka pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan

sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 bahwa :

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan."

Selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (1), mengatur bahwa :

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil."

Pilkada langsung yang dilaksanakan atas asas luber jurdil adalah wujud dari semangat pemerintah pusat untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Hal ini salah satu terobosan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat selama ini pusat perhatian pemerintahan, parpol dan badan perwakilan hanya pada upaya mewujudkan praktek demokrasi di lembaga-lembaga perwakilan yang ada di tingkat pusat. Akibatnya pengembangan kehidupan yang demokratis di lokal hanya didasarkan pada transformasi internal pemerintah yang diberikan secara terbatas melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian otonomi kepada hirarki pemerintahan yang ada di daerah. Dengan kata lain demokrasi lokal sangat ditentukan oleh kemauan pemerintah pusat bukan bertujuan untuk penguatan demokrasi di tingkat lokal. Karena demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang apabila terjadinya kedewasaan dan kematangan kehidupan demokrasi di tingkat lokal (*all Politics is local*)¹.

Dengan pertimbangan tersebut maka Pilkada sebagai langkah pemerintah untuk menumbuhkan tatanan pemerintahan lokal yang baik (*local democratic governance*), karena *Pertama*, Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat, karena pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, bahkan kepala desa telah berhasil dilakukan secara langsung. *Kedua*, Pilkada merupakan perwujudan konstitusi yang diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dipertegas dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Ketiga*, Pilkada langsung sebagai

¹ Leo Agustino, dalam *Pilkada Langsung : Beberapa Catatan Kritis*, yang dikutip dari Makalah Tommi A. Legowo, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah", dalam Analisis CSIS Nol. 34, No. 2, 2005, hal. 190.

sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi masyarakat (*civic education*). *Keempat*, Pilkada sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. *Kelima*, Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional kedepan².

Namun pilkada akan kehilangan maknanya apabila parameter keberhasilannya hanya dilihat sebatas partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Tetapi disamping aspek tersebut masih banyak aspek lain yang sangat menentukan dalam penilaian kualitas pilkada misalnya terletak pada penyelenggara pilkada yakni KPUD, Panwas, Pemantau dan Pemerintah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian peran dari lembaga *stake-holders* lainnya seperti dari kelompok akademisi, LSM dan kelompok masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pilkada.

Indikator dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan pilkada baik secara prosedural maupun secara substansial pada setiap tahap kegiatan dalam pilkada berjalan dengan baik. Salah satu tahap yang cukup penting ketika dalam proses penetapan calon oleh partai. Namun hal yang sangat penting sehubungan dengan penetapan calon oleh partai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah ; *pertama*, partai politik yang merupakan pintu satu-satunya dalam pengajuan calon harus memberi ruang bagi aspirasi calon perseorangan (*independen*). Ketentuan mengharuskan partai membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. *Kedua*, partai politik harus menjamin terlaksananya mekanisme yang demokratis dan transparan, melaksanakan konvensi penjurangan bakal calon yang diumumkan secara luas kepada masyarakat. *Ketiga*, partai politik harus memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat dalam proses penetapan calon.

Memang ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, partai politik memegang peranan penting untuk melakukan proses penetapan calon sehingga cenderung tetap menempatkan dominasi partai politik dalam proses penjurangan dan penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Partai politiklah merupakan jalan satu-satunya jalur bagi seseorang untuk menjadi

² Gregorius Sahdan, *Pilkada dan Prospek Demokrasi Lokal*, Analisis CSIS, Vol. 34 NO. 1, Jakarta, 2005, hal 113-114.

1.2. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan kompleksnya permasalahan yang muncul dalam pilkada mulai dari penjurangan bakal calon sampai pada berakhirnya pelaksanaan pilkada khususnya pilkada DKI Jakarta, maka penelitian ini akan dibatasi pada model rekrutmen yang diterapkan dalam menentukan bakal calon Kepala Daerah pada pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) DKI Jakarta periode tahun 2007-2012 yang dilakukan oleh partai politik yang mempunyai kursi di legislatif atau DPRD DKI Jakarta yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Sejahtera dan Partai Golongan Karya

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka dalam penulisan tesis ini dirumuskan masalah pokok penelitian mengenai model rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah, kemudian diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana model rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta.
- b. Faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta.
- c. Bagaimana dampak rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta terhadap ketahanan daerah.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui model rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta.
- c. Untuk mengetahui dampak rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah terhadap ketahanan daerah di DKI Jakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut :

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi para peneliti dan kalangan akademisi sebagai referensi dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan sistem demokrasi di Indonesia umumnya dan pelaksanaan pilkada secara langsung pada khususnya.
- b. Secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah maupun bagi partai politik dalam mengevaluasi penyelenggaraan pilkada guna diadakannya perbaikan kebijakan terutama dalam mewujudkan kehidupan politik yang lebih demokratis.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
Membahas tentang latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka
Membahas tentang teori-teori yang relevan dan mendukung dalam menganalisis permasalahan penelitian yakni mengenai pengertian model, model rekrutmen (politik) dalam Pilkada, partai politik, desentralisasi, demokratisasi lokal dan otonomi daerah, perkembangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia serta Ketahanan Nasional dan Ketahanan Daerah.
- Bab III Metodologi Penelitian
Membahas tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, instrumen penelitian, metode analisis data dan uji validitas serta reliabilitas instrumen penelitian.
- Bab IV Gambaran Umum Obyek Penelitian

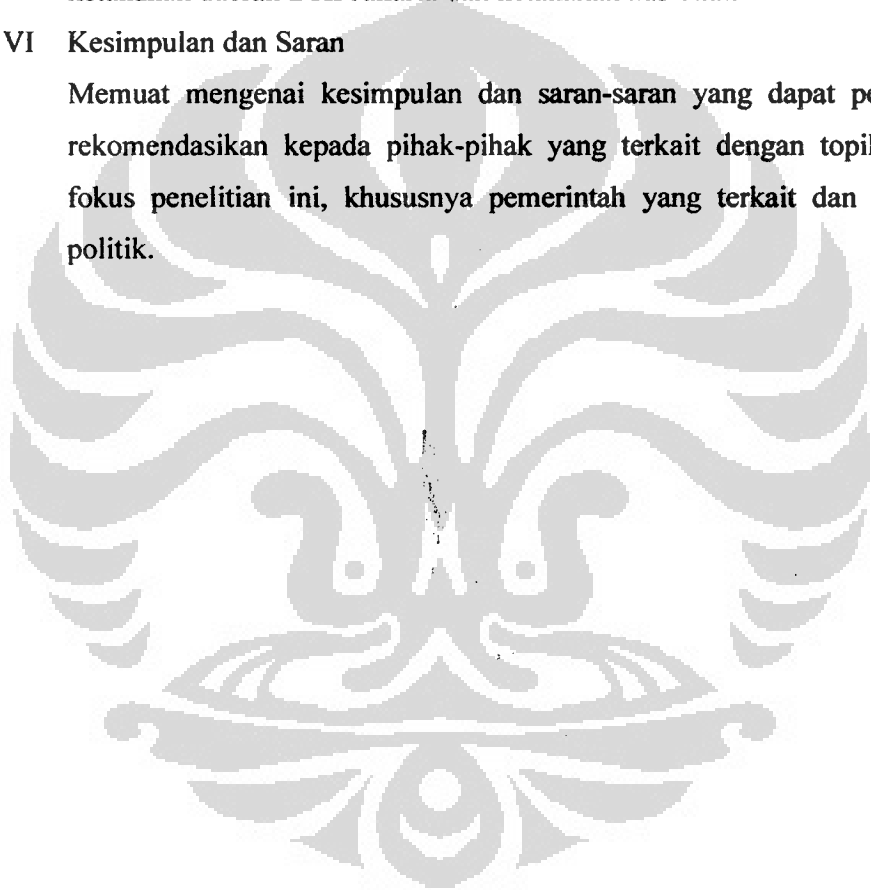
Membahas tentang gambaran umum obyek penelitian yang mencakup profil partai dan hasil-hasil yang pernah dicapai dalam pelaksanaan pemilihan umum, gambaran umum wilayah DKI Jakarta, peta politik pemilu di DKI Jakarta dan deskripsi karakteristik responden penelitian.

Bab V Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas tentang hasil penelitian dan analisis mengenai model rekrutmen dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan bakal calon kepala daerah serta dampak yang ditimbulkan terhadap ketahanan daerah DKI Jakarta dan ketahanan nasional.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Memuat mengenai kesimpulan dan saran-saran yang dapat peneliti rekomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan topik dan fokus penelitian ini, khususnya pemerintah yang terkait dan partai politik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Model

Dalam rangka memberikan landasan teori mengenai model rekrutmen dalam penentuan calon kepala daerah, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian istilah model agar diperoleh kesamaan persepsi dalam membahas konsep tersebut.

Dalam dunia ilmu pengetahuan, model mengandung arti suatu abstraksi ataupun gambaran dari sistem yang kompleks, dengan penyederhanaan untuk memudahkan pemahaman keadaan ataupun obyek tertentu. Selain itu, model juga dimaksudkan sebagai gambaran kenyataan. Untuk menggambarkan sistem, banyak ragam cara yang dipergunakan, model adalah pencerminan penggambaran sistem yang nyata atau yang direncanakan.⁴

Model dalam arti luas menurut Winardi⁵ adalah merupakan penggambaran sebagian dari kenyataan. Lanjutnya bahwa menggambarkan merupakan sebuah fase yang sangat penting, bukan saja dalam bidang ilmu pengetahuan tetapi pula dalam semua proses-proses untuk mencapai pengetahuan (proses belajar). Proses pencapaian pengetahuan tersebut terjadi dalam suatu siklus empiris yang melalui fase observasi, induksi, deduksi, pengujian dan evaluasi.

Model bisa dipergunakan untuk menentukan atau menggambarkan sesuatu membantu dalam mengkaji sistem; menentukan, menjelaskan, menggambarkan hubungan dan kegiatan, menampakkan sesuatu situasi atau keadaan dalam perlambang (simbol-simbol) yang bisa dimanipulasi untuk menghasilkan suatu prediksi (ramalan). Tujuan akhir ini yang paling penting bagi seorang pengambil keputusan.

Dari definisi model di atas, dapat diketahui adanya beberapa penggunaan istilah model dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yaitu dalam pengertian pola atau sesuatu yang dapat ditiru dan dalam pengertian gambaran tentang sistem kerja, prosedur, bentuk atau rancangan.

⁴ Amirin, T.M., *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 87.

⁵ Winardi, *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, Penerbit Alumni, (Bandung : 1986), hal. 59.

2.2. Model Rekrutmen (Politik) Dalam Pilkada

Setiap sistem politik memiliki sistem dalam merekrut atau menyeleksi elit-elitnya untuk menduduki posisi politik maupun pemerintahan. Di negara-negara yang telah mencapai kehidupan politik yang maju, sistem rekrutmen untuk menempatkan kader partainya dilaksanakan secara demokratis, transparan dan terbuka bagi semua calon atau kandidat yang berkualitas.

Rekrutmen politik yang dimaksud adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.⁶ Batasan tersebut didukung oleh pendapat Miriam Budiardjo, rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik⁷.

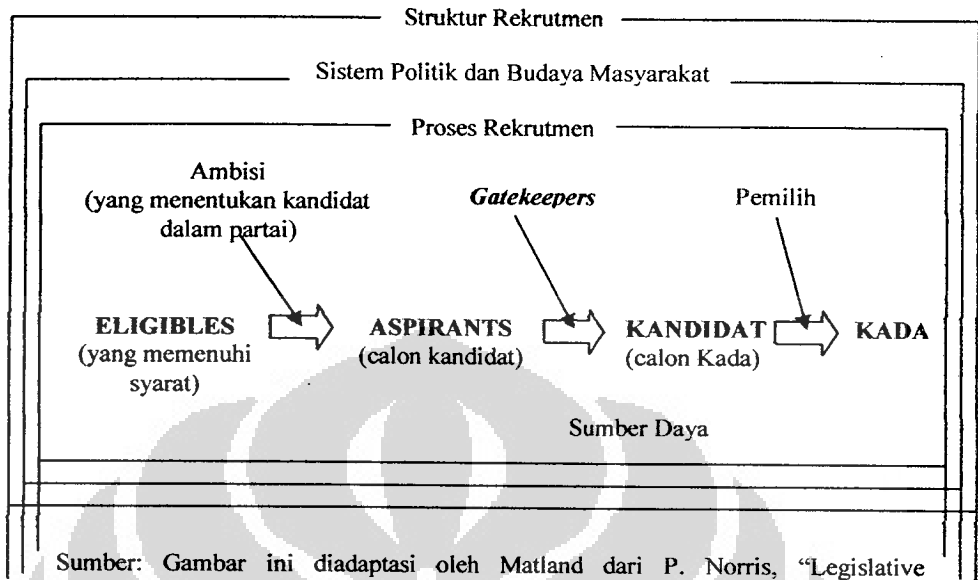
Dalam proses rekrutmen biasanya faktor keahlian, kecakapan dan pendidikan menjadi persyaratan yang penting. Namun dalam beberapa hal, seringkali lebih didasarkan pada ikatan kelompok, ikatan ideologi, atau ikatan koneksitas (keluarga). Dalam sistem politik yang masih tradisional dan belum melaksanakan nilai-nilai demokrasi, rekrutmen politik biasanya didasarkan pada faktor-faktor yang disebutkan terakhir tadi.

Rekrutmen politik yang terjadi di lembaga-lembaga seperti di legislatif dan eksekutif biasanya selain mempertimbangkan faktor keahlian dan kecakapan juga harus mempertimbangkan faktor keterwakilan dari berbagai kelompok dan kelas. Langkah ini dimaksudkan agar lembaga politik dalam merumuskan kebijaksanaan dapat lebih representatif dan keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat menjangkau berbagai kepentingan yang berkembang di dalam masyarakat. Mengenai proses rekrutmen partai dalam menentukan kandidat, dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1987 : hal. 118.

⁷ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta : 1998. hal. 19.

Gambar 2.1. Sistem Rekrutmen



Sumber: Gambar ini diadaptasi oleh Matland dari P. Norris, "Legislative Recruitment" dalam L. Niemi dan P. Norris, *Comparing Democracies : Election and Voting in Global Perspective*, London : Sage, 1996, hal. 196.

Fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi yang lebih banyak dilaksanakan oleh partai politik. Dalam fungsi rekrutmen, partai politik mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik, misalnya sebagai anggota partai atau menjadi pemimpin politik atas nama partai. Biasanya dilakukan dengan jalan melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader di masa mendatang akan menggantikan pimpinan lama (*selection of leadership*).⁸

Menurut G. Almond⁹, setiap sistem politik mempunyai prosedur-prosedur untuk rekrutmen atau seleksi pejabat-pejabat administrasi dan politik. Di negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris, jabatan-jabatan politik dan administrasi secara resmi terbuka untuk calon-calon yang berbakat. Akan tetapi calon-calon dalam jabatan politik, seperti halnya partisipan politik, cenderung berasal dari orang-orang yang mempunyai latar belakang kelas menengah atau kelas atas, dan orang-orang kelas rendah yang berhasil

⁸ *Ibid.* hal. 164.

⁹ Gabriel A. Almond, *Sosialisasi Politik, Budaya Politik dan Rekrutmen Politik*, dalam Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, 2000, hal. 50.

memperoleh pendidikan. Hal ini terjadi karena pemimpin-pemimpin politik dan pemerintahan di negara-negara maju dan modern, membutuhkan pengetahuan dan kecakapan yang sulit diperoleh dengan cara lain. Namun demikian, Almond melanjutkan bahwa di negara-negara kiripun, jabatan-jabatan politik yang tinggi cenderung masih dipegang oleh orang-orang profesional berpendidikan formal dibanding oleh anggota kelas buruh.

Fungsi rekrutmen politik pada partai politik makin dominan manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau ketika partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi.

Proses rekrutmen politik dilakukan melalui berbagai prosedur yakni melalui pemilihan umum, ujian, training formal, penyortiran undian, serta sistim giliran. Gabriel Almond dan Bingham Powell berusaha mengklasifikasikan prosedur tersebut ke dalam dua bentuk yakni¹⁰ :

- a. Prosedur tertutup (*Closed recruitment process*) adalah suatu proses rekrutmen yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif dan pejabat eksekutif.
- b. Prosedur terbuka (*Opened recruitment process*) adalah nama-nama calon yang diajukan, diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi murni.

Selanjutnya Haryanto mempertegas lagi pendapat di atas bahwa yang dimaksud dengan rekrutmen politik yang terbuka adalah rekrutmen itu terbuka bagi seluruh warga negara tanpa kecuali apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan. Setiap warga negara yang mempunyai bakat, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Sedangkan rekrutmen politik yang tertutup adalah bahwa individu-individu yang tertentu saja yang dapat direkrut untuk kemudian menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Dalam rekrutmen tertutup ini kesempatan tidak terbuka untuk seluruh warga negara. Misalnya perekrutan dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan darah (keturunan/keluarga) dengan penguasa, atau merupakan kawan-kawan akrab fihak penguasa, atau mungkin

¹⁰ Gabriel A. Almond and G. Bingham Powel, Jr., *Cooperative Politics Today : A World View*, Fourth Edition, Scott, Faresman and Company, London, 1988, hal. 108-140.

berasa! dari sekolah yang sama (satu almamater), ataupun juga mempunyai agama yang sama dengan agama yang dianut oleh penguasa.¹¹

Dalam proses rekrutmen politik, Almond dan Powell mengajukan beberapa jalur rekrutmen politik yang secara umum berlaku di beberapa negara. Jalur-jalur tersebut, antara lain sebagai berikut :

Pertama, jalur koalisi partai dan atau pimpinan-pimpinan partai. Rekrutmen politik seringkali tergantung pada peranan masing-masing partai dalam suatu koalisi. Rekrutmen politik yang menyebabkan terjadinya sirkulasi elit dan didasarkan kepada representasi kekuatan-kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat.

Kedua, jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu. Partai politik merekrut seseorang untuk menduduki jabatan politik tertentu berdasarkan kriteria-kriteria seperti distribusi sumber-sumber kekuasaan dan bakat-bakat yang dimiliki oleh calon, secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan kepentingan partai. Jalur ini sebagian besar dianut oleh partai-partai politik di Indonesia.

Ketiga, jalur rekrutmen politik yang berdasarkan kaderisasi. Rekrutmen politik tergantung pula kepada proses seleksi atau mekanisme penyaringan di dalam partai politik itu sendiri. Organisasi partai politik secara berkesinambungan berusaha untuk merekrut anggota-anggotanya kedalam tingkatan-tingkatan tertentu, dan memobilisasi partisipasi politik mereka untuk kepentingan-kepentingan partai yang menguntungkan. Partai politik membangun dan menyiapkan kader-kader yang dapat dipercaya.

Keempat, jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial. Jalur ini biasanya masih diterapkan dalam sistem politik tradisional, yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan, kesamaan ideologi atau agama, kesamaan daerah asal (suku) dan kelompok. Dalam praktek-praktek perpolitikan di Indonesia masih sering terjadi, yang sering disebut sebagai jalur nepotisme.

Dalam rekrutmen jabatan politik menurut Sutoro Eko mengungkapkan bahwa diperlukan adanya model yang demokratis yang mengedepankan proses pemilihan secara terbuka, kompetitif dan partisipatif. Persetujuan dan legitimasi rakyat menjadi unsur utama dalam proses rekrutmen jabatan-jabatan politik, sebab

¹¹ Haryanto, *Sistem Politik : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta : 1984., hal. 47-48.

pejabat politik itulah yang kemudian membuat kebijakan dan memerintah rakyat. Model demokratis harus diterapkan dengan baik dalam rekrutmen politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut¹² :

- a. Parpol harus mempromosikan kandidat yang berkualitas, yakni memiliki kapasitas, integritas, legitimasi dan populer (dikenal) di mata masyarakat.
- b. Proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat dari parpol, *track record* masing-masing kandidat dan proses hingga penentuan daftar calon.
- c. Proses rekrutmen harus bersandar pada partisipasi elemen-elemen masyarakat sipil.
- d. Parpol mau tidak mau harus mengembangkan basis atau jaringan dengan komunitas atau organisasi masyarakat sipil.
- e. Penerapan rekrutmen politik dengan model demokratis membutuhkan dukungan pendidikan politik yang memadai kepada masyarakat.

Hal ini menjadi penting karena faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam penentuan pilihan politik (pengambilan keputusan) pemilih terhadap figur yang berkompetisi dalam pilkada. Tolok ukur dalam penentuan politik tersebut mencakup tiga aspek menurut Bambang Cipto, yakni : a) *party identification*, b) *Issues of candidate and party*, c) *Candidate's (party elite's) personality, style and performance*.¹³

Identifikasi partai merupakan perasaan terikat pada kelompok dimana ia menjadi anggota ataupun kelompok yang dipilih. Identitas partai akan berkaitan dengan kesetiaan (*loyalitas*) dan ketidaksetiaan (*volatilitas*) dari massa suatu partai yang disebut sebagai massa pendukung. Semakin tinggi identitas partai semakin menjamin loyalitas massa partai, sebaliknya semakin rendah identifikasi partai akan semakin rendah pula loyalitas massanya.

Faktor penentu kedua adalah isu-isu di seputar kandidat dari suatu partai maupun isu-isu di seputar partai tersebut. Isu-isu tersebut terkait dengan hal apa saja yang diperjuangkan oleh kandidat atau partai tersebut. Sedangkan faktor

¹² Sutoro Eko, *MembuatOp Cit*, hal. 4-6.

¹³ Dikutif oleh Tim Peneliti FISIP UMM dalam *Perilaku Partai Politik*, UMM Press (Malang : 2006). Hal. 27.

ketiga yang turut menentukan dalam pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan adalah berkaitan dengan kepribadian, gaya hidup dan performa dari kandidat atau partai tersebut.

b. Faktor Kinerja Calon

Definisi kinerja menurut Irawan Prasetya, kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam suatu organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan secara konkrit dan dapat diukur¹⁴. Kinerja merupakan fungsi dari usaha seseorang (*effort*) yang didukung dengan motivasi yang tinggi dengan kemampuan (*ability*) yang diperoleh melalui latihan-latihan (*training*) atau dengan pengetahuan (*knowledge*) melalui pendidikan atau pengalaman.

Sedangkan Henry Simamora¹⁵ mengemukakan bahwa kinerja (*performance*) merupakan fungsi antara motivasi dengan kemampuan (*ability*). Motivasi disini adalah kesediaan seseorang untuk berusaha sekeras-kerasnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kemampuan merupakan potensi seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Kemampuan (*competence*) mencakup keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) serta pengalaman.

Selanjutnya Suyadi Prawirosentono¹⁶, mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja seseorang tidaklah cukup hanya dengan membuat standar kecakapan saja. Apabila kecakapan seringkali dipahami sebatas keterampilan teknis (*technical skill*) dan kemampuan pengetahuan seseorang maka perlu ditetapkan suatu standar kompetensi seseorang yang mempunyai cakupan lebih luas dan komprehensif yang terdiri dari motif, sifat, citra diri, peran sosial, pengetahuan dan keterampilan.

Adman Nursal dalam Political Marketing mengemukakan bahwa untuk memenangkan pemilihan paling tidak harus meyakinkan para pemilih, karena pemilih lebih mudah diyakinkan dengan menawarkan figur atau kandidat dibandingkan dengan menawarkan policy atau isu-isu yang akan diperjuangkan. Kandidat yang dimaksud terkait dengan kualitasnya, yang memiliki dua aspek

¹⁴ Irawan Prasetya, dkk., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIA-LAN Press, (Jakarta : 1992), hal. 5.

¹⁵ Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembangunan*, Balai Pustaka, (Jakarta : 1997), hal. 434.

¹⁶ Suyadi Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, BPFE, (Yogyakarta : 1999), hal. 24.

yakni ¹⁷: *Pertama*, kualitas instrumental yaitu kompetensi kandidat meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi fungsional. Kompetensi manajerial berkaitan dengan kemampuan untuk menyusun rencana, pengorganisasian, pengendalian dan pemecahan masalah untuk mencapai sasaran obyek tertentu.

Sedangkan kompetensi fungsional adalah keahlian bidang-bidang tertentu yang dianggap penting dalam melaksanakan tugas, misalnya keahlian bidang ekonomi, hukum, keamanan, teknologi dan sebagainya. Kualitas instrumental merupakan keahlian dasar yang dimiliki kandidat agar sukses melaksanakan tugasnya. Kedua, kualitas simbolis, yaitu kualitas kepribadian seseorang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, ketaatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat dan sebagainya. Ketiga, kualitas fenotipe optis yaitu penampakan visual seorang kandidat yang secara umum meliputi pesona fisik, kesehatan dan kebugaran serta gaya penampilan

Seiring dengan pelaksanaan pilkada Achmad Herry mengemukakan 9 kriteria figur terbaik sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah antara lain :¹⁸

- 1) Seorang Strong Leader (memiliki kekuatan lahiriah dan batiniah)
- 2) Dapat dipercaya dan amanah
- 3) Profesional
- 4) Berpengalaman dalam bidang manajerial berskala besar
- 5) Memiliki integritas diri : jujur dan mampu menjaga martabat
- 6) Berwawasan kebangsaan
- 7) Memahami persoalan ekonomi-bisnis lokal, domestik dan global
- 8) Memiliki hubungan luas dalam pergaulan nasional
- 9) Bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Faktor Dukungan

Dalam bidang politik konsep dukungan sering dipergunakan dalam menunjukkan sikap misalnya berkaitan dengan suatu keputusan politik atau terhadap kepemimpinan politik (penguasa) namun sangat sulit untuk memperoleh

¹⁷ Adman Nursal, *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu*, Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta : 2004), hal. 65.

¹⁸ Achmad Herry, *Pilkada Langsung Sembilan Kunci Sukses Tim Sukses*, Galang Press (Yogyakarta : 2005). hal. 28.

definisi konsep dukungan itu sendiri oleh para ahli politik. Walaupun demikian definisi dukungan telah banyak dipergunakan di bidang-bidang lain seperti psikologi dan bidang sosial.

Dalam bidang psikologi, Kessler¹⁹ mendefinisikan dukungan sebagai adanya pertolongan atau bantuan dari orang lain selama dibutuhkan. Jadi dukungan diartikan sebagai tersedianya bantuan orang lain yang dapat dilihat dengan jelas oleh individu selama waktu individu tersebut memerlukan dukungan (bantuan). Dengan demikian dukungan ini mencakup elemen pemberi, penerima bantuan, bentuk bantuan dan waktu tertentu.

Sejalan dengan definisi yang dikemukakan di atas, House mengemukakan ciri-ciri dukungan itu mencakup emosional, kognitif dan material.²⁰ Dukungan emosional berupa bantuan dalam bentuk perhatian, empati, simpati dan sebagainya. Sedangkan dukungan kognitif berupa bantuan saran, nasehat, gagasan dan informasi. Sementara dukungan material berupa bantuan dalam bentuk barang atau dana. Sering juga beberapa pendapat menambahkan dukungan instrumental yang berupa bantuan tenaga dan waktu.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dalam kaitannya dengan bidang politik, maka dukungan merupakan adanya bantuan dari seseorang atau kelompok terhadap pihak tertentu dalam rangka memperoleh dan atau menjalankan kekuasaannya. Dukungan dalam rangka memperoleh kekuasaan dapat terlihat pada keikutsertaan atau ikut berpartisipasi dalam proses pencalonan, kampanye sampai pada pemberian suara dalam pemilihan. Bahkan dukungan juga terlihat melalui pemberian sumbangan dana dalam penyelenggaraan pemilihan.

Kaitannya dengan dukungan dalam pelaksanaan pilkada, Achmad Herry mengemukakan bahwa dalam mencalonkan figur tertentu partai politik harus dapat memperkirakan dukungan terhadap figur tersebut sehingga memungkinkan terpilihnya pasangan calon yang ditetapkan. Dukungan-dukkungan tersebut bersumber dari :²¹

- 1) Dukungan partai atau gabungan partai yang mencalonkan.

¹⁹ Kessler, Ronald C., Ricard H. Princes and Camille B Wortman (1985), *Social Factors in Psychopathology : Social Support and Coping Processes*, dalam Annual Review of Psykology : 1990. hal. 531.

²⁰ House, James S., and Robert L. Khan (1985), *Measure and Consept of Social Support*, New York dalam Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, Ed. Rev., Rineka Cipta (Jakarta : 2007), hal. 156.

²¹ Achmad Herry, *Op. Cit.*, hal. 20.

- 2) Dukungan massa mengambang/ arus bawah.
- 3) Dukungan birokrasi pemerintahan dan TNI/Polri bagi pejabat yang akan maju sebagai calon.
- 4) Dukungan kelompok-kelompok kepentingan di luar partai politik seperti organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), organisasi profesi dan bisnis.
- 5) Dukungan kelompok-kelompok penekan (Pressure group), seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, organisasi buruh/tani/nelayan dan pers lokal.

d. Faktor Ikatan Primordial

Dalam pengertian umum bahwa primordial merupakan dimensi keaslian atau kesejatan dari kelompok atau etnik tertentu. Primordialisme dalam pemahaman Geertz (1973) adalah keterikatan terhadap suatu yang diantaranya dibawa melalui kelahiran. Seorang yang dilahirkan dalam komunitas yang religius misalnya, akan menjadi keterikatan yang kuat terhadap komunitasnya, sehingga keterikatan tersebut menimbulkan emosi tertentu yang menjadi dasar tingkah lakunya dan pertimbangan lainnya²². Demikian pula halnya dengan orang yang dibesarkan dalam suatu komunitas pemakai bahasa tertentu, latarbelakang kultural ini bisa menjadi sumber terbentuknya semangat primordialisme orang tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa primordialisme adalah orientasi individu atau kelompok. Primordialisme adalah sikap yang mementingkan keuntungan-keuntungan kelompok. Ikatan primordial didasarkan pada keterikatan-keterikatan berdasarkan keagamaan, etnis dan kedaerahan, keanggotaan dalam suatu asosiasi, atau profesi. Misalnya di Indonesia, sikap-sikap primordial yang dilihat melalui keanggotaan suatu partai politik karena partai politik di Indonesia dibangun dengan dasar orientasi ideologis yang terbentuk melalui perbedaan pemahaman keagamaan.

2.3. Partai Politik

Partai Politik sebagai sebuah lembaga politik, umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam

²² *Ibid.*

proses menuju modernisasi. Hal ini mengingat dengan meluasnya gagasan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik muncul sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Oleh karena itu di negara-negara barupun partai politiknya sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai.

Pada dasarnya terdapat tiga teori yang menjelaskan muncul atau terbentuknya partai politik²³, yakni pertama teori kelembagaan bahwa partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif bahkan juga eksekutif karena ada kebutuhan anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk dan berfungsi, maka kelompok masyarakatpun membentuk partai politik lain. Kemudian kesadaran politik mulai berkembang dimasyarakat dan sebagian kelompok kecil dari masyarakat menganggap bahwa partai politik yang ada tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka sehingga mereka membentuk partai politik sendiri. Yang kedua, teori situasi historik menjelaskan bahwa ketika terjadi perubahan dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern dengan berbagai macam persoalannya maka memunculkan tuntutan yang semakin besar dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap proses politik. Sehingga untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat yang semakin kompleks tersebut maka partai politik dibentuk. Sedangkan teori ketiga adalah teori pembangunan yang melihat modernisasi sosial ekonomi menimbulkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu menampung dan memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat.

2.3.1. Definisi Partai Politik

Salah satu tujuan dari dibentuknya partai politik oleh masyarakat adalah sebagai salah satu sarana bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik/pemerintahan. Secara umum partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan yang hendak dicapai oleh

²³ Heinz Eulau (1986), sebagaimana dikutip oleh Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 113-114.

kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional sehingga melalui kekuasaan politik mereka dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo mengemukakan definisi tentang partai politik bahwa : “Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil maupun materiil” (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).²⁴

Ahli politik lain yang mendefinisikan hampir sama dengan pendapat Friedrich, yakni R. H. Soltau memberikan definisi sebagai berikut : “Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka” (*A group of citizens more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies*).²⁵

Dengan demikian keduanya memberikan penekanan pada usaha untuk memperoleh kekuasaan dalam rangka pemenuhan kepentingan anggota partai melalui kebijakan umum yang dapat mereka laksanakan setelah berkuasa.

Sementara Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties* memberikan definisi tentang partai politik dengan lebih menekankan kepada bagaimana kelompok yang terorganisir tersebut dalam memperebutkan kekuasaan harus bersaing dengan kelompok lain yang berbeda pandangan. Secara lengkap Sigmund Neumann mengemukakan definisi bahwa: “Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 161.

²⁵ *Ibid.*

berbeda” (*A political party is the articulate organization of society’s active political agent, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views*).²⁶

Selanjutnya, J.A. Corry and Henry J. Abraham sebagaimana dikutip oleh Haryanto, mengungkapkan definisi partai politik sebagai asosiasi yang bertujuan untuk mengontrol pemerintah dengan cara menempatkan para anggota-anggotanya pada jabatan-jabatan melalui pemilihan dalam pemerintahan. Definisi tersebut adalah : *Political party is voluntary association aiming to get control of the government by filling elective offices in the government with its member*.²⁷

Dari beberapa definisi tersebut di atas, maka setidaknya terdapat beberapa unsur atau elemen penting sehubungan dengan partai politik. Unsur-unsur dimaksud yakni, *pertama*, partai politik merupakan sebuah organisasi atau sekelompok manusia yang terorganisir. *Kedua*, anggota kelompok manusia tersebut mempunyai cita-cita, orientasi, nilai-nilai dan pandangan yang sama. Jadi merupakan satu kesatuan politik. *Ketiga*, partai politik memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan ideologi (politik, sosial, dan ekonomi) anggotanya. Dengan demikian partai politik merupakan sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintah. *Keempat*, partai politik pada akhirnya bertujuan untuk mempengaruhi dan mengontrol pemerintahan dan/atau menguasai pemerintahan. Jadi peran partai politik di sini dapat menjadi oposisi atau penguasa.

Dalam beberapa analisis, seringkali juga mengelompokkan atau mengklasifikasi partai politik dalam beberapa kategori. Klasifikasi sebagaimana yang dimaksud diperlukan untuk membantu analisis dalam memahami partai politik yang bersangkutan.

2.3.2. Klasifikasi Partai Politik

Untuk memudahkan memahami suatu partai, perlu menguraikan berbagai klasifikasi atau tipologi partai yang didasarkan pada aspek-aspek tertentu. Dalam pengklasifikasian partai politik menimbulkan kecenderungan untuk menentukan tipe ideal bagi suatu partai politik namun ini tidak sepenuhnya benar.

²⁶ *Ibid*, hal. 162.

²⁷ Haryanto, *Sistem Politik : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1984. hal. 45.

Pengklasifikasian berbagai partai politik, didasarkan atas kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan.²⁸ Berdasarkan atas asas dan orientasi, misalnya bisa diklasifikasikan sebagai partai doktriner, partai pragmatis dan partai politik kepentingan. Yang dimaksud dengan partai doktriner yakni suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkret sebagai penjabaran ideologi. Sebagai contoh dari partai ini adalah Partai Komunis. Partai pragmatis adalah partai politik yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat pada suatu doktrin atau ideologi tertentu namun program, kegiatan dan penampilan partai ini terpengaruh oleh perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan. Selanjutnya partai politik kepentingan adalah partai politik yang dibentuk dan dikelola berdasarkan kepentingan tertentu misalnya kepentingan buruh, petani, etnis, agama atau lingkungan hidup.

Sedangkan berdasarkan atas basis sosial dan tujuan partai politik. Partai politik atas dasar basis sosial dapat diklasifikasikan atas partai politik yang berbasis kelas (atas, menengah, bawah), basis kelompok kepentingan tertentu (misal buruh, petani, pengusaha); basis pemeluk agama tertentu (misal umat Islam, Kristen, Katholik, dan lain-lain). Sedangkan berdasarkan tujuan, partai dibagi menjadi tiga yaitu partai perwakilan kelompok artinya menghimpun kelompok masyarakat untuk memperoleh kursi sebanyak mungkin di parlemen, Partai Pembinaan Bangsa yakni bertujuan untuk menciptakan kesatuan nasional dengan menindas kepentingan-kepentingan sempit, dan Partai mobilisasi yang bertujuan untuk memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sedangkan cenderung mengabaikan partisipasi dan keterwakilan kelompok.

Berdasarkan komposisi dan fungsi anggota bisa diklasifikasikan atas partai kader dan partai massa atau lindungan. Partai kader yakni partai yang mengandalkan kualitas anggotanya (kader), ketaatan pada organisasi dan disiplin anggotanya sebagai sumber kekuatan utama. Biasanya dilakukan seleksi yang sangat ketat bagi kader melalui proses kaderisasi yang berjenjang dan intensif. Sedangkan partai massa atau lindungan (*patronage*) adalah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada jumlah anggotanya dengan memobilisasi massa

²⁸ Ramlan Surbakti, *Op Cit*, hal. 121.

sebanyak-banyaknya dan menjadikan partai sebagai pelindung bagi segenap masyarakat sehingga dengan mudah memenangkan pemilihan umum.

Selain pengelompokan partai politik di atas beberapa ahli membedakan partai politik menjadi tiga yaitu partai elit/kader, partai massa dan partai rakyat (*people party*). Untuk membedakan partai politik ini dapat dianalisis melalui ciri-ciri utama sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Ciri Utama Partai Ditinjau dari Paradigma, Tujuan dan Organisasi²⁹

Ciri-ciri Utama	Partai Elit/Kader	Partai Massa	Partai Rakyat (People Party)
Bangunan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Komite - Kurang berkembang, desentralistik dan pembagian lemah 	<ul style="list-style-type: none"> - Vertikal lewat organisasi Cabang, horisontal lewat anak organisasi - Sentralistik, pembagian ketat 	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi terbagi jelas (regional, cabang, sosial, perkumpulan, serikat).
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Eliter - Tidak memiliki anggota 	<ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaan massal dengan prosedur pernyataan menjadi anggota. - Grup keanggotaannya yang homogen 	<ul style="list-style-type: none"> - Keanggotaannya dan pemilih yang heterogen - Tidak bernilaiinya peranan anggota sebagai perorangan
Pimpinan Partai	<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan politik secara pribadi - Kuatnya pengendalian partai (dalam parlemen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan politik secara institusi - Penguatan partai terhadap pimpinan - Cenderung oligarkhis (dikuasai oleh sekelompok) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan fraksi di parlemen dan dewan pimpinan pusat
Makna dan Tujuan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyibukkan diri dengan masalah-masalah politik - Mobilisasi pemilih pemilu - Penampilan individual - Perekrutan representan - Pengawasan terhadap pemerintah - Pemanfaatan peluang di parlemen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuatnya komponen ideologi - Integrasi sosial para anggota - Reformasi (pengawasan kuantitatif terhadap pemerintah) atau oposisi - Mobilisasi anggota, keluarga, kawan, kolega kerja dsb untuk berpemilu 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan legitimasi bagi pimpinan partai dan kandidat - Pencarian kompromi dalam proses politik - Maksimalisasi dukungan dalam persaingan politik - Pemantapan tatanan yang ada

²⁹ Detlef Nolte, sebagaimana dikutip oleh Pipit R. Kartawidjaya dan Mulyana W. Kusumah, *Kisah Mini Sistem Kepartaian*, Closs, Berlin, 2003. hal. 40.

Sumber Dana Utama	- Sumbangan	- Iuran anggota	- Dana negara
Warna Politik	- Konservatif atau liberal	- Partai sosialis	- Mantan partai massa berdasar kelas atau berhaluan agama atau mantan partai kelas menengah
Ikatan Partai Komunikasi	- Kurang - Jaringan pribadi	- Kuat - Jaringan komunikasi partai	- Menurun - Massa media umum

Dalam arena perpolitikan di Indonesia, banyak analisis yang mengklasifikasikan partai politik atas partai agama misalnya partai Islam (PPP, PKS, PBB dan lain-lain) dan sekuler (PDIP, Golkar, Demokrat dan lain-lain). Dalam pengklasifikasian ini ada yang berdasarkan atas ideologi sebagai dasar partai, ada yang berdasarkan atas basis sosial masyarakat pendukungnya.

Meskipun partai politik diklasifikasikan dalam berbagai kelompok sebagaimana tersebut di atas, namun pada hakekatnya semua partai menjalankan fungsi yang sama. Fungsi-fungsi dimaksud, ada yang secara menyeluruh dan maksimal dijalankan oleh sebuah partai politik, namun kadang kala dalam negara-negara yang berkembang partai politik yang ada belum secara optimal menjalankan fungsi-fungsi dimaksud.

2.3.3. Fungsi partai politik

Dalam negara demokratis, partai politik menjalankan beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik.³⁰

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Sehingga dalam fungsi komunikasi politik, partai politik merupakan komunikator atau perantara (penghubung) antara masyarakat dan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat baik berupa keputusan dan penjelasan dari pemerintah kepada masyarakat juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok

³⁰ Miriam Budiardjo, *Partisipasi*Op. Cit., hal. 17-19.

masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian partai politik menjadi jembatan atas arus informasi yang terjadi pada dua arah dalam sistem politik demokrasi.

Partai politik juga berfungsi untuk merumuskan (artikulasi) dan menggabungkan (agregasi) aspirasi-aspirasi dan kepentingan-kepentingan yang berkembang dalam masyarakat untuk diperjuangkan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam fungsi ini partai politik harus bisa memperjuangkan kepentingan anggota-anggotanya/masyarakat pendukungnya. Wujud dari perjuangan itu bisa dalam bentuk garis perjuangan partai yang dituangkan dalam anggaran dasar maupun dalam visi-misi dan program-program partai. Fungsi ini sangat menonjol dalam sistem politik demokrasi karena kepentingan dalam masyarakat cenderung berbeda bahkan seringkali bertentangan satu dengan yang lainnya sedangkan dalam sistem politik yang totaliter, kepentingan dianggap seragam sehingga partai politik dalam melaksanakan fungsi ini sangat kurang.

Fungsi lain dari partai politik adalah rekrutmen politik. Dalam negara-negara yang modern, partai sebagai lembaga rekrutmen politik bagi pemimpin-pemimpin bangsa memiliki peran yang sangat strategis. Melalui partai politik inilah kader-kader partai disaring dan berkompetisi untuk memperebutkan posisi penting dalam eksekutif maupun legislatif melalui pemilihan umum. Fungsi ini semakin besar porsinya ketika partai politik itu merupakan partai politik tunggal sebagaimana dalam sistem politik totaliter atau partai ini adalah partai mayoritas di parlemen atau lembaga perwakilan rakyat dalam sistem politik demokrasi sehingga dalam pelaksanaannya, partai politik sering bertindak oligarkhi, partai politik dikuasai oleh elit-ekit politik yang jumlahnya terbatas, sehingga partai politik sebagai sebuah organisasi tidak lain adalah milik sekelompok kecil orang. Hal ini berpengaruh terhadap proses rekrutmennya sehingga kemungkinan terjadinya nepotisme dan kolusi yang dilakukan oleh para elit partai politik karena semakin terbuka peluangnya.

Selain itu, partai politik juga mempunyai peranan penting dalam rangka sosialisasi politik. Sosialisasi politik yang dimaksud adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung secara terus menerus baik yang disengaja melalui pendidikan formal, nonformal dan informal maupun secara tidak disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-

hari di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik, seringkali dalam realitas partai politik adakalanya lebih mementingkan partai di atas kepentingan nasional sehingga peran partai politik untuk mensosialisasikan nilai-nilai loyalitas kepada negara tidak tercapai.

Fungsi partai politik yang terakhir adalah fungsi sebagai sarana pengatur konflik. Konflik yang dimaksud adalah bukan hanya konflik dalam bentuk pertikaian secara fisik antar individu atau antar kelompok dalam masyarakat tetapi juga perbedaan pendapat dalam masyarakat. Sebab dalam negara demokrasi setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga konflik sangat mungkin terjadi. Namun dalam kenyataannya partai politik seringkali malahan mempertajam pertentangan yang ada. Memang kesemuanya itu tergantung pada budaya politik suatu masyarakat dan kematangan dari elit-elit partai politik yang bersangkutan.

Selain keenam fungsi di atas, ada yang menambahkan fungsi kontrol politik. Kontrol politik yang dimaksud adalah suatu kegiatan untuk menunjukkan kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.³¹ Dalam melaksanakan kontrol politik, partai politik menggunakan tolok ukur yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dan partai politik yang berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik termasuk ideologi yang dijabarkan dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Dari fungsi-fungsi yang diperankan oleh partai politik tersebut, fungsi rekrutmen politiknya yang memegang peranan penting dan strategis karena melalui partai politik dapat muncul tokoh-tokoh pemimpin yang berkuasa. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi rekrutmen tokoh-tokoh politik atau pemimpin dalam sebuah sistem politik, terdapat beberapa perbedaan ataupun persamaan diantara partai-partai yang ada dalam suatu negara ataupun diantara beberapa negara.

³¹ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, hal. 121.

2.4. Desentralisasi, Demokrasi Lokal dan Otonomi Daerah

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan, telah mengalami proses perkembangan yang cukup panjang. Sampai saat ini tidak kurang dari tujuh kali dilaksanakan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur mengenai hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Terdapat dua aspek penting yang secara substansial mewarnai perubahan itu, yakni pengaturan mengenai susunan pemerintahan daerah dan corak serta kadar desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berbagai kepentingan dibalik penerapan desentralisasi atau penyerahan kekuasaan yang melahirkan adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Meskipun ketentuan yang terdapat didalamnya menegaskan tentang penggunaan asas desentralisasi, namun secara empirik belum dapat memberikan pemahaman yang tuntas, sehingga memunculkan pelaksanaan otonomi daerah yang beranekaragam.³²

Memang dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pemerintah pusat dengan keterbatasannya tidak akan mampu untuk menjangkau sampai ke daerah-daerah. Karena itu harus dilaksanakan penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah. Hal ini didukung pendapat Bowman dan Hampton bahwa tiada satupun pemerintah dari suatu negara dengan wilayah yang luas dapat menentukan kebijaksanaan dan program-programnya secara efisien melalui sistem sentralisasi.³³ Namun permasalahan yang muncul adalah seberapa besar kadar penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah (desentralisasi) dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu perlu adanya pengkajian terhadap substansi kandungan materi undang-undang tersebut maupun aturan pelaksanaannya.

Hal ini berarti pendelegasian wewenang pemerintah melalui otonomi daerah merupakan solusi dalam menekan ketimpangan sosial ekonomi, kekerasan politik dan rendahnya partisipasi politik masyarakat. Samuel P. Huntington³⁴, mengemukakan bahwa untuk menyembuhkan permasalahan ini ialah modernisasi dan pembangunan sosial ekonomi yang cepat, yang akan meningkatkan seluruh

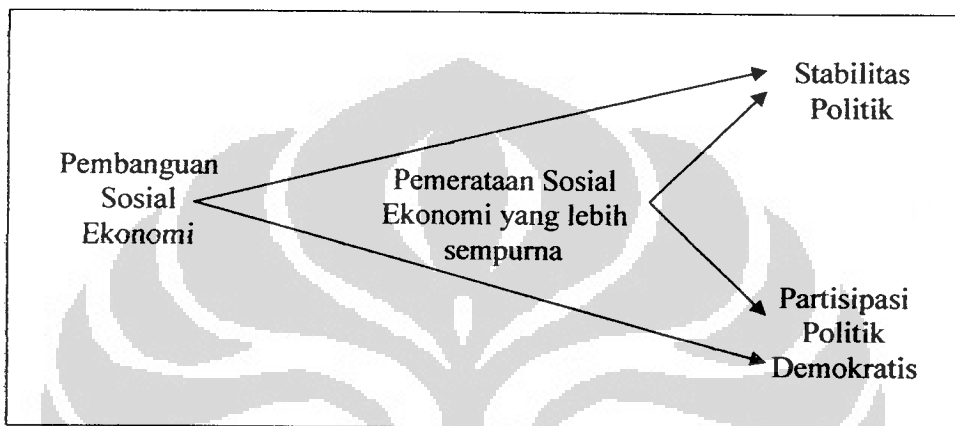
³² Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah : Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal.19.

³³ Octarto. SM, dkk., *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan, Samitra Media Utama*, Jakarta, 2004, hal.7.

³⁴ Samuel P. Huntington, dalam Miriam Budiardjo, (Ed), *Partisipasi...Op. Cit.*, hal. 35.

taraf kesejahteraan ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan dan dengan demikian akan memungkinkan pemerataan kekayaan secara adil, menumbuhkan stabilitas politik serta meletakkan dasar bagi partisipasi politik yang lebih luas dan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Kondisi ini sebagaimana yang digambarkan dalam model pembangunan yang liberal sebagai berikut :

Gambar 2.2. Model Pembangunan Liberal



Sumber : Miriam Budiardjo, 1998.

Secara teoritik, kemampuan pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hirarkis. Namun dalam pengertian yang luas, penyerahan ataupun pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat termasuk dalam domain kebijakan desentralisasi.

Robert A. Dahl³⁵ mengungkapkan bahwa sebuah sistem politik dinilai demokratis jika ada respon kontinyu untuk senantiasa membuat kebijakan dan mengimplementasikannya sesuai preferensi warga negara. Bertolak dari pendapat tersebut dapat diungkapkan empat aspek penting dalam demokratisasi yakni : *Pertama*, persoalan bagaimana suatu negara mewujudkan kehidupan politik yang demokratis bukan semata-mata masalah kultural tetapi juga persoalan struktural. *Kedua*, merupakan kewajiban pemerintah untuk melembagakan aturan main yang menjamin secara jelas terwujudnya kontinuitas dan persistensi preferensi warganegara. *Ketiga*, aturan-aturan main yang telah dibuat dapat dijamin

³⁵ Robert Dahl, 1978: 1-2 seperti yang dikutip Solahuddin Wahid, *Perspektif Teoritik Pilkada Langsung*, Swara Politika Vol. 6, No. 1, April 2005.

pelaksanaannya dalam kehidupan politik sepanjang proses transisi berlangsung. *Keempat*, supaya aspek kedua dan ketiga dapat diwujudkan sangat diperlukan munculnya pemimpin yang dipilih sesuai dengan preferensi warga negara.

Pemberian otonomi kepada daerah seperti yang ditulis Gregorius Sahdan³⁶ bertujuan untuk ; (1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; (2) memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan (3) mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi otonomi daerah pada hakekatnya tidak lain adalah refleksi dari *power sharing* yaitu pembagian atau distribusi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kebijaksanaan desentralisasi.³⁷

Selain itu, ada beberapa pertimbangan mengapa pemerintah perlu melaksanakan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah secara hirarkis. Pertimbangan-pertimbangan ini didasarkan pada kondisi ideal yang diinginkan, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, antara lain sebagai berikut :

- a. Desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b. Penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai upaya demokratisasi di tingkat lokal, untuk menarik rakyat ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan atau keputusan.
- c. Dalam sistem pemerintahan, desentralisasi adalah semata-mata sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien.
- d. Desentralisasi perlu dilaksanakan untuk menumbuhkan kultur daerah dengan perhatian dapat sepenuhnya kepada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.

³⁶ Gregorius Sahdan, *Pilkada Langsung, Beberapa Catatan Kritis, Analisis CSIS*, Vol. 34, No. 2, 2005, hal. 194.

³⁷ Oetarto, SM., dkk., *Op. Cit.*, hal. 8.

- e. Demi kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung memberdayakan daerahnya.

Penerapan desentralisasi apapun bentuknya, tetap memiliki keuntungan lebih besar dibanding segi kelemahannya. Karena itu, diupayakan untuk selalu diadakan evaluasi dan perbaikan pada sisi-sisi kelemahan yang timbul akibat pelaksanaannya. Keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh dari kebijakan desentralisasi antara lain *pertama*, tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Efisien berarti melalui pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintah tidak harus selalu terlibat langsung sebagaimana di dalam tugas-tugas yang terlalu sentralistik. Penghematan dilakukan bilamana pemerintah pusat tidak harus selalu melaksanakan tugas di daerah terutama yang menyangkut hal-hal yang tidak terlalu dominan urgensinya dalam pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan efektif, karena aparat-aparat di daerah sebagai ujung tombak pemerintahan akan lebih memahami permasalahan dan kemampuan daerahnya.

Kedua, melalui desentralisasi memungkinkan adanya inovasi oleh pemerintah daerah. Dengan diberikannya kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, secara tidak langsung akan mendorong mereka untuk menggali potensi-potensi baru yang dapat mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan sehari-hari terutama dari segi ekonomis serta penciptaan metode pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat.

Ketiga, melalui desentralisasi, aparat pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral (motivasi) untuk memelihara kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, selanjutnya melahirkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan-urusan yang telah dipercayakan kepada mereka serta menunjukkan hasil pelaksanaan tugas melalui tingkat produktivitas mereka.

Akan tetapi desentralisasi tanpa disertai dengan demokratisasi akan cenderung menghasilkan otonomi pemerintahan, bukan otonomi masyarakat di daerah (otonomi daerah). Desentralisasi yang merujuk pada otonomi masyarakat dapat diharapkan lebih menghasilkan pola hubungan yang mendudukkan pemerintahan daerah tergantung dan karena itu akan terpaksa melayani

masyarakat di daerah.³⁸ Selama ini, desentralisasi tampaknya telah mengabaikan dua hal penting yaitu partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban publik pemerintah daerah.³⁹

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari desentralisasi demokratik, bukan hanya menjadi sarana partisipasi publik secara riil tetapi juga mempertegas mekanisme pertanggungjawaban publik kepala daerah dalam konteks demokrasi di daerah. Bahkan lebih dari itu, desentralisasi demokratik sebenarnya juga menuntut pemilihan kepala daerah secara langsung pejabat-pejabat publik lainnya secara langsung. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesempatan semua golongan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, khususnya yang terkait dengan kehidupan masyarakat di daerah. Sehingga akan memaksa kepala daerah maupun pejabat-pejabat di daerah yang terpilih akan lebih memperhatikan masalah-masalah dan aspirasi masyarakat daerah. Dengan cara tersebut, pejabat-pejabat daerah dibuat untuk lebih tergantung kepada masyarakat daerah.⁴⁰

2.5. Perkembangan pelaksanaan Pilkada di Indonesia

Perkembangan pemilihan kepala daerah di Indonesia sangat tergantung pada perkembangan sistem pemerintahan daerah. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah telah beberapa kali merevisi undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Perubahan-perubahan tersebut sebagai upaya untuk menyesuaikan situasi dan kondisi perkembangan tata kehidupan demokrasi.

2.5.1. Era Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah (KND) dijelaskan bahwa Kepala Daerah yang memimpin KND dan Badan

³⁸ Tommi A. Legowo, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kota/Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal*. Agung Djojosoekarto dan Rudi Hauster, Eds, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah : Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*. (Jakarta: ADEKSI dan Konrad Adenauer Stiftung, 2003), hal. 56.

³⁹ *Ibid.*, hal. 57.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 60.

Eksekutif Daerah (BED) adalah pejabat pemerintah pusat di daerah. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan Kepala Daerah adalah ketua dan anggota badan eksekutif, sedangkan dalam hubungan dengan KND (badan legislatif), kepala daerah hanya menjadi ketua saja. Undang-Undang ini belum mengatur secara tegas mengenai prosedur pemilihan BPRD dan BED serta persyaratan-persyaratan tentang umur, pendidikan dan lain sebagainya.⁴¹

Setelah sesudah Agresi Militer I oleh Tentara Belanda, diumumkan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah yang intinya penghapusan perbedaan antar cara pemerintahan di Jawa dan Madura. Namun enam bulan kemudian tentara Belanda kembali melancarkan Agresi Militer II (1948) sehingga undang-undang ini tidak sempat dijalankan secara sempurna.⁴²

Pengangkatan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang ini sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden dari sedikit-dikitnya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi (ayat 1).
- b. Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota besar (ayat 2).
- c. Kepala Daerah Desa (kota kecil) diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa/ kota kecil (ayat 3).
- d. Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan dan mengingat adat istiadat didaerah tersebut (ayat 5).

Selanjutnya dengan berlakunya Konstitusi RIS dimana Negara Republik Indonesia berbentuk serikat maka ditetapkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1950

⁴¹ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 145-148.

⁴² Syafie. *Op. Cit.*, hal. 81.

tentang Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) yang secara substansial isinya tidak berbeda dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, menyebutkan Kepala Daerah diangkat oleh Presiden NIT dari dua sampai empat calon yang diajukan oleh DPR NIT.⁴³ Undang-Undang ini tidak sempat diterapkan karena disusul dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mengakibatkan pembubaran NIT.⁴⁴

Karena beranekaragamnya Undang-Undang yang mengatur pemerintahan di daerah, maka diberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini, ide pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat sebenarnya telah dicetuskan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) bahwa seorang Kepala Daerah harus yang dekat kepada dan dikenal oleh masyarakat daerah itu, karena itu Kepala Daerah harus orang yang mendapat kepercayaan dari rakyat dan disertai kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu. Sehubungan dengan itu, Kepala Daerah harus dipilih langsung oleh rakyat dari daerah yang bersangkutan.⁴⁵

2.5.2. Era Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

Dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan yaitu dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin yang sistem pemerintahan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga untuk menyesuaikan tata pemerintahan pada tanggal 7 September 1959, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah kemudian disusul Penpres No. 5 Tahun 1960 (disempurnakan) yang secara khusus mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong⁴⁶.

Berdasarkan Penpres No. 6 Tahun 1959, Kepala Daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Kepala Daerah Tingkat II dari antara calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan. Apabila

⁴³ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Rineka Cipta, 1991, hal. 32.

⁴⁴ Syafiie, *Op. Cit.* hal. 82.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Undang-Undang No. 1, LN. No. 6 Tahun 1957, TLN. No. 1143, Penjelasan Umum ad. 3.

⁴⁶ Marbun, B.N., *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal. 77-78.

pada pencalonan tidak ada yang memenuhi syarat, maka Presiden mengangkat Kepala Daerah diluar pencalonan.⁴⁷

2.5.3. Era Demokrasi Orde Baru (1965 – 1998)

Perkembangan politik mengalami pergeseran dari Orde Lama ke Orde Baru telah membawa nuansa baru dalam kepemimpinan kepala daerah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah menempatkan Kepala Daerah sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan. Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah Otonom juga sebagai Kepala Wilayah menempati posisi kendali yang cukup besar dan signifikan dalam masa ini.⁴⁸

Tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kedua fungsi tersebut. Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikit-dikitnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang yang telah dimusyawarkan antara Pimpinan DPRD/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri. Kemudian hasil pemilihan tersebut diajukan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dikitnya dua orang. Tata cara pelaksanaan pemilihan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Kepala Daerah Tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikit-dikitnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang yang telah dimusyawarkan antara Pimpinan DPRD/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Gubernur Kepala Daerah. Selanjutnya hasil pemilihan diajukan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sedikit-dikitnya dua orang.⁴⁹

2.5.4. Era Reformasi (1999 – 2004)

Dalam upaya memberikan otonomi yang cukup luas kepada daerah sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih

⁴⁷ Kansil, *Op. Cit.*, hal. 63.

⁴⁸ Kansil *Op. Cit.*, hal. 120.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Undang-Undang No. 5, LN No. 38 Tahun 1974, TLN No. 3037, Ps. 15-16.

terkenal dengan nama Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan koreksi total terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 34 ayat (1) ditetapkan : “ Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan”.⁵⁰ Sedangkan proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahap pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna khusus, pengiriman berkas pemilihan, pengesahan dan pelantikan.⁵¹

Secara prosedural, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, mulai dari tahap pencalonan sampai dengan penetapan. Proses pemilihan ini dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara langsung dengan ketentuan *one man one vote*. Presiden hanya berperan dalam pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh DPRD.

Namun secara substansial, mekanisme ini memberikan kewenangan politik yang lebih besar bagi rakyat di daerah untuk menentukan figur kepala daerahnya melalui wakil-wakilnya di DPRD. Namun dalam prakteknya mekanisme ini juga mempunyai kelemahan karena memberi ruang yang sangat dominan kepada DPRD dalam pemilihan kepala daerah sehingga hampir tidak ada ruang bagi rakyat di daerah untuk turut berpartisipasi.

2.5.5. Era Otonomi Daerah (2005 - Sekarang)

Melihat kelemahan-kelemahan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memperkenalkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah. Dengan keyakinan pemilihan kepala secara langsung akan sukses walau di sana sini masih ada kelemahan.

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Undang-Undang No. 22, LN. No. 60 Tahun 1999, TLN No. 3839, Ps. 34 ayat (1).

⁵¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 61.

Dalam Pasal 56 ayat (1) ditetapkan bahwa : “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”⁵²

Desakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi semakin menguat setelah dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2004 yang dinilai sukses.

Sebenarnya pemilihan secara langsung bukan hal yang baru dan asing bagi masyarakat Indonesia, bahkan sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang ini kita telah mengenal pemilihan kepala desa secara langsung. Memang diakui pemilihan kepala desa masih dalam kategori “pesta kecil” karena melibatkan hanya pemilih dalam jumlah sedikit dan daerah kecil tetapi prinsip dasarnya sama dengan pemilihan kepala daerah langsung.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, terlihat dari sebagian besar pasal-pasal yang seakan-akan khusus diadakan untuk mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk provinsi, kabupaten dan kota.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, hal yang berbeda dengan ketentuan sebelumnya adalah dalam hal pendaftaran dan penetapan pasangan calon, sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) sampai ayat (4), sebagai berikut :

- (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat

⁵² Dikutip dari *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*, Penerbit Harijaya Presindo, hal. 51.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

- (4) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Proses pelaksanaan kepala daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan yang meliputi persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan, yang ketentuannya secara teknis dijelaskan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.6. Ketahanan Nasional dan Ketahanan Daerah

2.6.1. Ketahanan Nasional

Berdasarkan rumusan pengertian Ketahanan Nasional sebagaimana yang dikutip oleh RM. Sunardi dari Lembaga Ketahanan Nasional yang diakomodasikan dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Skep/1328/XII/1974 bahwa Ketahanan Nasional didefinisikan sebagai : "Kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya".⁵³

Sementara Wan Usman mendefinisikan Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya, di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada.⁵⁴ Lebih lanjut dikemukakan bahwa Ketahanan Nasional dipandang sebagai suatu mata uang dengan dua sisi

⁵³ Sunardi, RM., *Pembinaan Ketahanan Bangsa : Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Kuanternita Adidarma, Jakarta, 2004, hal. 4-5.

⁵⁴ Wan Usman, dkk., *Daya Tahan Bangsa*, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, 2003, hal. 3.

yakni keamanan (*security*) dan Kesejahteraan (*prosperity*), keduanya harus berjalan seimbang dimana keamanan dan kesejahteraan mengandung muatan yaitu partisipasi masyarakat yang demokratis.⁵⁵

Jadi Ketahanan Nasional pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa dalam menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Kemampuan dan ketangguhan ini akan tetap stabil karena dukungan dari kekuatan nasional yang dimiliki oleh bangsa dan negara yakni mengandung aspek trigatra mencakup geografi, demografi, sumber kekayaan alam yang bergerak secara statis dan aspek pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Sebagai kondisi Ketahanan Nasional mengandung anasir-anasir dasar keuletan dan ketangguhan bangsa yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang berasal dari dalam negeri (internal) maupun dari luar negeri (eksternal) yang langsung maupun tidak membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional.

Menyadari adanya ketidakpastian mengenai segala keadaan yang dihadapi di masa yang akan datang dimana derajat atau intensitas ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, maka sudah semestinya Ketahanan Nasional harus tetap ditingkatkan. Dengan demikian unsur keuletan dan ketangguhan harus dibangun dan dikembangkan secara serasi dan seimbang.

Sementara di pihak lain apabila upaya pembangunan nasional ditujukan untuk tercapainya kesejahteraan dan keamanan bangsa dan negara secara serasi dan seimbang, maka pada gilirannya kesejahteraan dan keamanan yang mantap akan mendorong terwujudnya peningkatan kondisi Ketahanan Nasional.

2.6.2. Ketahanan Daerah

Ketahanan daerah, sama halnya dengan konsep ketahanan nasional. Sehingga ketahanan daerah merupakan kondisi dinamis suatu daerah yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan daerah dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan,

⁵⁵ *Ibid.*, hal 93.

hambatan dan gangguan baik dari daerah itu sendiri maupun dari luar daerah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup daerah dalam mencapai tujuan daerahnya.

Ketahanan daerah dan ketahanan nasional merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sebab keduanya saling mempengaruhi dan saling mendukung. Ketahanan Nasional dapat tetap stabil apabila didukung oleh ketahanan daerah yang mantap sebaliknya ketahanan daerah tercipta apabila ketahanan nasional tercapai.

Soemarno Sudarsono mengemukakan bahwa Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik akan sesuatu kekuatan nyata dan akan efektif jika dibina secara bertahap melalui adanya ketahanan wilayah dan ketahanan daerah dimana ketahanan daerah dibina melalui ketahanan rumah tangga/keluarga dan pada akhirnya ketahanan keluarga akan bertumpu pada kekuatan unsumnya, yaitu manusia yang harus memiliki ketahanan individu/pribadi.⁵⁶

Jadi dengan demikian ketahanan daerah adalah bagian integral dari ketahanan nasional, karena terwujudnya ketahanan nasional yang mantap berawal dari ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan daerah maupun ketahanan wilayah.

⁵⁶ Soemarno Soedarsono, *Hakekat Ketahanan Nasional*, Caraka Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 43.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan metode survei. Deskriptif analitis ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi apa yang terjadi di lapangan. Metode survei yakni mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data.

Menurut Sugiyono metode survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut.⁵⁷ Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dan hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran tentang Model Rekrutmen dalam penentuan bakal calon Kepala Daerah pada Pilkada DKI Jakarta.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Wilayah DKI Jakarta. Dengan waktu penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yakni dimulai dari bulan Oktober 2007 sampai dengan Januari 2008.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Partai Politik di DKI Jakarta yang memperoleh kursi di DPRD DKI Jakarta (hasil Pemilu tahun 2004) yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar (PG), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan pertimbangan bahwa partai-partai tersebutlah yang dapat mengajukan nama calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam pemilihan kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2005, hal. 7.

Sedangkan unit analisis adalah anggota Pengurus Harian Dewan Pengurus Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau setingkat setiap partai politik tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah mekanisme rekrutmen partai sedangkan pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan tentang rekrutmen partai adalah Pengurus Harian masing-masing DPD/DPW masing-masing partai. Jumlah Pengurus Harian dari ketujuh partai di atas sejumlah 220 orang yang menjadi populasi penelitian.

Jumlah sampel yang akan ditarik sebagai responden penelitian, ditentukan dengan menggunakan metode Solvin yang rumusnya sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + e^2 \cdot N}$$

di mana :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = taraf kesalahan 0,10

sehingga diperoleh jumlah sampel sebesar :

$$\begin{aligned} n &= \frac{220}{1 + 0,10^2 \cdot 220} \\ &= \frac{220}{3,2} \\ &= 68,75 \text{ dibulatkan menjadi } 70 \end{aligned}$$

Selanjutnya karena populasi heterogen (tidak sama) artinya terdiri dari beberapa partai yang berbeda dan masing-masing partai populasinya proporsional, maka besarnya sampel dari setiap partai ditarik dengan menggunakan teknik *proportional stratified random sampling*⁵⁸. Sehingga besarnya sampel yang

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 93.

ditarik dari masing-masing partai politik dapat dilihat pada perincian sebagai berikut :

a.	PKS	:	$32/220 \times 70$	=	10,18	menjadi	10	
b.	PD	:	$40/220 \times 70$	=	12,73	menjadi	13	
c.	PG	:	$38/220 \times 70$	=	12,09	menjadi	12	
d.	PDIP	:	$19/220 \times 70$	=	6,04	menjadi	6	
e.	PPP	:	$23/220 \times 70$	=	7,32	menjadi	7	
f.	PAN	:	$44/220 \times 70$	=	14,00	menjadi	14	
g.	PDS	:	$24/220 \times 70$	=	7,63	menjadi	8	
J u m l a h								70

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Secara operasional variabel perlu didefinisikan yang bertujuan untuk menjelaskan makna variabel penelitian. Karena itu teori-teori atau konsep perlu dijelaskan dalam penelitian ini agar dapat diteliti secara empiris, dioperasionalkan dengan mengembangkan menjadi variabel, yang berarti sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Untuk itu dilakukan dengan cara memilih dimensi tertentu konsep yang mempunyai variasi nilai.

a. Rekrutmen Calon

Rekrutmen calon merupakan suatu proses seleksi atau pemilihan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam suatu sistem politik pada umumnya dan tugas pemerintahan pada khususnya. Proses seleksi atau pemilihan calon ini pada dasarnya terdiri atas dua macam pola atau bentuk, yakni :

1) Rekrutmen Tertutup

Rekrutmen tertutup (*Closed recruitment process*) adalah suatu proses rekrutmen yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif dan pejabat eksekutif. Proses seringkali lebih didasarkan pada ikatan kelompok, ikatan ideologi, atau ikatan koneksitas (keluarga). Dalam sistem politik yang masih tradisional dan belum melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial biasanya masih diterapkan dalam sistem politik tradisional, yang didasarkan pada hubungan

kekeluargaan, kesamaan ideologi atau agama, kesamaan daerah asal (suku) dan kelompok.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang rekrutmen tertutup, maka dapat dikemukakan indikator-indikatornya bahwa pertama, individu-individu yang tertentu saja yang dapat direkrut, mekanisme rekrutmen dengan penunjukan yang dilakukan oleh elit-elit politik/partai dan penunjukan tersebut didasarkan pada ikatan-ikatan kelompok, ikatan ideologi, koneksitas dan persamaan agama, suku ras dan kedekatan hubungan.

2) Rekrutmen Terbuka

Rekrutmen terbuka (*Opened recruitment process*) adalah nama-nama calon yang diajukan, diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi murni. Dalam proses rekrutmen biasanya faktor keahlian, kecakapan dan pendidikan menjadi persyaratan yang penting. Di negara demokrasi dilakukan secara terbuka untuk calon-calon yang berbakat. Akan tetapi calon-calon dalam jabatan politik cenderung berasal dari orang-orang yang mempunyai latar belakang kelas menengah atau kelas atas, dan kelas rendah yang berhasil memperoleh pendidikan karena pemimpin-pemimpin politik dan pemerintahan di negara-negara maju dan modern membutuhkan pengetahuan dan kecakapan yang sulit diperoleh dengan cara lain.

Haryanto mengemukakan rekrutmen yang terbuka adalah rekrutmen yang terbuka bagi seluruh warga negara tanpa kecuali apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan. Setiap warga negara yang mempunyai bakat, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Selanjutnya Sutoro Eko menambahkan bahwa perlu adanya model demokratis yang mengedepankan proses pemilihan secara terbuka, kompetitif dan partisipatif. Persetujuan dan legitimasi rakyat menjadi unsur utama dalam proses rekrutmen, sebab pejabat politik itulah yang kemudian membuat kebijakan dan memerintah rakyat.

Model demokratis harus diterapkan dengan baik dalam rekrutmen politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip : mempromosikan kandidat yang berkualitas, yakni memiliki kapasitas, integritas, legitimasi dan populer (dikenal) di mata masyarakat yang dilaksanakan secara terbuka. Masyarakat harus

memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat dari partai politik, *track record* masing-masing kandidat dan proses hingga penentuan daftar calon.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa indikator dalam rekrutmen terbuka yakni : nama calon yang direkrut terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi kriteria, dilaksanakan secara kompetitif, adanya partisipasi masyarakat dan mempromosikan kandidat yang berkualitas yakni memiliki kapasitas, integritas, populer di mata masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat.

b. Kinerja Calon

Kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja seseorang dalam suatu organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan secara konkrit dan dapat diukur. Kinerja merupakan fungsi dari usaha seseorang (*effort*) yang didukung dengan motivasi yang tinggi dengan kemampuan (*ability*) yang diperoleh melalui latihan-latihan (*training*) atau dengan pengetahuan (*knowledge*) melalui pendidikan atau pengalaman.

Henry Simamora mengemukakan bahwa kinerja (*performance*) merupakan fungsi antara motivasi dengan kemampuan (*ability*). Motivasi disini adalah kesediaan seseorang untuk berusaha sekeras-kerasnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kemampuan merupakan potensi seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Kemampuan (*competence*) mencakup keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) serta pengalaman.

Selanjutnya Suyadi Prawirosentono, mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja seseorang tidaklah cukup hanya dengan membuat standar kecakapan saja. Apabila kecakapan seringkali dipahami sebatas keterampilan teknis (*technical skill*) dan kemampuan pengetahuan seseorang maka perlu ditetapkan suatu standar kompetensi seseorang yang mempunyai cakupan lebih luas dan komprehensif yang terdiri dari motif, sifat, citra diri, peran sosial, pengetahuan dan keterampilan.

Dari pendapat tersebut di atas, maka kinerja merupakan penilaian tingkat kerja yang dikerjakan dengan jelas. Prestasi ditentukan oleh interaksi seseorang terhadap kemampuan kerja, baik cakupan kerja maupun kedalaman kerja. Hal ini

jelas menuntut adanya wawasan pengetahuan yang memadai tentang pekerjaan secara menyeluruh. Dengan demikian kinerja dapat diukur melalui prestasi, pengetahuan dan keterampilan, tanggung jawab, dedikasi, ketaatan dan disiplin.

c. Dukungan Terhadap Calon

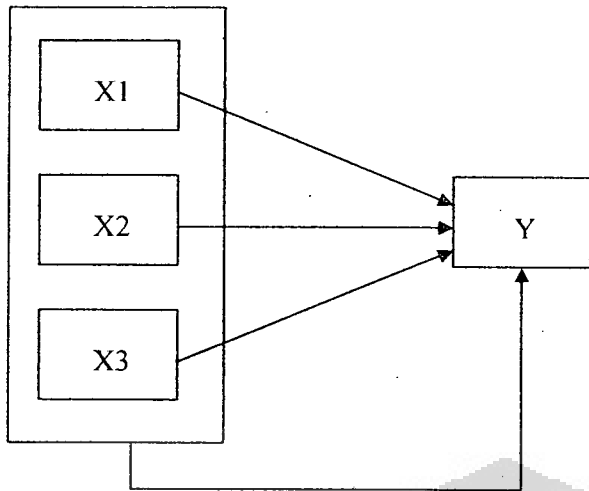
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan dukungan adalah suatu bantuan atau sokongan yang kepada figur tertentu untuk dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah. Dukungan itu dapat berasal dari berbagai kalangan baik dari internal partai maupun eksternal partai misalnya dari unsur partai atau gabungan partai yang mencalonkan; arus bawah; birokrasi pemerintahan dan TNI/Polri; kelompok-kelompok kepentingan di luar partai politik seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan pemuda, organisasi profesi dan bisnis; dan kelompok penekan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, organisasi buruh/tani/nelayan dan pers lokal.

Bentuk bantuan tersebut dapat berupa dukungan yang bersifat emosional, kognitif dan material. Dalam pelaksanaan Pilkada dapat terlihat jelas misalnya pada proses pencalonan, seleksi calon, pelaksanaan kampanye sampai pada tahap pemberian suara dalam memenangkan salah satu kandidat.

d. Ikatan Primordial

Sebagaimana definisi Geertz primordialisme adalah keterikatan terhadap suatu yang diantaranya dibawa melalui kelahiran. Juga primordialisme diidentikkan dengan orientasi individu atau kelompok. Primordialisme adalah sikap yang mementingkan keuntungan-keuntungan kelompok. Ikatan primordial didasarkan pada keterikatan-keterikatan berdasarkan keagamaan, etnis dan kedaerahaan, keanggotaan dalam suatu asosiasi atau profesi.

Berangkat dari permasalahan penelitian mengenai model rekrutmen dalam menentukan calon pada pilkada maka variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

X1 = Kinerja Calon

X2 = Dukungan Terhadap Calon

X3 = Ikatan Primordial

Y = Rekrutmen

3.5. Instrumen Penelitian

Alat ukur penelitian ini berbentuk angket dengan tingkat pengukuran ordinal dimana kategori atau alternatif jawaban masing-masing instrumen/item pertanyaan terdiri atas 5 tingkatan berdasarkan skala Likert. Untuk analisis secara kuantitatif, maka alternatif jawaban tersebut akan diberi skor mulai dari nilai 1 sampai 5 dengan tujuan untuk menggambarkan persepsi responden. Adapun pembobotan atau skoring setiap pertanyaan, sebagai berikut :

- a. Untuk variabel Model Rekrutmen Tertutup dan Rekrutmen Terbuka, dengan pembobotan sebagai berikut :

Skor 5 = Sangat Setuju

Skor 4 = Setuju

Skor 3 = Ragu-ragu (netral)

Skor 2 = Tidak Setuju

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju

- b. Untuk variabel Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial, dengan pembobotan sebagai berikut :

Skor 5 = Sangat Penting

Skor 4 = Penting

Skor 3 = Ragu-ragu (netral)

Skor 2 = Tidak Penting

Skor 1 = Sangat Tidak Penting

Kisi-kisi instrumen penelitian untuk mengetahui model rekrutmen dan faktor-faktor berpengaruh dalam rekrutmen, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Rekrutmen Tertutup

Dimensi	Indikator	Butir Instrumen	Nomor Instrumen
1	2	3	4
Sumber bakal calon	Calon dari internal (kader) partai	a. Dalam penjangkaran lebih diprioritaskan bagi kader partai.	1
		b. Calon kader partai dianggap lebih berkualitas.	2
		c. Pendaftaran tidak terbuka untuk masyarakat.	3
		d. Calon dari luar partai dianggap kurang bermanfaat bagi partai.	4
		e. Nama calon umumnya dimunculkan dari pengurus pusat.	5
		f. Tidak adanya sirkulasi kepemimpinan.	6
Mekanisme seleksi lebih elitis	Cenderung oligarkhi atau ditentukan oleh elit partai	a. Tidak dibentuk tim/panitia pelaksana.	7
		b. Penetapan calon adalah kewenangan pengurus pusat partai.	8
		c. Bakal calon usulan dari pengurus pusat dan menjadi kebijakan partai.	9
		d. Dalam menetapkan calon lebih ditentukan pengurus partai tingkat atas (DPP atau Pimpinan Partai).	10
		e. Peranan pengurus partai di tingkat rendah dalam seleksi kurang.	11
		f. Pimpinan partai lebih berperan menentukan nama calon.	12
	Orientasi pada status	a. Lebih cenderung pada figur yang sudah mapan secara ekonomi.	13
		b. Masyarakat lebih memilih calon yang memiliki latar belakang status sosial.	14

1	2	3	4
		c. Lebih didasarkan faktor hubungan kedekatan dengan orang yang berpengaruh/penguasa.	15
		d. Lebih cenderung pada calon penduduk asli (putra daerah).	16
		e. Didasarkan pada faktor kedekatan/pertemanan dengan pengurus.	17
		f. Calon bukan penduduk asli kurang memahami daerah tersebut.	18
		g. Didasarkan pada faktor kesamaan agama/kepercayaan bagi calon.	19
		h. Cenderung pada faktor kesamaan latar belakang suku/etnis.	20

Tabel 3.2. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Rekrutmen Terbuka

Dimensi	Indikator	Butir Instrumen	Nomor Instrumen
1	2	3	4
Sumber bakal calon terbuka	Calon dari internal (kader) partai maupun dari masyarakat	a. Menganggap calon yang memiliki potensi bukan hanya di partai.	1
		b. Dilaksanakan pengumuman untuk menjaring banyak calon.	2
		c. Menjaring banyak calon untuk mendapatkan calon yang tepat.	3
		d. Nama bakal calon yang terdaftar disosialisasikan ke masyarakat.	4
		e. Seleksi melalui konvensi untuk mendapatkan calon berkompeten..	5
		f. Informasi dapat diakses oleh umum.	6

1	2	3	4
Partisipasi masyarakat	Proses seleksi	a. Masyarakat memiliki ikut berperan dalam seleksi calon.	7
	melibatkan partisipasi masyarakat	b. Seleksi yang fair melalui konvensi partai meskipun proses panjang.	8
		c. Partai membentuk tim/panitia seleksi yang independen.	9
		d. Proses seleksi lebih transparan dan melibatkan unsur masyarakat dalam menilai <i>track record</i> calon.	10
		e. Adanya penilaian terhadap visi dan misi serta program-program calon.	11
		f. Dalam seleksi menerapkan kompetisi murni dan transparansi.	12
Didasarkan pada kualitas calon	Orientasi pada	a. Mengutamakan tingkat pendidikan yang dimiliki calon	13
	Kualitas/ prestasi	b. Didasarkan pada kemampuan teknis/manajerial calon.	14
	kerja calon	c. Mengutamakan training yang diikuti oleh calon.	15
		d. Calon lebih mengakar dan dipercaya masyarakat.	16
		e. Memunculnya figur-figur yang masih <i>fresh</i> dan energik .	17
		f. Calon yang dikenal (populer) dimasyarakat.	18
		g. Orientasi pada pengalaman organisasi/jabatan calon.	19
		h. Seleksi dilaksanakan melalui uji meliputi kemampuan akademik, mental maupun fisik/kesehatan.	20

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kinerja

Dimensi	Indikator	Butir Instrumen	Nomor Instrumen
1	2	3	4
Prestasi	Kecakapan/ pengetahuan	a. Tingkat pendidikan umum yang dimiliki calon.	1
		b. Jenis pelatihan/training yang dimiliki seorang calon.	2
	Pengalaman	a. Pengalaman berorganisasi di partai bagi seorang calon.	3
		b. Pengalaman berorganisasi di luar partai atau dalam masyarakat.	4
	Profesi/ pekerjaan	Kesesuaian profesi/ pekerjaan dengan jabatan publik/politik .	5
	Hasil kerja	a. Prestasi dalam penyelesaian problem masyarakat dan bangsa.	6
b. Prestasi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.		7	
Kepribadian	Tanggung jawab	Tanggung jawab dalam penyelesaian tugas	8
	Dedikasi	Mempunyai dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan	9
	Disiplin	a. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas	10
		b. Kedisiplinan terhadap waktu	11
Loyalitas	Memiliki loyalitas terhadap aturan	12	

Tabel 3.4. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Dukungan

Dimensi	Indikator	Butir Instrumen	Nomor Instrumen
1	2	3	4
Dukungan Emosional	Simpati	a. Adanya keterikatan emosional dengan masyarakat (massa).	1
		b. Memperoleh restu dari ormas misalnya kelompok tokoh agama/ alim ulama.	2
		c. Adanya simpati dari kalangan profesi dan pelaku ekonomi/bisnis.	3
		d. Dukungan masyarakat akademisi bagi seorang calon.	4
		e. Dukungan dari kelompok penekan misalnya akademisi, pers dan LSM.	5
Dukungan Kognitif	Atas dasar pengetahuan	a. Dukungan masyarakat didasarkan pengetahuan yang dimiliki.	6
		b. Adanya informasi yang cukup mengenai calon.	7
		c. Adanya bantuan dari masyarakat berupa masukan, saran atau ide kepada calon.	8
Dukungan Instrumental	Pemberian Suara, ikutserta dalam kegiatan dan bantuan dana	a. Kesiediaan dalam memberikan suara.	9
		b. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan untuk memenangkan kandidatnya.	10
		c. Kesiediaan meluangkan waktu untuk mendukung calon.	11
		d. Ikut serta dalam memberikan bantuan dana dalam rangka memenangkan calonnya.	12

Tabel 3.5. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Ikatan Primordial

Dimensi	Indikator	Butir Instrumen	Nomor Instrumen
1	2	3	4
Status sosial	Keturunan	Atas dasar faktor latar belakang status sosial (misalnya keturunan atau trah) yang dimiliki.	1
	Peran sosial	Didasarkan pada peran sosial yang diperankan dalam masyarakat.	2
	Status ekonomi	Kecenderungan pada faktor status ekonomi yang dimiliki sang calon.	3
Hubungan kedekatan	Keluargaan	Kecenderungan didasarkan pada faktor ikatan kekeluargaan.	4
	Persahabatan	Didasarkan pada faktor hubungan sebagai rekan/teman/sejawat	5
	Hubungan kerja	Adanya kesamaan profesi dengan calon	6
	Satu Almamater	Karena berasal dari sekolah yang sama	7
Kesamaan agama	Dengan pribadi	Lebih mementingkan kesamaan agama yang dianut.	8
	Agama mayoritas	Agama yang dianut sama dengan agama mayoritas pemilih.	9
Kesamaan suku/ daerah	Etnis	Didasarkan pada asal usul atau suku (etnis) penduduk mayoritas	10
	Penduduk asli	Lebih cenderung pada putra daerah/ penduduk asli setempat.	11
	Kesamaan ras	Karena adanya kesamaan ras dengan calon	12

3.6. Metode Analisis Data

Pertama, untuk menjawab tujuan penelitian butir pertama, dilakukan analisis secara deskriptif dengan melakukan perbandingan persepsi responden terhadap rekrutmen tertutup dan rekrutmen terbuka. Dengan analisis tersebut, maka akan dapat diketahui model rekrutmen yang cenderung diterapkan oleh partai politik yang menjadi obyek penelitian ini dalam menentukan bakal calon dalam rangka mengikuti pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta.

Selanjutnya dilakukan uji beda rata-rata persepsi responden terhadap kedua model rekrutmen tersebut, dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Dimana :

- \bar{X} = rata-rata (mean) sampel
- S = Standar deviasi sampel
- n = Sampel

Kedua, untuk menjawab tujuan penelitian pada butir kedua, yakni mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rekrutmen partai, dilakukan dengan analisis regresi ganda karena terdapat tiga variabel independen sebagai faktor prediktor dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana :

- Y = Nilai variabel dependen
- a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
- b = Koefisien regresi variabel dependen terhadap independen
- X = Nilai variabel independen

Namun sebelumnya dilakukan analisis korelasi dengan menggunakan rumus korelasi *Product Moment Pearson* untuk mengetahui arah atau kuatnya hubungan antara variabel-variabel yang ada yakni variabel Kinerja (X_1), Dukungan (X_2) dan Ikatan Primordial (X_3) terhadap variabel dependen yakni rekrutmen partai (variabel Y), dengan rumus sebagai berikut :

$$R_{YX_1X_2X_3} = \sqrt{\frac{r_{yx1}^2 + r_{yx2}^2 + r_{yx3}^2 - r_{yx1}r_{yx2}r_{yx3}}{1 - r_{x1x2x3}^2}}$$

Dimana :

- $R_{YX_1X_2X_3}$ = Korelasi antara variabel X_1 , X_2 dan X_3 secara simultan terhadap variabel Y
- r_{yx1} = Korelasi Product Moment antara X_1 dengan Y
- r_{yx2} = Korelasi Product Moment antara X_2 dengan Y
- r_{yx3} = Korelasi Product Moment antara X_3 dengan Y
- $r_{yx1}r_{yx2}r_{yx3}$ = Korelasi Product Moment antara X_1 , X_2 dengan X_3

Untuk dapat memberikan interpretasi koefisien korelasi atau mengetahui kuat lemahnya hubungan antara variabel tersebut, maka berpedoman pada tingkat hubungan sebagai berikut⁵⁹ :

- 0,00 sampai dengan 0,20 berarti sangat lemah
- 0,21 sampai dengan 0,40 berarti lemah
- 0,41 sampai dengan 0,70 berarti kuat
- 0,71 sampai dengan 0,90 berarti sangat kuat
- 0,91 sampai dengan 0,99 berarti sangat kuat sekali
- 1 berarti korelasi sempurna.

Dari kuat rendahnya hubungan tersebut maka diperlukan uji signifikansi yakni untuk mengetahui apakah hubungan yang ditemukan itu berlaku bagi seluruh populasi atau hanya berlaku pada sampel yang ditarik saja. Dalam uji signifikansi korelasi ganda, dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

⁵⁹ Bhuwono Agung Nugroho, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, Penerbit Andi, (Yogyakarta : 2005), hal 36.

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Dimana :

- R = Koefisien korelasi ganda
- k = Jumlah variabel independen
- n = Jumlah sampel

Nilai yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai dalam Tabel Distribusi F (Tabel F), dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1) dengan taraf kesalahan 5%. Dengan ketentuan bahwa apabila $F_{hitung} >$ dari F_{tabel} , maka koefisien korelasi ganda dinyatakan signifikan yaitu dapat digeneralisasikan atau diberlakukan untuk seluruh populasi, sebaliknya apabila $F_{hitung} <$ dari F_{tabel} , maka koefisien korelasi ganda dinyatakan tidak signifikan sehingga tidak dapat diberlakukan untuk seluruh populasi.

Ketiga, untuk menjawab tujuan penelitian yang ketiga, kesimpulan dari analisis tentang model rekrutmen dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam rekrutmen dengan dukungan data sekunder yang diperoleh dilapangan kemudian dihubungkan dengan konsep ketahanan nasional maupun ketahanan daerah. Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai dampak rekrutmen dalam pelaksanaan pilkada terhadap ketahanan daerah maupun ketahanan nasional.

3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

a. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir/ instrumen dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Dengan pengertian lain bahwa untuk mengetahui apakah alat ukur yang disusun dapat digunakan mengukur suatu variabel dengan tepat. Validitas suatu instrumen akan menggambarkan tingkat kinerja alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran. Apabila instrumen mampu untuk mengungkapkan (mengukur apa yang diukur) maka instrumen tersebut disebut valid.

Dalam penelitian ini uji validitas instrumen dilakukan dengan cara uji validitas isi (*content validity*) dengan menggunakan rumus korelasi *Product Moment Pearson*⁶⁰ sebagai berikut :

$$r \text{ hitung} = \frac{n (\Sigma XY) (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2\} \{n(\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Dimana :

- r hitung = koefisien korelasi
- X = skor responden tiap instrumen
- Y = total skor instrumen tiap responden
- n = jumlah responden
- Σ = sigma/jumlah
- √ = akar kuadrat

Selanjutnya dilakukan Uji - t dengan rumus :

$$t \text{ hitung} = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Dimana :

- t hitung = Nilai t
- r = Koefisien korelasi hasil r_{hitung}
- n = Jumlah responden

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi (t hitung) langsung dikonsultasikan pada tabel distribusi (Tabel-t) dengan taraf kesalahan (*alpha*) = 0,05 atau 5% dan derajat kebebasan ($dk = n - 2$). Dengan ketentuan bahwa apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka instrumen tersebut dinyatakan valid sebaliknya apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

⁶⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed)., *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 137.

b. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuisioner. Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel apabila memberikan hasil skor yang konsisten pada setiap pengukuran. Dengan demikian apabila alat ukur tersebut digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa.

Metode yang dipergunakan untuk mencari reabilitas inernal yaitu menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu pengukuran, menggunakan metode *Alpha* dengan rumus :

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k - 1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i}{S_t} \right)$$

Dimana :

- r_{11} = Nilai reliabilitas
- $\sum S_i$ = Jumlah varians skor tiap item
- S_t = Varians total
- k = Jumlah item

Untuk mendapatkan nilai reliabilitas (r_{11}), dilakukan dengan menghitung Varian Skor masing-masing item kemudian menjumlahkan Varians semua item dan menghitung varians total sebelumnya. Hasil r_{11} dikonsultasikan dengan r_{tabel} (Tabel r Product Moment) dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan ($dk = n-1$). Keputusan diperoleh dengan membandingkan r_{11} dengan r_{tabel} , dengan ketentuan bahwa apabila $r_{11} > r_{tabel}$ berarti Reliabel dan sebaliknya apabila $r_{11} < r_{tabel}$ berarti Tidak Reliabel.

Alat uji reliabilitas dalam penelitian ini, menggunakan Program SPSS dengan pilihan *model reliability Koefisien Alpha Cronbach* yang merupakan *model internal consistency score* berdasarkan korelasi rata-rata antara butir-butir yang ekuivalen. Alpha Cronbach merupakan salah satu koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan. Alpha Cronbach dapat diinterpretasikan sebagai korelasi

dari skala yang diamati dengan semua kemungkinan pengukuran skala yang mengukur hal yang sama dan menggunakan jumlah butir pertanyaan yang sama.

Sedangkan untuk menjelaskan tingkat reliabel dengan metode Alpha Cronbach diukur berdasarkan skala Alpha ($\alpha = 0 - 1$), apabila skala tersebut diklompokkan ke dalam lima kelas dengan range yang sama maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan seperti tabel sebagai berikut:⁶¹

- 1) Nilai 0,00 sampai dengan 0,20 : Kurang Reliabel
- 2) Nilai > 0,20 sampai dengan 0,40 : Agak Reliabel
- 3) Nilai > 0,40 sampai dengan 0,60 : Cukup Reliabel
- 4) Nilai > 0,60 sampai dengan 0,80 : Reliabel
- 5) Nilai > 0,80 sampai dengan 1,00 : Sangat Reliabel

c. Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian

Untuk uji validitas instrumen dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan korelasi Pearson (memenuhi asumsi parametrik karena sampel yang dipergunakan sebanyak 30 sampel). Nilai koefisien korelasi (r hitung) yang diperoleh dari korelasi setiap instrumen atau pertanyaan. Dalam Program SPSS Ver. 15.0 dapat dilihat pada kolom total skor dalam tabel *Correlations* kemudian dikonsultasikan dengan r tabel dengan ketentuan bahwa apabila r hitung $>$ r tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan valid sebaliknya apabila r hitung $<$ r tabel maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Menggunakan jumlah responden sebanyak 30 dengan $dk = 30 - 2 = 28$ ($dk = n - 2$), maka nilai r tabelnya adalah 0,361.

Sedangkan uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan metode Alpha. Hasil uji reliabel keseluruhan instrumen atau butir pertanyaan adalah dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* pada tabel *Reliability Statistics* dalam Program SPSS. Dengan ketentuan pengambilan keputusan apabila r alpha $>$ 0,60, maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel sedangkan apabila r alpha $<$ 0,60, maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel.

⁶¹ Riduan, *Op. Cit.*, hal. 110.

1). Variabel Kinerja (X1)

Hasil validitas masing-masing instrumen atau butir pertanyaan dalam variabel kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja (X1)

No. Instrumen	R hitung	R tabel	Keterangan
P1	0,451*	0,361	Valid
P2	0,434*	0,361	Valid
P3	0,819**	0,361	Valid
P4	0,840**	0,361	Valid
P5	0,633**	0,361	Valid
P6	0,837**	0,361	Valid
P7	0,602**	0,361	Valid
P8	0,446*	0,361	Valid
P9	0,607**	0,361	Valid
P10	0,611**	0,361	Valid
P11	0,570**	0,361	Valid
P12	0,591**	0,361	Valid

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian sebanyak 12 item dinyatakan valid karena rhitung > rtabel (0,361). Jadi instrument-instrumen penelitian dalam variabel kinerja tersebut seluruhnya akan dipergunakan.

Sedangkan hasil reliabilitas instrumennya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.853	.855	12

Berdasarkan hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan di atas, dengan melihat nilai Cronbach's Alpha tabel Reliability Statistics yaitu 0,853. Karena $0,853 > 0,60$ (syarat reliabel), maka instrumen-instrumen yang merupakan indikator dari variabel kinerja adalah reliabel.

2). Variabel Dukungan (X2)

Hasil validitas masing-masing instrumen atau butir pertanyaan dalam variabel dukungan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Hasil Uji Validitas Variabel Dukungan (X2)

No. Instrumen	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0,752**	0,361	Valid
P2	0,519**	0,361	Valid
P3	0,768**	0,361	Valid
P4	0,522**	0,361	Valid
P5	0,763**	0,361	Valid
P6	0,615**	0,361	Valid
P7	0,418*	0,361	Valid
P8	0,885**	0,361	Valid
P9	0,895**	0,361	Valid
P10	0,653**	0,361	Valid
P11	0,711**	0,361	Valid
P12	0,835**	0,361	Valid

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian sebanyak 12 item dinyatakan valid karena rhitung $>$ rtabel (0,361). Jadi instrument-instrumen penelitian dalam variabel dukungan tersebut seluruhnya akan dipergunakan.

Sedangkan hasil reliabilitas instrumennya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Dukungan (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.900	.904	12

Berdasarkan hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan di atas, dengan melihat nilai Cronbach's Alpha tabel Reliability Statistics yaitu 0,900. Karena $0,900 > 0,60$ (syarat reliabel), maka instrumen-instrumen yang merupakan indikator dari variabel dukungan adalah reliabel.

3) Variabel Ikatan Primordial (X 3)

Hasil validitas masing-masing instrumen atau butir pertanyaan dalam variabel dukungan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10. Hasil Uji Validitas Variabel Ikatan Primordial (X3)

No. Instrumen	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0,657**	0,361	Valid
P2	0,696**	0,361	Valid
P3	0,772**	0,361	Valid
P4	0,773**	0,361	Valid
P5	0,552**	0,361	Valid
P6	0,697**	0,361	Valid
P7	0,643**	0,361	Valid
P8	0,804**	0,361	Valid
P9	0,871**	0,361	Valid
P10	0,855**	0,361	Valid
P11	0,559**	0,361	Valid
P12	0,680**	0,361	Valid

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian sebanyak 12 item dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,361). Jadi instrument-instrumen penelitian dalam variabel ikatan primordial tersebut seluruhnya akan dipergunakan.

Sedangkan hasil reliabilitas instrumennya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Ikatan Primordial (X3)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.913	.912	12

Berdasarkan hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan di atas, dengan melihat nilai Cronbach's Alpha tabel Reliability Statistics yaitu 0,913. Karena $0,913 > 0,60$ (syarat reliabel), maka instrumen-instrumen yang merupakan indikator dari variabel ikatan primordial adalah reliabel.

d. Variabel Rekrutmen Tertutup (Y1)

Hasil validitas masing-masing instrumen atau butir pertanyaan dalam variabel rekrutmen tertutup, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12. Hasil Uji Validitas Variabel Rekrutmen Tertutup (Y1)

No. Instrumen	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0,832**	0,361	Valid
P2	0,583**	0,361	Valid
P3	0,495**	0,361	Valid
P4	0,718**	0,361	Valid
P5	0,514**	0,361	Valid
P6	0,375*	0,361	Valid
P7	0,638**	0,361	Valid

P8	0,779**	0,361	Valid
P9	0,521**	0,361	Valid
P10	0,757**	0,361	Valid
P11	0,816**	0,361	Valid
P12	0,788**	0,361	Valid
P13	0,740**	0,361	Valid
P14	0,488**	0,361	Valid
P15	0,314	0,361	Tidak Valid
P16	0,832**	0,361	Valid
P17	0,311	0,361	Tidak Valid
P18	0,472**	0,361	Valid
P19	0,360	0,361	Tidak Valid
P20	0,443*	0,361	Valid

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah instrumen penelitian sebanyak 20 item terdapat 17 item yang dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan 3 item (Nomor : 15, 17 dan 19) yang dinyatakan tidak valid karena $r_{hitung} < r_{tabel}$ (0,361). Jadi instrument-instrumen penelitian dalam variabel rekrutmen terbuka yang valid tersebut seluruhnya akan dipergunakan sedangkan yang tidak valid akan dibuang.

Sedangkan hasil reliabilitas instrumennya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Rekrutmen Tertutup (Y1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.896	.902	20

Berdasarkan hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan di atas, dengan melihat nilai Cronbach's Alpha tabel Reliability Statistics yaitu 0,896. Karena $0,896 > 0,60$ (syarat reliabel), maka instrumen-instrumen yang merupakan indikator dari variabel rekrutmen tertutup adalah reliabel.

e. Variabel Rekrutmen Terbuka (Y2)

Hasil validitas masing-masing instrumen atau butir pertanyaan dalam variabel rekrutmen terbuka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14. Hasil Uji Validitas Variabel Rekrutmen Terbuka (Y2)

No. Instrumen	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0,757**	0,361	Valid
P2	0,216	0,361	Tidak Valid
P3	0,568**	0,361	Valid
P4	-0,178	0,361	Tidak Valid
P5	0,426*	0,361	Valid
P6	0,730**	0,361	Valid
P7	0,501**	0,361	Valid
P8	0,500**	0,361	Valid
P9	0,559**	0,361	Valid
P10	0,815**	0,361	Valid
P11	0,534**	0,361	Valid
P12	0,512**	0,361	Valid
P13	0,662**	0,361	Valid
P14	0,406*	0,361	Valid
P15	0,124	0,361	Tidak Valid
P16	0,501**	0,361	Valid
P17	0,773**	0,361	Valid
P18	0,736**	0,361	Valid
P19	0,222	0,361	Tidak Valid
P20	0,142	0,361	Tidak valid

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah instrumen penelitian sebanyak 20 item terdapat 15 item yang dinyatakan valid karena rhitung > rtabel dan 5 item (Nomor 2, 4, 15, 19 dan 20) yang dinyatakan tidak valid karena rhitung < rtabel (0,361). Jadi instrument-instrumen penelitian dalam variabel rekrutmen

terbuka yang valid tersebut seluruhnya akan dipergunakan sedangkan yang tidak valid akan dibuang.

Sedangkan hasil reliabilitas instrumennya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Rekrutmen Terbuka (Y2)

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.773	.829	20

Berdasarkan hasil uji reliabel keseluruhan butir pertanyaan di atas, dengan melihat nilai Cronbach's Alpha tabel Reliability Statistics yaitu 0,773. Karena $0,773 > 0,60$ (syarat reliabel), maka instrumen-instrumen yang merupakan indikator dari variabel rekrutmen tertutup adalah reliabel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Profil Partai Politik

4.1.1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sejak berdirinya partai ini, Islam yang menjadi unsur dominan mewarnainya sampai sekarang ini. Untuk menjaga kelestarian *Ukhuwah* dan perjuangan Islam, partai-partai Islam yang berfusi tahun 1973 sepakat menerima Islam sebagai asas PPP. Bahkan untuk memudahkan identifikasi sebagai partai Islam, gambar Ka'bah yang diyakini sebagai kiblat umat Islam diusung sebagai lambang partai. PPP merupakan jelmaan dari empat partai politik Islam peserta pemilu 1971 yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

Ketika awal pemerintahan Soeharto, hubungan pemerintah dan partai politik saat itu berlangsung dengan baik. Namun pada tahun 1973, Soeharto melakukan penciutan jumlah partai yakni partai politik yang berdasarkan Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai dengan garis nasionalis dan Kristen menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), seperti halnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.

Walaupun penyederhanaan partai ini penuh dengan nuansa paksaan, secara internal hubungan antara unsur di dalam tubuh partai penerus estafet perjuangan partai Islam tetap menunjukkan suasana persaudaraan yang solid. Sebagai partai gabungan yang mempunyai massa yang jelas dimasa lalu, pada pemilu pertama setelah penggabungan yakni tahun 1977 berhasil meraup sebanyak 18.745.592 (29,29%) suara sehingga dari 360 kursi di DPR yang diperebutkan, 99 kursi berhasil direbut PPP untuk mendudukkan wakil-wakilnya⁶².

Dalam perjalanannya PPP tidak lepas dari konflik internal yang banyak disebabkan kekecewaan unsur partai yang merasa aspirasinya tidak diakomodasi misalnya antara kubu NU dan non NU. Sehingga berpengaruh pada hasil pemilu pada tahun 1982, dimana perolehan jumlah kursi PPP menurun menjadi 94 kursi

⁶²Kompas, *Partai-Partai Politik : Ideologi dan Program 2004-2009*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004, hal. 89.

di DPR. Kemudian berlanjut pada pemilu 1987 turun menjadi 61 (15 %) kursi di DPR. Selain penurunan perolehan jumlah kursi di DPR, runtuhnya kekuatan PPP juga disebabkan oleh tindakan pemerintahan Orde Baru yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang mewajibkan perubahan lambang partai dan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas kekuatan sosial politik. Pada tahun itu juga PPP langsung mengganti lambangnya dari Ka'bah menjadi Bintang, sekaligus meninggalkan Islam sebagai asasnya.

Di bawah pimpinan Ismail Hasan Metareum (Buya) sebagai Ketua Umum, PPP tampil dengan karakter yang kalem dan sejuk. Bercermin pada pengalaman sebelumnya, berusaha meningkatkan demokratisasi dilingkungan partai dan melanjutkan konsolidasi dalam rangka menyatukan kembali seluruh unsur PPP. Konsolidasi yang dibangun belum mampu mengubah citra partai sebagai partai yang sarat konflik. Kendati demikian dalam pemilu 1992 bisa tampil lebih kompak dibanding pemilu 1987 dan 1982. Dimana PPP bisa meraih 17,07% suara atau 62 (15,5%) kursi di DPR.

Gejolak pertentangan yang muncul sedikit demi sedikit diredam oleh Buya sehingga menimbulkan semangat dan kekompakan di beberapa DPW terus berlanjut sampai pada pemilu tahun 1997, PPP berhasil meraup 22,43% suara dengan demikian 425 kursi di DPR, PPP berhasil menempati 89 kursi⁶³.

Seiring dengan semangat reformasi saat itu, pada tanggal 29 November sampai 2 Desember 1999 PPP melaksanakan Muktamar IV yang dipercepat dari semula. Pelaksanaan Muktamar dalam suasana politik makro yang dinamis akan dimanfaatkan melakukan reaktualisasi diri sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia. Reaktualisasi menyangkut dua hal, pertama PPP kembali ke *kittah*, jati diri ketika partai dideklarasikan sebagai partai politik Islam ditandai dengan kembali ke asas Islam sebagai asas partai. Kedua, PPP kembali menggunakan Ka'bah sebagai tanda gambar partai.

Pada pemilu 1999, terdapat 48 partai yang merupakan hasil seleksi dari 141 partai di Departemen Kehakiman dimana sebanyak 12 partai yang secara tegas menyatakan diri sebagai partai Islam dan lima partai nasionalis dengan

⁶³ *Ibid.*, hal. 95.

nuansa Islam. Melihat komposisi partai-partai Islam tersebut tentunya otoritas PPP sebagai partai pembawa suara umat Islam menjadi goyah dimana basis kultural dalam fusinya membentuk partai masing-masing. Dari unsur NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Solidaritas Umat Nahdliyin Indonesia (Suni) dan Partai Nahdlatul Ummah (PNU), unsur Parmusi muncul Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru dan partai politik Masyumi. Sementara unsur PSII membentuk partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Di luar unsur-unsur tersebut ada Partai Keadilan (PK) dengan basis kelompok intelektual muda dan aktivis Islam kampus sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) bukan partai Islam tetapi menjadikan Muhammadiyah dan organisasi kaum modernis Islam sebagai pendukung utama.

Namun sekalipun suara umat Islam terpecah-pecah ke partai-partai Islam dan partai nasionalis lainnya, berkat kematangan PPP dalam berpolitik maka pada pemilu 1999 berhasil menempatkan diri pada urutan keempat dengan 10,70% perolehan suara dan kursi sebanyak 58 kursi (12,55%) dari 462 kursi di DPR⁶⁴. Keberhasilan lain yang dicapai adalah terpilihnya Ketua Umum PPP Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden mendampingi KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dalam sidang MPR.

Pada Pemilu 2004, meskipun perolehan suara PPP merosot yang hanya meraih sebanyak 9.248.764 (8,15%) suara dari 113.462.414 total suara yang sah tetapi masih menempatkan partainya pada urutan keempat dengan jumlah kursi diperoleh di DPR sebanyak 58 kursi (10,55%) dari 550 jumlah kursi yang diperebutkan⁶⁵.

Bahkan dalam pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2004, PPP mengusung ketua umumnya Hamzah Haz sebagai calon Presiden dan Agum Gumelar sebagai calon Wakil Presiden namun kandas di putaran pertama bersama tiga pasangan calon lainnya yang berada pada urutan terakhir dari lima pasangan calon dalam pengumpulan suara.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 98.

⁶⁵ Diolah dari <http://www.kpu.go.id>, *Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu 2004* oleh KPU pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004.

4.1.2. Partai Demokrat

Latar belakang berdirinya Partai Demokrat tidak terlepas dari kekalahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan wakil presiden pada Sidang Istimewa MPR (Juli 2001) untuk mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri. Kemudian memotivasi beberapa anggota MPR untuk mendirikan sebuah partai sebagai kendaraan politik dalam pemilihan Presiden tahun 2004. Di samping itu masih kurangnya perhatian partai-partai politik yang ada saat itu dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Dengan dimotori oleh 99 orang tokoh yang berasal dari kalangan anggota MPR maupun perguruan tinggi, diantaranya Prof. Dr. Subur Budhisantoso yang kemudian terpilih menjadi ketua umum partai. Pada tanggal 9 September 2002 berdirilah Partai Demokrat sesuai tanggal dan bulan kelahiran Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bukti kedekatan historis antara keduanya dan dideklarasikan pada tanggal 17 Oktober 2002.

Dalam menghadapi Pemilu 2004 yang merupakan pemilu pertama yang akan diikuti, Partai Demokrat terus memperluas jaringan dan cabang partai dengan melakukan pelatihan kepemimpinan dan kampanye bagi para kadernya. Setelah itu para kader kemudian menyebar hingga ketingkat kecamatan dan desa untuk menyampaikan visi dan misi partai.

Hasil yang tidak pernah diprediksi oleh berbagai pihak, di mana partai baru langsung menempati urutan keempat dalam perolehan suara yakni meraih 8.455.225 (7,45%) suara dengan perolehan kursi di DPR sebanyak 57 kursi dari 550 jumlah kursi⁶⁶. Kesuksesan yang paling tinggi diraih partai ini, ketika berhasil mengusung dan memenangkan figur Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden dan Mohammad Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden dalam Pilpres 2004.

4.1.3. Partai Amanat Nasional (PAN)

Pendirian PAN diprakarsai oleh beberapa tokoh gerakan reformasi yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) merupakan organisasi yang ditujukan untuk mewedahi kerjasama berbagai organisasi dan perorangan serta komitmen terhadap gerakan reformasi. Para pendiri MARA pada tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB). Tetapi

⁶⁶ <http://www.kpu.go.id>.

kemudian diubah menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam platform partai bertugas memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Sedangkan prinsip yang dianut adalah nonsektarian dan nondiskriminatif.

Dalam pendeklarasian PAN pada tanggal 23 Agustus 1998, partai berlambang matahari ini disebutkan lahir sebagai bagian dari sebuah ikhtiar besar yaitu usaha membangun sebuah masyarakat madani yang bisa bertahan dari cengkraman birokrasi sipil serta militer. Partai ini melalui proses politik yang demokratis ingin membangun sebuah Indonesia yang terdiri dari individu-individu yang mandiri, organisasi-organisasi rakyat yang kuat dan satuan-satuan administrasi yang otonom.

Kehadiran PAN di Pemilu 1999 turut menentukan jalannya reformasi meskipun hanya meraih 7,4% suara dan menempatkan 34 orang sebagai perwakilan di DPR.⁶⁷ Namun kemampuan PAN dalam menggalang suara melalui “Poros Tengah” yang mencoba menggabungkan suara-suara partai yang berbasis Islam, turut memberi warna dinamika politik nasional. Kepiawaian Poros Tengah telah membawa KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden diawal reformasi dengan mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang merupakan partai pemenang Pemilu 1999 dan mayoritas di legislatif. Walaupun kemudian melalui Sidang Istimewa MPR tahun 2001, KH Abdurrahman Wahid diturunkan dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Dalam memperluas jaringan dan memperbanyak anggota, partai memperkenalkan program Masa Bimbingan Calon Anggota (Mabita). Partai mengklaim program ini telah masuk sampai tingkat desa dan dusun sehingga perluasan jaringan sudah sampai pada tingkat ranting. Kaderisasi melalui Mabita ini harus melalui beberapa level, mulai dari Kader Amanat Dasar ditingkat Kabupaten hingga Kader Amanat Utama di DPP.

Namun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, pada Pemilu 2004 perolehan suara partai ini mengalami penurunan menjadi 6,44% dan di DPR mendapatkan 52 kursi untuk menempatkan wakil-wakilnya⁶⁸. Selain itu

⁶⁷ Kompas, *Op. Cit.*, hal. 229.

⁶⁸ <http://www.kpu.go.id>.

sebagaimana tekatnya untuk menempatkan kadernya sebagai pemimpin bangsa, maka partai ini dalam Pilpres 2004 mengusung nama Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden meskipun hanya sampai pada pemilihan putaran pertama.

4.1.4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pada awal tahun delapan puluhan gerakan-gerakan keislaman yang mengambil masjid-masjid sebagai basis operasional dan strukturnya terutama mesjid kampus mulai muncul. Gerakan dakwah ini merebak dari tahun ketahun mewarnai suasana keislaman di kampus-kampus dan masyarakat umum. Persaudaraan yang dibangun diantara mereka menjadi sebuah alternatif cara hidup ditengah-tengah masyarakat yang cenderung semakin individualistik. Gerakan ini berupaya membangun ruh keislaman melalui media tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi dan pendidikan meskipun pada saat itu aktivitas keagamaan selalu dibatasi oleh pemerintahan Orde Baru.

Kejatuhan Orde Baru di tahun 1998 dirasakan membuka iklim kebebasan semakin luas. Kesempatan ini serasa tidak bisa dilewatkan maka Musyawarah kemudian dilakukan oleh para aktivis dakwah Islam, yang melahirkan kesimpulan perlunya upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang diridloi Allah SWT. Pendirian partai politik yang berorientasi pada Islam perlu dilakukan guna mencapai tujuan dakwah dengan cara-cara demokratis yang bisa diterima banyak orang. Oleh karena itu merekapun sepakat untuk membentuk sebuah partai politik dengan nama Partai Keadilan.

Atas dasar beberapa hal yang melatarbelakangi sejarah berdirinya Partai Keadilan itu, maka dipandang wajar jika para fungsionaris partai ini adalah mereka yang tergolong muda dan kalangan intelektual Islam Kampus. Sehingga pada 20 Juli 1998, Partai Keadilan resmi didirikan dan menjadikan Islam sebagai asas partai. Untuk memimpin partai ini, Nur Mahmudi Ismail terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan dan Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan selanjutnya dideklarasikan pada 9 Agustus 1998.

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama bagi partai ini. Partai Keadilan mendapat 7 kursi DPR, 21 kursi DPRD Tingkat I dan 160 DPRD Tingkat II. Dengan hasil perolehan 1.436.565 suara, Partai Keadilan menduduki peringkat ke

tujuh diantara 48 partai politik peserta Pemilu 1999⁶⁹. Bahkan di Kota Jakarta, partai ini berhasil menduduki peringkat ke lima. Namun hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan *electoral threshold*, sehingga tidak bisa mengikuti Pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang.

Oleh karena itu beberapa aktivis dakwah mendirikan sebuah partai baru yang akan menjadi wadah bagi kelanjutan kiprah politik dakwah warga Partai Keadilan yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 20 April 2002 yang dipimpin oleh Almuzammil Yusuf. Sementara Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden Partai Keadilan menggantikan Nur Mahmudi Ismail yang mengundurkan diri karena menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam kabinet KH Abdurrahman Wahid.

Kemudian dalam Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan pada 17 April 2003, direkomendasikan agar Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Tetapi penggabungan itu baru resmi dilakukan pada tanggal 27 Mei 2003 dengan demikian susunan kepengurusan juga dilakukan perombakan yakni Hidayat Nur Wahid dipilih menjadi presiden partai menggantikan posisi Almuzammil Yusuf.

Dalam rangka menghadapi Pemilu 2004, PKS segera mempersiapkan partainya untuk bisa menjadi peserta pemilu. Dalam verifikasi faktual oleh KPU partai ini lolos di semua provinsi dan juga memenuhi kuota perempuan dalam daftar calon legislatif usulannya, dengan mengusulkan calon legislatif perempuan sebanyak 37,4%. Sedangkan untuk menentukan calon presiden pada Pilpres 2004, PKS akan menentukan kader partai sebagai capres apabila meraih 20% suara dalam pemilu legislatif sebaliknya apabila tidak mencapai itu maka akan melakukan koalisi dengan partai lain atau mengajukan calon presiden dari partai lain.

Hasilnya, pada Pemilu 2004 dalam pemilihan legislatif berhasil menempatkan partainya pada urutan keenam dalam perolehan suara secara nasional yakni meraih 8.325.020 (7,34%) suara dan sehingga dari 550 jumlah kursi yang diperebutkan partai ini memperoleh 45 kursi di DPR.⁷⁰

⁶⁹ Kompas, *Op. Cit.*, hal. 302.

⁷⁰ <http://www.kpu.go.id>.

4.1.5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Lahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak dapat dilepaskan dari konflik yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan menguatnya sosok Megawati Soekarnoputri di panggung politik. PDI lahir pada 10 Januari 1973, sebagai fusi dari lima partai politik pasca Pemilu 1971 yang tergabung dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik dan memilih Mohamad Isnaeni yang saat itu menjabat sebagai Ketua PNI menjadi Ketua Umum PDI.

Sebagai partai hasil penggabungan, PDI dalam perjalanannya tidak luput dari konflik internal terutama di tingkat pimpinan partai, juga karena kebijakan pemerintah pada saat itu yang selalu berusaha "mengkerdulkan" partai politik lain dan mempertahankan kemayoritasan salah satu peserta pemilu tertentu. Terutama ketika munculnya Megawati Soekarnoputri mempersiapkan pencalonannya sebagai Ketua Umum PDI peluncuran buku yang berjudul "*Bendera Sudah Saya Kibarkan*" yang berisi program-program politik dan ekonomi yang akan dicanangkan kelak.

Melihat gelagat munculnya anggota keluarga Soekarno ditubuh PDI, pemerintah menyikapi dengan berbagai cara untuk menjegal terpilihnya Megawati untuk memimpin PDI hingga pada skenario Kongres Medan yang digelar pada tahun 1996 dan menghasilkan penunjukan Soerjadi sebagai Ketua Umum. Puncaknya pada peristiwa "27 Juli" dimana kelompok massa yang menamakan dirinya Pro Kongres Medan dibantu aparat keamanan, merebut secara paksa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat yang mengakibatkan adanya korban tewas, puluhan hilang dan ratusan luka-luka.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap perolehan suara maupun jumlah kursi PDI pada Pemilu 1997. Dibandingkan hasil Pemilu 1992, perolehan suara PDI secara nasional anjlok dari 14,89% dengan 56 kursi menjadi 3,06% suara dengan 11 kursi di DPR⁷¹. Sebaliknya berbagai tekanan rezim yang berkuasa terhadap Megawati tidak membuat partai ini menjadi surut. Bahkan simpati dan dukungan spontan dari lapisan bawah semakin besar. Akhirnya pemerintah mulai mengakui

⁷¹ Kompas, *Op. Cit.*, hal. 360.

keberadaan PDI pimpinan Megawati pada 16 Juli 1997 melalui Mendagri Syarwan Hamid mengizinkan adanya dua PDI.

Dalam perkembangan selanjutnya atas tuntutan situasi dan kondisi politik nasional, maka tanggal 1 Februari 1999 PDI Pro Megawati akhirnya membentuk partai baru yang merupakan kelanjutan tak terpisahkan dari PDI sebelumnya namun nama partai diubah menjadi PDI Perjuangan dan logo kepala banteng dalam segi lima menjadi banteng gemuk dengan mulut berwarna putih dalam lingkaran, sementara platform tidak banyak berubah kecuali lebih konsisten pada nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kerakyatan.

Pada akhirnya perjuangan kelompok Megawati melalui PDI Perjuangan menuai hasil yang tidak pernah dibayangkan. Secara dramatis memenangkan Pemilu 1999 dengan perolehan kursi di DPR sebanyak 153 (34%) suara atau sekitar 36 juta pemilih⁷². Sementara PDI Soerjadi yang saat itu dipimpin oleh Budi Hardjono dinyatakan tidak lolos *electoral threshold*. PDI Perjuangan sadar bahwa sejak tahun 1973 sampai saat ini, kemenangan dalam Pemilu 1999 lebih banyak disebabkan faktor-faktor *unpredicted*. Simpati masyarakat yang tumbuh akibat tekanan penguasa ternyata menyebabkan partai ini menjadi populer. Selain itu, kejenuhan masyarakat dengan sepak terjang rezim orde baru menemukan momentum dalam kepopuleran PDI Perjuangan sebagai partai "wong cilik".

Namun kemudian pada Pemilu 2004 partai ini hanya berhasil meraih sekitar 18,58% suara⁷³ secara nasional turun sekitar 15% dari perolehan suara dalam pemilu sebelumnya. Hal ini juga menyebabkan perolehan jumlah kursi di DPR yang sebelumnya memperoleh 153 kursi turun menjadi 109 kursi dan berada pada urutan kedua setelah Partai Golkar.

Kemudian dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, partai ini mengusung ketua umumnya Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Hasyim Muzadi dari golongan ulamah untuk bertarung dengan empat pasangan calon lainnya tetapi pasangan ini dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Yusuf Kalla pada pemilihan putaran kedua.

⁷² *Ibid.*, hal. 361.

⁷³ <http://www.kpu.go.id>.

4.1.6. Partai Damai Sejahtera (PDS)

Pendirian Partai Damai Sejahtera (PDS) yang bercorak Kristen ini dilatarbelakangi oleh kesadaran umat kristiani bahwa selama ini telah melakukan kekeliruan dalam menyalurkan aspirasi politiknya melalui peran para tokoh politik Kristen pada partai politik yang bercorak kebangsaan. Partai politik tersebut dipandang bahwa selama ini hanya memposisikan elit Kristen layaknya "penumpang" yang selalu menuruti apa yang menjadi kebijakan partai yang kenyataannya terikat dalam etika politik yang berlaku dalam partai tersebut.

Partai ini melihat aspirasi dan kepentingan golongan minoritas, khususnya Kristen tidak tersalurkan. Bahkan partai politik yang menyatakan diri sebagai partai kebangsaan justru tidak memberikan reaksi yang diharapkan, berupa perjuangan atau usaha atas penekanan dan diskriminasi yang dialami kelompok minoritas baik perjuangan melalui lembaga politik masing-masing maupun lembaga legislatif meskipun sebagai partai mayoritas.

Partai ini melihat bahwa sejak tahun 1969 kehidupan umat Kristen memasuki masa awal dari malapetaka, terkait dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/mdn/mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Daerah Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh pemeluk-pemeluknya, maka kebebasan beribadah dan pendirian rumah ibadah mulai terpasung. Juga dalam berbagai aspek misalnya semakin sulitnya kalangan minoritas menjadi pegawai negeri, menduduki jabatan struktural tertentu, semakin sulitnya mendirikan sarana pendidikan, kesehatan hingga pengangkatan guru-guru agama Kristen di sekolah-sekolah negeri.

Di sisi lain, para pendiri partai ini juga merasa gelisah melihat perilaku bangsa ini yang dianggap mengalami dekadensi moral, misalnya tidak tampak lagi adanya rasa malu untuk mempertontonkan harta dan kekayaan dari hasil korupsi. Perbuatan korupsi malah sudah dipelintir dengan istilah "berbagai keuntungan dengan orang lain". Hukum di negeri ini dianggap sudah menjadi wilayah transaksi komersial sehingga masyarakat menjadi jenuh, skeptis dan pesimistis.

Melihat betapa peliknya persoalan yang dihadapi, PDS merasa terpanggil mengatasi persoalan tersebut. Para pendiri partai ini berkeyakinan bahwa bangsa ini masih bisa diselamatkan, dalam pengertian masih bisa dipulihkan menjadi

bangsa yang besar asalkan ada orang-orang yang berkomitmen untuk melakukan perubahan secara serius.

Dalam menjalankan misi partai ini terdapat empat pilar yang menjadi dasar perjuangan yakni Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan lingkungan/alam. Kemudian dari sisi visi, PDS berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, damai sejahtera berdasarkan Pancasila. Hal ini akan terwujud apabila adanya kesempatan yang sama bagi semua golongan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam kedudukan, jabatan-jabatan publik berdasarkan kemampuan dan keahlian bukan berdasarkan golongan atau *like* dan *dislike*.

Sebagai partai pendatang baru dan dengan hanya mengandalkan dukungan golongan Kristiani, maka dalam Pemilu 2004 partai ini berhasil meraih hanya 2,13% suara dan menduduki posisi kesepuluh perolehan suara secara nasional. Sedangkan perolehan kursi di DPR partai ini berhasil memperoleh 12 kursi legislatif.⁷⁴

4.1.7. Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golkar adalah jelmaan dari Golongan Karya (Golkar) di era pemerintahan Presiden Soeharto yang juga kelanjutan dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didirikan pada 20 Oktober 1961. Pembentukan Sekber Golkar merupakan inisiatif dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959 untuk mengangkat 200 wakil-wakil golongan karya yang tidak berafiliasi pada partai politik di MPRS. Kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1964 yang mengakui wakil-wakil golongan karya di Front Nasional. Sementara Front Nasional sendiri bertujuan untuk menghadapi tekanan-tekanan dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sekber Golkar awalnya beranggotakan 61 organisasi fungsional hingga kemudian bertambah menjadi 291 organisasi. Organisasi-organisasi tersebut kemudian dikelompokkan dalam tujuh kelompok induk organisasi (Kino) yaitu :

⁷⁴ <http://www.kpu.go.id>.

Kosgoro, SOKSI, MKGR, Profesi, Ormas Hankam, Gakari dan Gerakan Pembangunan.

Sejak terbentuk Golkar selalu unggul dalam perolehan suara sehingga membuat Golkar selalu menguasai legislatif dan eksekutif di Indonesia selama 30-an tahun. Pada tahun 1971, pemilu pertama kali bagi Golkar langsung meraih suara pemilih terbanyak (62,79%). Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dan ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, maka pada tanggal 17 Juli 1971 Musyawarah Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar dan kemudian dikukuhkan secara resmi pada Munas Golkar, tanggal 4-5 September 1973 di Surabaya.

Berawal dari itu, Golkar selalu tampil sebagai pemenang pemilu dan menjadi partai penguasa (*the rulling party*). Selanjutnya secara berturut-turut pada Pemilu 1977 meraih 62,1%, Pemilu 1982 meraih 63,9%, Pemilu 1987 meraih 73,1% dan Pemilu 1992 meraih 68,1%. Prestasi suara paling tinggi diperoleh pada pemilu 1997 dengan perolehan 74,5% suara⁷⁵. Bahkan pada Pemilu 1999, perolehan suara Golkar di beberapa provinsi di luar Jawa mencapai lebih dari 90% namun secara nasional berada pada urutan kedua setelah PDI Perjuangan dengan total perolehan suara 35,7 juta suara (22,5%) dan menempatkan 120 wakilnya di DPR bahkan berhasil menempatkan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR.

Dari sisi kepemimpinan, Golkar semenjak kelahirannya selalu dipimpin oleh kalangan militer yakni mulai tahun 1964 sampai 1993 sebanyak lima kali pergantian pimpinan yang berasal dari kalangan militer dan kemudian tahun 1993, Harmoko tokoh sipil yang pertama terpilih sebagai Ketua Umum DPP Golkar.

Namun ketika krisis ekonomi mulai terjadi tahun 1997 dan kemudian diikuti dengan gerakan reformasi oleh mahasiswa, hingga mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden RI tahun 1998, ternyata membawa implikasi yang serius bagi perkembangan Golkar. Melihat kondisi kehidupan politik Indonesia saat itu, maka timbul desakan dari internal Golkar untuk melakukan reformasi dan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Selain itu juga meminta Harmoko untuk mundur dari jabatannya karena harus bertanggung jawab atas

⁷⁵ Kompas, *Op. Cit.*, hal. 389.

kejatuhan Soeharto, sebagai Ketua DPR/MPR dan Ketua Umum DPP Golkar dinilai tidak tanggap terhadap aspirasi rakyat.

Akhirnya tanggal 9-11 Juli 1998, Golkar menyelenggarakan Munaslub dengan memilih Akbar Tandjung untuk menggantikan Harmoko dan sejumlah keputusan mendasar sebagai manifestasi perbaharuan misalnya dirumuskannya paradigma baru dengan visi, misi dan platform perjuangan baru pula. Golkar berusaha untuk mengembangkan orientasi baru yang berkomitmen pada semangat reformasi yang berintikan keadilan, demokratisasi dan transparansi. Golkar ingin tampil mandiri dan demokratis dalam pengambilan keputusan dengan menghapus mekanisme tiga jalur yang dikenal dengan istilah ABG (ABRI, Birokrat dan Golkar). Selain itu, dalam mempersiapkan Pemilu 1999 maka Golkar juga mengubah dirinya menjadi partai politik. Deklarasi Partai Golkar kemudian dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1999 dengan slogan partai : "Golkar Baru".

Dengan adanya perubahan tersebut, tidak berarti bahwa perjalanan Partai Golkar akan berjalan mulus namun banyak mendapat tekanan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Mulai dari demonstrasi masyarakat yang menginginkan pembubaran Golkar, gugatan sebelas partai politik peserta Pemilu 1999 terhadap partai ini karena diduga melakukan kecurangan dalam Pemilu dengan menggunakan dana yang melebihi ketentuan. Kemudian kasus yang menimpa ketua umum Golkar Akbar Tandjung mengenai penyelewengan dana nonbudjeter Bulog yang terjadi di era pemerintahan Presiden BJ. Habibie menempatkan Akbar Tandjung sebagai tersangka.

Kasus ini ternyata tidak menyurutkan Golkar untuk bersaing di Pemilu 2004, sosialisasi gencar dilaksanakan misalnya menyelenggarakan konvensi bakal calon presiden melalui proses pemilihan dari tingkat bawah. Konvensi ini memunculkan tujuh tokoh yakni Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Wiranto, Akbar Tandjung, Yusuf Kalla, Prabowo Subianto, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kemudian Golkar akhirnya memilih Wiranto sebagai calon presiden dipasangkan dengan Salahuddin Wahid sebagai calon wakil presiden.

Dalam Pemilu 2004 Golkar kembali mengulang masa sebagai partai pemenang pemilu, setelah turun menjadi urutan kedua pada Pemilu 1999 di bawah PDI Perjuangan kini berhasil meraih 21,58% suara dan memperoleh 128 kursi di

DPR⁷⁶. Namun dalam dalam Pilpres 2004, partai pendukung pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid sebagai Capres dan Cawapres kandas pada pemilihan putaran pertama dimana hanya meraih 26.286.788 suara.⁷⁷ Sedangkan M. Yusuf Kalla yang merupakan salah satu kadernya, berhasil menjadi Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden yang diusung oleh Partai Demokrat.

4.2. Gambaran Umum Wilayah DKI Jakarta

Sebagai Ibukota Republik Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan wilayah DKI Jakarta yang menjadi pusat kegiatan pemerintah dan sosial ekonomi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Tuntutan sebagai pusat aktivitas kota dan ekonomi mengakibatkan dinamika perkembangan wilayah DKI menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dielakkan.

Seperti halnya kota besar di Indonesia, tingkat urbanisasi yang tinggi sebagai akibat dari daya tarik ibukota sebagai penyedia kesempatan kerja menyebabkan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta menjadi sukar dikendalikan, selain tingkat kelahiran yang cukup tinggi dan panjang usia penduduk yang semakin bertambah sejalan dengan peningkatan kesehatan penduduk. Disamping itu, aktivitas di daerah pusat kota yang sulit sekali dipisahkan dari kegiatan di daerah sekelilingnya yaitu Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Kota Jakarta dengan ketinggian rata-rata tujuh meter di atas permukaan laut terletak pada 106°, 49', 35" Bujur Timur dan 5°, 10', 37" Lintang Selatan. Luas wilayah daratan adalah 664,12 Km², dengan tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu.

Sebagai kota metropolitan, penduduk Kota Jakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan luas 650 km², jumlah penduduk di Kota Jakarta mencapai 9 juta jiwa pada malam hari dan 11 juta jiwa pada siang hari. Kepadatan penduduk pada beberapa bagian kota sangat tinggi kepadatan tertinggi adalah Jakarta Pusat yaitu 18.53 jiwa/km². Faktor utama yang menyebabkan tingginya kepadatan penduduk Kota Jakarta adalah migrasi masuk. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pendatang baru yang tercatat masuk pada masa hari raya rata-rata

⁷⁶ <http://www.kpu.go.id>.

⁷⁷ KPU, *Pemilu Presiden 2004: Memilih Langsung*. Jakarta, 2005, hal. 107.

230.000 jiwa setiap tahun, sebagian besar berasal dari, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau dan Banten.

Jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2004 tercatat sebanyak 7. 471.866 jiwa dimana jumlah penduduk terbesar pada Kotamadya Jakarta Timur sedangkan tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kotamadya Jakarta Pusat. Dengan luas wilayah 661,52 km² dan jumlah penduduk tersebut Propinsi DKI Jakarta merupakan propinsi yang terpadat di Indonesia. Pertumbuhan Penduduk Jakarta secara keseluruhan mengalami penurunan, akan tetapi jumlah pendatang tetap cenderung besar sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang terlanjur banyak dan padat.

Untuk lebih jelasnya tingkat kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta menurut kotamadya/kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kotamadya/Kabupaten

Kotamadya/ Kabupaten	Luas/Area (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Jakarta Pusat	48,20	893.195	18.531
Jakarta Barat	126,15	1.565.708	12.411
Jakarta Timur	187,75	2.103.525	11.204
Jakarta Selatan	145,73	1.707.093	11.714
Jakarta Utara	141,88	1.182.749	8.336
Kepulauan Seribu	11,81	19.596	1.659
Jumlah	661,52	7. 471.866	11.295

Sumber : BPS Propinsi DKI Jakarta (2004).

Menurut sensus penduduk tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk Propinsi DKI Jakarta dari kurun waktu 1980/1990 mengalami kenaikan secara total sebesar 2.42% tetapi pada dekade berikutnya 1990/2000 mengalami penurunan sebesar 0.34 %. Laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak berarti semua kota yang ada di propinsi ini mengalami penurunan seperti Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat, ketiga wilayah yang lain masih mengalami kenaikan.

4.3. Peta Politik di DKI Jakarta Pasca Reformasi

Pada Pemilu 1999 PDI Perjuangan menguasai 39,4% suara. PPP berada pada urutan kedua 17,2% sementara Golkar 10,3%. Hasil pemilu ini membalikkan perolehan masing-masing partai pada pemilu sebelumnya yakni pada Pemilu 1997 dimana Golkar menguasai sekitar 65,3% suara. Sementara PDI berada diposisi terakhir dengan perolehan 1,8% dibawah PPP yang memperoleh 32,9% suara.

Dalam pemilu 1999 perolehan suara di lima wilayah kota di DKI Jakarta dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Begitu pula pada tingkat kecamatan, seluruh kecamatan didominasi oleh PDI Perjuangan kecuali Kecamatan Kepulauan Seribu yang dikuasai Golkar dan Kecamatan Pancoran dikuasai oleh PPP. Dilihat dari karakteristik etnis yang ada di dua wilayah kecamatan itu mayoritas etnis Betawi, masing-masing 80,7% di Kepulauan Seribu dan 39,0% di Pancoran.

Perolehan suara partai-partai politik baru tidak terlalu besar dari jumlah suara yang ada, partai-partai ini hanya memperebutkan 33,1% sisa suara di luar tiga partai lama. Kecuali PAN berada di posisi ketiga memperoleh 16,8% suara mengungguli perolehan suara Golkar. Sementara PK memperoleh 4,9% suara yang menempatkan pada posisi kelima dalam perolehan suara tingkat provinsi DKI Jakarta.

Adapun persentase hasil perolehan suara menurut Kotamadya dan perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta masing-masing partai peserta pemilu 1999 dapat dilihat pada berikut :

Tabel 4.2. Persentase Perolehan Suara Pemilu 1999 Menurut Kotamadya

Kotamadya	PDIP	PPP	PAN	GOLKAR	PK
Jakarta Barat	47,9	16,0	12,4	8,6	3,5
Jakarta Pusat	39,5	15,9	19,0	9,2	5,3
Jakarta Selatan	32,5	21,3	20,5	9,9	5,4
Jakarta Timur	33,5	18,6	18,8	12,1	5,8
Jakarta Utara*	48,0	11,2	12,3	11,0	4,1

Sumber : Informasi Pemilu 2004 oleh KPU

*) termasuk Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta dimekarkan pada tahun 1999 semula lima kota menjadi lima kota dan satu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pada Pemilu Tahun 1999 kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam perolehan suara mendominasi seluruh kotamadya di Jakarta. Kemenangan ini merupakan kemenangan yang pertama selama penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik sejak Orde Lama maupun pada rezim Orde Baru. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah merasa jenuh dengan kesulitan-kesulitan hidup kemudian diperparah dengan situasi demokrasi yang tidak sehat. Disamping itu masyarakat menaruh simpati yang dalam pada PDIP maupun Megawati Soekarnoputri yang selama ini mendapat perlakuan yang kurang adil.

Adapun hasil perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu tahun 1999, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Perolehan Kursi DPRD DKI Jakarta Pada Pemilu 1999

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi	Persentase
1.	PPP	13	15,29
2.	PDIP	30	35,29
3.	PAN	13	15,29
4.	PBB	2	2,35
5.	PK	4	4,71
6.	GOLKAR	8	9,41
7.	Lainnya*	15	17,63
Jumlah		85	100,00

Sumber : Informasi Pemilu 1999 oleh KPU

*) TNI-Polri 9 kursi, PKB 3 kursi, PKP dan PBTI masing-masing satu kursi.

Dengan kemenangan dalam perolehan suara, maka akan menambah pula perolehan kursi di legislatif. Hal ini terlihat pada tabel di atas bahwa perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI pada Pemilu 1999 mendapatkan 30 kursi atau 35,29% dari 85 kursi yang diperebutkan. Kemudian disusul oleh PPP dan PAN yang memperoleh masing-masing 13 atau 15,29% kursi.

Sedangkan dalam Pemilu 2004, persentase perolehan suara dan perolehan kursi partai-partai di DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4. Persentase Hasil Perolehan Suara dan Kursi pada Pemilu 2004

No.	Partai Politik	Perolehan Suara (%)	DPRD		DPR RI	
			Kursi	%	Kursi	%
1.	PKS	24,00	18	24,00	5	23,81
2.	PD	21,33	16	21,33	5	23,81
3.	PDIP	13,33	10	13,33	3	14,30
4.	PG	9,33	7	9,33	2	9,52
5.	PPP	9,33	7	9,33	2	9,52
6.	PAN	8,00	7	9,33	2	9,52
7.	PDS	5,33	4	5,33	2	9,52
8.	Lainnya*	9,35	6	8,02	-	-
Jumlah		100,00	75	100,00	21	100,00

Sumber : Diolah dari <http://www.Tempointeraktif.com> tanggal 17 April 2004.

*) 6 kursi di DPRD terdiri dari 2 kursi diperoleh Partai Bintang Reformasi (PBR) dan 4 kursi bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa PKS (kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang pada Pemilu 1999 dinyatakan tidak lolos *Electoral Treshold*) menang hampir seluruh wilayah Jakarta dengan perolehan 24% suara dan 18 kursi di DPRD DKI Jakarta. Pada urutan kedua diraih oleh Partai Demokrat sebagai partai pendatang baru dalam pemilu yang berhasil meraih 21,33% suara di Wilayah Jakarta. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pemenang pemilu tahun 1999 baik secara nasional maupun di Wilayah Jakarta turun menjadi urutan ketiga dengan perolehan suara 13,33%. Sementara Partai Golkar, PPP, PAN dan PDS masing-masing memperoleh suara dibawah 10%.

4.4. Deskripsi Data Responden

Pada bab terdahulu telah dijelaskan bahwa populasi adalah seluruh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah dari tujuh partai politik di Jakarta yang sebanyak 220 orang dan sampel ditarik sebesar 70 orang secara proporsional dari masing-masing partai politik tersebut. Adapun deskripsi data responden adalah sebagai berikut :

a) Data Responden Berdasarkan Umur (Usia)

Tabel 4.5. Data Responden Berdasarkan Umur

		Umur			Total
		<= 30 tahun	31 <= 45 tahun	>= 46 tahun	
Partai Golkar	Count	1	2	9	12
	% within Partai	8.3%	16.7%	75.0%	100.0%
PAN	Count	0	12	2	14
	% within Partai	.0%	85.7%	14.3%	100.0%
PD	Count	0	8	5	13
	% within Partai	.0%	61.5%	38.5%	100.0%
PDIP	Count	0	4	2	6
	% within Partai	.0%	66.7%	33.3%	100.0%
PDS	Count	2	4	2	8
	% within Partai	25.0%	50.0%	25.0%	100.0%
PKS	Count	0	10	0	10
	% within Partai	.0%	100.0%	.0%	100.0%
PPP	Count	0	3	4	7
	% within Partai	.0%	42.9%	57.1%	100.0%
Total	Count	3	43	24	70
	% within Partai	4.3%	61.4%	34.3%	100.0%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berusia antara 31 tahun sampai dengan 45 tahun yakni dari total responden terdapat 43 (61,4%) dan 24 (34,3%) yang berusia lebih dari 46 tahun, hal ini dapat dikatakan bahwa pada umumnya responden telah memiliki kemampuan atau kematangan personal dalam berpikir maupun mengambil suatu keputusan khususnya dalam menentukan calon kepala daerah karena kemampuan itu sangat dipengaruhi oleh usia seseorang.

b. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.6. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Crosstab

			Gender		Total
			Perempuan	Laki-laki	
Partai	Golkar	Count	3	9	12
		% within Partai	25.0%	75.0%	100.0%
	PAN	Count	3	11	14
		% within Partai	21.4%	78.6%	100.0%
	PD	Count	1	12	13
		% within Partai	7.7%	92.3%	100.0%
	PDIP	Count	2	4	6
		% within Partai	33.3%	66.7%	100.0%
	PDS	Count	4	4	8
		% within Partai	50.0%	50.0%	100.0%
	PKS	Count	0	10	10
		% within Partai	.0%	100.0%	100.0%
	PPP	Count	1	6	7
		% within Partai	14.3%	85.7%	100.0%
Total		Count	14	56	70
		% within Partai	20.0%	80.0%	100.0%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden terdiri dari 56 responden (80,0%) laki-laki dan 14 responden (20,0%) perempuan. Ketidakseimbangan responden laki-laki dan perempuan dalam penelitian hanya kebetulan saja dan tidak berpengaruh karena hampir setiap partai terdapat responden yang mewakili kalangan perempuan meskipun seperti pada Partai Keadilan Sejahtera tidak ada responden yang perempuan.

c) Data Responden berdasarkan Agama

Tabel 4.7. Data Responden Berdasarkan Agama

Crosstab

			Agama			Total
			Islam	Kristen	Katholik	
Partai	Golkar	Count	10	0	2	12
		% within Partai	83.3%	.0%	16.7%	100.0%
	PAN	Count	14	0	0	14
		% within Partai	100.0%	.0%	.0%	100.0%
	PD	Count	13	0	0	13
		% within Partai	100.0%	.0%	.0%	100.0%
	PDIP	Count	4	2	0	6
		% within Partai	66.7%	33.3%	.0%	100.0%
	PDS	Count	0	4	4	8
		% within Partai	.0%	50.0%	50.0%	100.0%
	PKS	Count	10	0	0	10
		% within Partai	100.0%	.0%	.0%	100.0%
	PPP	Count	7	0	0	7
		% within Partai	100.0%	.0%	.0%	100.0%
Total		Count	58	6	6	70
		% within Partai	82.9%	8.6%	8.6%	100.0%

Melihat tabel di atas terlihat bahwa reponden yang ditarik dalam penelitian ini terdiri atas 56 (82,95%) responden yang beragama Islam, yang beragama Kristen dan Katholik masing-masing terdapat 6 (8,6%) responden sedangkan agama lain tidak ada atau nihil.

d) Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.8. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Crosstab

			Pendidikan				Total
			SLTA	D-3	S-1	S-2	
Partai Golkar	Count		8	1	3	0	12
	% within Partai		66.7%	8.3%	25.0%	.0%	100.0%
PAN	Count		0	0	10	4	14
	% within Partai		.0%	.0%	71.4%	28.6%	100.0%
PD	Count		3	0	8	2	13
	% within Partai		23.1%	.0%	61.5%	15.4%	100.0%
PDIP	Count		1	1	1	3	6
	% within Partai		16.7%	16.7%	16.7%	50.0%	100.0%
PDS	Count		0	1	5	2	8
	% within Partai		.0%	12.5%	62.5%	25.0%	100.0%
PKS	Count		0	1	8	1	10
	% within Partai		.0%	10.0%	80.0%	10.0%	100.0%
PPP	Count		2	0	3	2	7
	% within Partai		28.6%	.0%	42.9%	28.6%	100.0%
Total	Count		14	4	38	14	70
	% within Partai		20.0%	5.7%	54.3%	20.0%	100.0%

Berdasarkan tabel data responden berdasarkan pendidikan di atas, secara umum responden memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dimana terdapat 38 (54,3%) responden memiliki pendidikan S-1 dan 14 orang (20,0%) yang memiliki S-2 dari total responden. Apabila diteliti lebih jauh dari responden yang memiliki pendidikan S-1, terdapat 10 responden dari PAN kemudian disusul PD dan PKS masing-masing sebesar 8 responden.

Dalam hubungan ini meskipun tingkat pendidikan seseorang bukanlah faktor satu-satunya yang menentukan tingkat kemampuan pemahaman dan daya kritis seseorang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan dapat membentuk kerangka berpikir dan daya analisis dalam setiap pengambilan keputusan yakni dalam menentukan calon seorang kepala daerah.

e) Data Responden Berdasarkan Masa Keanggotaan di Partai

Tabel 4.9. Data Responden Berdasarkan Masa Keanggotaan

Crosstab

		Keanggotaan			Total
		<= 5 tahun	6 <= 10 tahun	>= 11 Tahun	
Partai	Golkar	Count 2	1	9	12
		% within Partai 16.7%	8.3%	75.0%	100.0%
PAN	Count	4	10	0	14
		% within Partai 28.6%	71.4%	.0%	100.0%
PD	Count	9	4	0	13
		% within Partai 69.2%	30.8%	.0%	100.0%
PDIP	Count	0	3	3	6
		% within Partai .0%	50.0%	50.0%	100.0%
PDS	Count	6	2	0	8
		% within Partai 75.0%	25.0%	.0%	100.0%
PKS	Count	0	10	0	10
		% within Partai .0%	100.0%	.0%	100.0%
PPP	Count	0	0	7	7
		% within Partai .0%	.0%	100.0%	100.0%
Total	Count	21	30	19	70
		% within Partai 30.0%	42.9%	27.1%	100.0%

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa rata-rata masa keanggotaan responden menjadi anggota partai antara 6 sampai 10 tahun (42%) kemudian kurang dari tahun (30%) dan lebih dari 10 tahun (27,1%). Hal ini disebabkan karena beberapa partai politik baru terbentuk atau didirikan setelah masa reformasi dimana kondisi kehidupan politik telah memungkinkan terbukanya kebebasan berserikat dalam bentuk partai. Apabila melihat lebih jauh bahwa responden yang mempunyai masa keanggotaan partai lebih dari 10 tahun hanya terdapat pada partai politik lama yakni Partai Golkar, PPP dan PDIP.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Model Rekrutmen Dalam Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah

Model rekrutmen dalam teori politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Gabriel Almond bahwa rekrutmen dapat dibedakan dalam dua model yakni model tertutup dan model terbuka. Model tertutup cenderung diterapkan dalam kehidupan politik yang masih tradisional dimana lebih banyak ditentukan oleh elit-elit partai, tertutup bagi partisipasi masyarakat dan lebih didasarkan pada status sosial yang dimiliki. Sedangkan model terbuka, banyak diterapkan pada kehidupan politik yang sudah maju atau negara demokratis yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen, transparansi, didasarkan pada kualitas calon yang terlihat pada pendidikan dan pengalaman yang dimiliki serta terjadinya sirkulasi kepemimpinan.

Untuk menganalisis model pelaksanaan rekrutmen yang dilaksanakan dalam menentukan calon kepala daerah di DKI Jakarta, maka dapat dilihat dari tingkat persepsi responden terhadap indikator-indikator yang terkandung dalam variabel rekrutmen.

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan total skor dari masing-masing responden dalam menilai kedua model tadi sebagaimana yang terkandung pada instrumen-instrumen penelitian, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai model yang lebih dominan diterapkan. Persepsi responden tersebut ditunjukkan dalam lima skala sesuai dengan skala Likert yang dipergunakan dalam kuisioner, yakni “sangat tidak setuju”, “tidak setuju”, “ragu-ragu (netral)”, “setuju” dan “sangat setuju”, dengan menetapkan interval sebagaimana rumus berikut :

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Maksimal} - \text{Total Skor Minimal}}{\text{Jumlah Skala Persepsi}}$$

Dalam mengukur persepsi responden terhadap rekrutmen tertutup terdapat 17 item pertanyaan sehingga total skor minimal adalah 17 (jika responden menjawab “sangat tidak setuju” pada seluruh item) dan total skor maksimal adalah 85 (jika responden menjawab “sangat setuju” pada seluruh item).

Untuk melihat tingkatan persepsi responden pada rekrutmen tertutup, maka sebelumnya ditentukan interval skor dengan menghitung rentang (range) kemudian dibagi dengan banyaknya kategori atau skala persepsi dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{85 - 17}{5} \\ &= 13,6 \text{ dibulatkan menjadi } 14 \end{aligned}$$

Sehingga kategori persepsi responden dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Total skor antara 17 – 30 = Sangat Tidak Setuju
- b. Total skor antara 31 – 44 = Tidak Setuju
- c. Total skor antara 45 – 58 = Ragu-ragu (Netral)
- d. Total skor antara 59 – 72 = Setuju
- e. Total skor antara 72 – 85 = Sangat Setuju

Sedangkan untuk mengukur persepsi responden terhadap rekrutmen terbuka terdapat 15 item pertanyaan sehingga total skor minimal adalah 15 (jika responden menjawab “sangat tidak setuju” pada seluruh item) dan total skor maksimal adalah 75 (jika responden menjawab “sangat setuju” pada seluruh item).

Untuk melihat kategori persepsi responden pada rekrutmen terbuka, maka sebelumnya ditentukan interval skor dengan menghitung rentang (range) kemudian dibagi dengan banyaknya kategori atau skala persepsi dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{75 - 15}{5} \\ &= 12 \end{aligned}$$

Sehingga skala kategori atau tingkatan persepsi responden dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Total skor antara 15 – 26 = Sangat Tidak Setuju
- b. Total skor antara 27 – 38 = Tidak Setuju
- c. Total skor antara 39 – 50 = Ragu-ragu (Netral)
- d. Total skor antara 51 – 62 = Setuju
- e. Total skor antara 63 – 75 = Sangat Setuju

Dari hasil rekapitulasi jawaban responden dari seluruh item pertanyaan dalam menilai model rekrutmen tertutup (Lampiran 3a), maka diperoleh gambaran persepsi responden sebagaimana terlihat pada kedua tabel berikut :

Tabel 5.1. Frekuensi Rekrutmen Tertutup

		Rekrutmen Tertutup			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1.4	1.4	1.4
	Ragu-Ragu (Netral)	43	61.4	61.4	62.9
	Setuju	25	35.7	35.7	98.6
	Sangat Setuju	1	1.4	1.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel frekuensi rekrutmen tertutup di atas, menunjukkan bahwa terdapat 43 (61,4%) dari responden memberikan persepsi ragu-ragu (netral), setuju sebanyak 25 (35,7%) responden, sangat tidak setuju dan sangat setuju masing-masing 1 (1,4%). Hal ini berarti bahwa partai dalam penerapan model rekrutmen tertutup menunjukkan posisi yang netral dengan kata lain tidak seluruhnya menolak atau menerima model tertutup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya responden masih mempertimbangkan aspek latar belakang suku atau etnis dari seorang calon. Misalnya calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera yakni Adang Daradjatun yang berasal dari Etnis Sunda yang juga sebagai pimpinan organisasi masyarakat Sunda (Simpay Wargi Urang) merupakan penduduk kedua terbanyak di Jakarta dan Danny Anwar yang merupakan putra daerah asli Jakarta yakni Suku Betawi. Sedangkan dari koalisi partai menetapkan Fauzi Bowo yang merupakan asli Betawi dan termasuk salah satu tokoh organisasi masyarakat Betawi (Forum Betawi Rempuk) sebagai calon gubernur dan Prijanto yang berlatarbelakang etnis mayoritas di Jakarta yakni Suku Jawa sebagai wakil

gubernur. Hal ini terjadi karena hampir setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah seringkali kontestan maupun partai yang mendukung masih mengangkat isu putra daerah atau suku mayoritas untuk menarik dukungan pemilih sebesar-besarnya. Di samping itu, aspek lain yang dipertimbangkan oleh partai dalam menentukan calon yakni berasal dari keturunan tokoh yang berpengaruh atau memiliki status sosial (seperti raja, sultan, ulama terkemuka, pahlawan daerah dan sebagainya) yang dimiliki oleh seorang calon.

Sedangkan hasil rekapitulasi jawaban responden dari seluruh item pertanyaan dalam menilai model rekrutmen terbuka (Lampiran 3b), maka diperoleh gambaran tingkat persepsi responden sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.2. Frekuensi Rekrutmen Terbuka

		Rekrutmen Terbuka			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu (Netral)	4	5.7	5.7	5.7
	Setuju	47	67.1	67.1	72.9
	Sangat Setuju	19	27.1	27.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel frekuensi rekrutmen terbuka di atas, menunjukkan bahwa terdapat 47 (67,1%) dari responden memberikan persepsi setuju, penilaian sangat setuju sebanyak 19 (27,1%) responden dan Ragu-ragu (netral) sebanyak 4 (5,7%) sedangkan tidak ada yang menunjukkan persepsi tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hal ini menggambarkan bahwa partai dalam penyelenggaraan proses rekrutmen cenderung terbuka dimana pada umumnya partai politik menyelenggarakan mekanisme konvensi dengan melibatkan seluruh unsur partai dalam seleksi bakal calon walaupun pada akhirnya nama calon yang terpilih harus mendapat "restu" dari pimpinan pusat partai.

Kemudian dari kompetisi telah membuka peluang bagi calon dari luar partai untuk diseleksi dimana sumber calon yang diseleksi tidak hanya berasal dari kader partai. Beberapa nama yang pernah masuk nominasi berasal dari kalangan birokrat (PNS), militer, kepolisian dan pengusaha seperti Mayjen Purn Agum Gumelar, Sarwono Kusumaatmadja, Ben Benyamin, Abdul Radjak,

Mayjen Purn Djasri Marin dan Mayjen Purn Slamet Kirbiantoro bahkan Rano Karno yang berasal dari kalangan artis dan beberapa nama lain yang turut meramaikan bursa calon Kepala Daerah (Gubernur) DKI Jakarta.

Selain perbandingan melalui tabel frekuensi persepsi responden terhadap kedua model rekrutmen tersebut di atas, dapat juga dilihat pada rata-rata skor total responden dalam menjawab item pertanyaan dalam mengukur model rekrutmen.

Adapun gambaran atau deskripsi jawaban responden dalam menjawab kedua model rekrutmen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3. Deskripsi Rekrutmen Tertutup dan Rekrutmen Terbuka

Descriptive Statistics								
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Rekrutmen Tertutup	70	28	42	70	3911	55.87	6.043	36.519
Rekrutmen Terbuka	70	27	48	75	4129	58.99	6.194	38.362
Valid N (listwise)	70							

Berdasarkan tabel dekriptif di atas nampak bahwa rata-rata skor total dari keseluruhan responden dalam menilai model rekrutmen tertutup sebesar 55,87 sedangkan rata-rata penilaian model rekrutmen terbuka sebesar 58,99. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata penilaian model rekrutmen terbuka lebih besar daripada model rekrutmen tertutup.

Namun untuk lebih jauh menganalisis perbedaan tersebut, penulis menggunakan uji beda (selisih) rata-rata yang sering disebut dengan uji Z atau uji T. Dengan menghitung dari rata-rata dan standar deviasi kedua kelompok yang dibandingkan. Dengan menggunakan Software SPSS, untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok data sampel dilakukan dengan uji beda T-Paired. Hasil uji beda dari kedua rata-rata, terlihat pada nilai t dan *Sig.(2-tailed)* dengan ketentuan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau nilai *p-value* pada kolom *Sig.(2-tailed)* $> level\ of\ significant$ (alpha). Sedangkan H_0 ditolak dan H_a diterima jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau nilai *p-value* pada kolom *Sig.(2-tailed)* $< level\ of\ significant$ (alpha).

Dari hasil analisis perbedaan rata-rata persepsi responden terhadap rekrutmen tertutup dan rekrutmen terbuka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4. Uji Beda Rekrutmen Tertutup dan Rekrutmen Terbuka

		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	Rekrutmen Tertutup Rekrutmen Terbuka	-3.114	2.545	.304	-3.721	-2.507	-10.236	69	.000

Dari tabel hasil uji beda rata-rata di atas, menunjukkan bahwa t-hitung sama dengan -10,236 dan nilai 0,000 pada kolom *Sig.(2-tailed)*. Dengan menggunakan tingkat kesalahan 5% dan derajat kebebasan (df) = 69 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel dependen) dengan t-tabel = 2,000. Karena t-hitung (-10,236) > t-tabel (2,000) dan nilai signifikan (0,000) < 0,05, dapat disimpulkan bahwa “ada perbedaan yang signifikan antara persepsi responden antara rekrutmen tertutup dan rekrutmen terbuka”.

Penjelasan model rekrutmen terbuka tersebut akan lebih jelas apabila kita menganalisis tentang profil calon gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan oleh partai-partai politik dalam proses rekrutmen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Periode Tahun 2007 – 2012, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.5. Profil Calon Gubernur & Wakil Gubernur Pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012

Pasangan No. Urut 1	Pasangan No. Urut 2
<p>1. Calon Gubernur Nama : Adang Daradjatun Tempat /Tgl Lahir : Bogor, 13-5-1949 Umur : 58 Tahun Agama : Islam</p> <p>Riwayat Pendidikan : - SRN Jakarta (1961) - SMPN 29 Jakarta (1964) - SMAN 3 Bandung (1967) - PTIK (1980)</p>	<p>1. Calon Gubernur Nama : H. Fauzi Bowo Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 10-4-1948 Umur : 59 Tahun Agama : Islam</p> <p>Riwayat Pendidikan : - SD St. Kanisius Jakarta (1960) - SLTP 29 Kanisius Jakarta (1963) - SLTA Kanisius Jakarta (1966) - Fakultas Teknik UI (1967) - Technische Univ. Braunschweig</p>

<p>- Sesko ABRI (1994)</p> <p>Pengalaman Organisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Umum PABBSI - Ketua Umum PDDI - Ketua Umum Simpay Wargi Urang <p>Jabatan Terakhir :</p> <p>Wakil Kepala Kepolisian RI</p> <p>2. Calon Wakil Gubernur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : H. Danny Anwar - Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 22 -2- 1968 - Umur : 39 Tahun - Agama : Islam <p>Riwayat Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SD Islam Miftahuddi Jakarta (1981) - SMPN 35 Jakarta (1984) - SMAN 7 Jakarta (1987) <p>Pengalaman Organisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) - Pelajar Islam Indonesia - Pemuda Muhammadiyah - LPPTK BKPRMI <p>Jabatan Terakhir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota DPRD DKI Jakarta <p>3. Partai Pengusul : Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</p> <p>4. Motto : "Ayo Benahi Jakarta"</p> <p>5. Visi : "Menuju Kota Jasa Modern, Aman Dan Sejahtera"</p>	<p>Jerman (1976)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doktor Ingenieur, Univ. Kaiserlautern Jerman/Cum Laude (2000) - Sepadya (1987) - Sespanas (1989) - Lemhanas KSA VII (2000). <p>Pengalaman Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivis KAMI FT UI - Aktivis Persatuan Pelajar Indonesia di Jerman Barat. - Dewan Pertimbangan Pemuda KNPI Pusat. <p>Jabatan Terakhir</p> <p>Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta</p> <p>2. Calon Wakil Gubernur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Prijanto - Tempat/Tgl Lahir : Ngawi, 26-5- 1951 - Umur : 56 Tahun - Agama : Islam <p>Riwayat Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SRN Diponegoro Ngawi (1963) - SMPN II Ngawi (1966) - SMAN Ngawi (1969) - Akmil TNI AD (1975) <p>Pengalaman Organisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Umum Pengurus Daerah Persatuan Bowling DKI Jakarta <p>Jabatan Terakhir :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assisten Tertitorial KASAD <p>3. Partai Pengusul : 19 Partai</p> <p>4. Motto : "Bersama Untuk Semua"</p> <p>5. Visi : "Jakarta Yang Aman Dan Sejahtera Untuk Semua"</p>
---	--

Sumber : KPU Provinsi DKI Jakarta, 2007

Mengacu pada pembahasan dan dengan membandingkan tabel frekuensi dan tabel deskripsi model rekrutmen tertutup dengan model rekrutmen terbuka di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai dalam menentukan calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta lebih cenderung menerapkan model rekrutmen terbuka. Namun tidak sepenuhnya menjalankan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang bahwa pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara demokratis dan transparan dimana partai politik "wajib" memperhatikan aspirasi masyarakat karena masih terbatasnya akses partisipasi masyarakat dalam menentukan calon atau menyampaikan aspirasinya. Selain itu partai masih melihat faktor latar belakang suku, agama dan status sosial calon sebagai hal yang penting terutama untuk meraih suara pemilih sebanyak-banyaknya dalam memenangkan kandidatnya sehingga menyebabkan partai menjadi pragmatis dalam arti bahwa partai tidak semata-mata berjuang untuk kepentingan masyarakat tetapi demi kepentingan partai tersebut.

5.2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Rekrutmen

5.2.1. Pengaruh Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Tertutup

a. Pengaruh Kinerja Terhadap Rekrutmen Tertutup

Untuk mengetahui hubungan (koefisien korelasi) dan seberapa besar kinerja variabel independen menjelaskan variabel dependen (koefisien determinasi) dalam hal ini variabel kinerja mampu menjelaskan variabel rekrutmen tertutup. Dalam output SPSS, koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R^2) tertulis R Square terletak pada tabel *Model Summary*^b. Nilai R Square dikatakan baik apabila di atas 0,5 karena nilai R Square berkisar antara angka 0 sampai 1.

Untuk mengetahui koefisien korelasi dan koefisien determinasi antara variabel kinerja dengan variabel rekrutmen tertutup, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.6. Korelasi Kinerja dengan Rekrutmen Tertutup

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.295 ^a	.087	.074	5.816	1.599

a. Predictors: (Constant), Kinerja

b. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Berdasarkan tabel hasil analisis korelasi di atas menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara variabel independen (X1) dengan variabel dependen (Y1) yang ditunjukkan dalam nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,295. Hal ini menunjukkan ada hubungan antara variabel kinerja dengan variabel rekrutmen tertutup namun pada kategori pengaruh lemah. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0,087 atau 8,7% yang berarti bahwa sebesar 8,7% kontribusi yang dimiliki faktor kinerja yang dimiliki seorang calon dengan penyelenggaraan rekrutmen untuk menjelaskan atau mempengaruhi model rekrutmen tertutup, sedangkan sisanya 0,913 atau 91,3% ($100\% - 8,7\%$) dipengaruhi oleh faktor lain.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat signifikansi atau keberartian pengaruh tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.7. Pengaruh Kinerja dengan Rekrutmen Tertutup

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	219.307	1	219.307	6.482	.013 ^a
	Residual	2300.536	68	33.831		
	Total	2519.843	69			

a. Predictors: (Constant), Kinerja

b. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Berdasarkan hasil analisis dengan uji Anova atau F test pada tabel di atas, ternyata diperoleh nilai Fhitung adalah 6,482 yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan tingkat kesalahan 5% dan derajat kebebasan $df_1 = 2$ (jumlah independen dan dependen) dan $df_2 = 68$ ($70 - 2$), dengan Ftabel sebesar 3,14. Karena Fhitung lebih besar dari

F tabel ($6,482 > 3,14$) dan nilai signifikan $0,013 < 0,05$, sehingga variabel kinerja dapat dipergunakan untuk memprediksi model rekrutmen.

Kemudian untuk melihat koefisien regresi antara variabel kinerja dengan variabel rekrutmen tertutup, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.8. Regresi Kinerja Terhadap Rekrutmen Tertutup

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	39.874	6.321		6.308	.000		
	Kinerja	.339	.133	.295	2.546	.013	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi di atas terbentuk persamaan regresi :

$$Y = a + \beta_0 X_1$$

$$Y = 39,874 + 0,339 \text{Kinerja}$$

Dengan persamaan Rekrutmen Tertutup $Y = 39,874 + 0,339(1)$, maka nilai $Y_1 = 40,213$ artinya jika X_1 ditingkatkan 1 point, maka kekuatan hubungan dengan Y_1 akan meningkat sebesar nilai beta dari variabel X_1 . Dalam hal ini apabila kinerja calon ditingkatkan 1 point maka kekuatan hubungan dengan rekrutmen tertutup meningkat sebesar nilai beta dari kinerja tersebut.

Untuk menguji keberartian koefisien regresi dilakukan Uji T. Dengan tingkat kesalahan 5%, dan derajat kebebasan (df) = 69 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen) dengan t tabel sama dengan 1,671. Dari tabel di atas menunjukkan t hitung untuk Kinerja adalah 2,546. Karena $2,546 > 1,671$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y_1 . Artinya kinerja yang dimiliki oleh calon berpengaruh secara signifikan terhadap variabel model rekrutmen tertutup.

b. Pengaruh Dukungan Terhadap Rekrutmen Tertutup

Untuk mengetahui koefisien korelasi dan koefisien determinasi antara variabel dukungan dengan variabel rekrutmen tertutup, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.9. Korelasi Dukungan Terhadap Rekrutmen Tertutup

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.506 ^a	.256	.245	5.251	1.457

a. Predictors: (Constant), Dukungan

b. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Berdasarkan tabel hasil analisis korelasi di atas menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara variabel independen (X2) dengan variabel dependen (Y1) yang ditunjukkan dalam nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,506. Hal ini menunjukkan ada hubungan antara variabel dukungan terhadap variabel rekrutmen tertutup dengan kategori pengaruh kuat. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R²) yaitu 0,256 atau 25,6% yang berarti bahwa sebesar 25,6% kontribusi yang dimiliki faktor dukungan terhadap calon dengan penyelenggaraan rekrutmen untuk menjelaskan atau mempengaruhi model rekrutmen tertutup, sedangkan sisanya 0,744 atau 74,4% (100%-25,6%) dipengaruhi oleh faktor lain.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat signifikansi atau keberartian pengaruh tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.10. Pengaruh Dukungan dengan Rekrutmen Tertutup

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	645.032	1	645.032	23.396	.000 ^a
	Residual	1874.811	68	27.571		
	Total	2519.843	69			

a. Predictors: (Constant), Dukungan

b. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Berdasarkan hasil analisis dengan uji Anova atau F test pada tabel di atas, ternyata diperoleh nilai Fhitung adalah 23,396 yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan tingkat kesalahan 5% dan derajat kebebasan $df_1 = 2$ (jumlah independen dan dependen) dan $df_2 = 68$ ($70 - 2$), dengan Ftabel sebesar 3,14. Karena Fhitung lebih besar dari Ftabel ($23,396 > 3,14$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga variabel dukungan dapat dipergunakan untuk memprediksi model rekrutmen.

Kemudian untuk melihat koefisien regresi antara variabel dukungan dengan variabel rekrutmen tertutup, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.11. Regresi Dukungan Terhadap Rekrutmen Tertutup

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	34.361	4.491		7.651	.000		
	Dukungan	.553	.114	.506	4.837	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi di atas terbentuk persamaan regresi :

$$Y = a + \beta_0 X_2$$

$$Y = 34,361 + 0,553 \text{Dukungan}$$

Dengan persamaan Rekrutmen Tertutup $Y = 34,361 + 0,553(1)$, maka nilai $Y_1 = 34,914$ artinya jika X_2 ditingkatkan 1 point, maka kekuatan hubungan dengan Y_1 akan meningkat sebesar nilai beta dari variabel X_2 . Dalam hal ini apabila dukungan calon ditingkatkan 1 point maka kekuatan hubungan dengan rekrutmen tertutup meningkat sebesar nilai beta dari kinerja tersebut.

Untuk menguji keberartian koefisien regresi dilakukan Uji T. Dengan tingkat kesalahan 5%, dan derajat kebebasan (df) = 69 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen) dengan t tabel sama dengan 1,671. Dari tabel di atas menunjukkan t hitung untuk dukungan adalah 4,837. Karena $4,837 > 1,671$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y_1 . Artinya adanya dukungan kepada calon berpengaruh secara signifikan terhadap variabel model rekrutmen tertutup.

c. Pengaruh Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Tertutup

Untuk mengetahui koefisien korelasi dan koefisien determinasi antara variabel ikatan primordial dengan variabel rekrutmen tertutup, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.12. Korelasi Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Tertutup

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.349 ^a	.122	.109	5.705	1.700

a. Predictors: (Constant), Ikatan Primordial

b. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Berdasarkan tabel hasil analisis korelasi di atas menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel independen (X3) dengan variabel dependen (Y1) yang ditunjukkan dalam nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,349. Hal ini menunjukkan ada pengaruh antara variabel ikatan primordial dengan variabel rekrutmen tertutup namun pada kategori lemah. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0,122 atau 12,2% yang berarti bahwa sebesar 12,2% kontribusi yang dimiliki faktor ikatan primordial dalam penyelenggaraan rekrutmen untuk menjelaskan atau mempengaruhi model rekrutmen tertutup, sedangkan sisanya 0,878 atau 87,8% (100%-12,2%) dipengaruhi oleh faktor lain.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat signifikansi atau keberartian pengaruh tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.13. Pengaruh Ikatan Primordial dengan Rekrutmen Tertutup

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	306.445	1	306.445	9.415	.003 ^a
	Residual	2213.397	68	32.550		
	Total	2519.843	69			

a. Predictors: (Constant), Ikatan Primordial

b. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Berdasarkan hasil analisis dengan uji Anova atau F test pada tabel di atas, ternyata diperoleh nilai Fhitung adalah 9,415 yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan tingkat kesalahan 5% dan derajat kebebasan $df1 = 2$ (jumlah independen dan dependen) dan $df2 = 68$ ($70 - 2$), dengan Ftabel sebesar 3,14. Karena Fhitung lebih besar dari Ftabel ($9,415 > 3,14$) dan nilai signifikan $0,003 < 0,05$, sehingga variabel ikatan primordial dapat dipergunakan untuk memprediksi model rekrutmen.

Kemudian untuk melihat koefisien regresi antara variabel ikatan primordial dengan variabel rekrutmen tertutup, dapat terlihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 5.14. Regresi Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Tertutup

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	42.303	4.474		9.455	.000		
	Ikatan Primordial	.316	.103	.349	3.068	.003	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi di atas terbentuk persamaan regresi :

$$Y = a + \beta_0 X_3$$

$$Y = 42,303 + 0,316 \text{Ikatan Primordial}$$

Dengan persamaan Rekrutmen Tertutup $Y = 42,303 + 0,316(1)$, maka nilai $Y_1 = 42,619$ artinya jika X_3 ditingkatkan 1 point, maka kekuatan hubungan dengan Y_1 akan meningkat sebesar nilai beta dari variabel X_3 . Dalam hal ini apabila ikatan primordial ditingkatkan 1 point maka kekuatan hubungan dengan rekrutmen tertutup meningkat sebesar nilai beta dari kinerja tersebut.

Untuk menguji keberartian koefisien regresi dilakukan Uji T. Dengan tingkat kesalahan 5%, dan derajat kebebasan (df) = 69 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen) dengan ttabel sama dengan 1,671. Dari tabel di atas menunjukkan thitung untuk Ikatan Primordial adalah 3,068. Karena $3,068 > 1,671$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y_1 . Artinya kinerja yang dimiliki oleh calon berpengaruh secara signifikan terhadap variabel model rekrutmen tertutup.

d. Pengaruh Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Tertutup

Untuk mengetahui koefisien korelasi dan koefisien determinasi antara variabel kinerja, dukungan dan ikatan primordial secara bersama-sama atau simultan dengan variabel rekrutmen tertutup, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.15. Korelasi Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Tertutup

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.584 ^a	.341	.311	5.015	1.777

a. Predictors: (Constant), Ikatan Primordial, Dukungan, Kinerja

b. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Berdasarkan tabel hasil analisis korelasi di atas menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel independen (X1, X2 dan X3) dengan variabel dependen (Y1) yang ditunjukkan dalam nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,584. Hal ini menunjukkan ada pengaruh antara variabel kinerja, dukungan dan ikatan primordial secara simultan dengan variabel rekrutmen tertutup dengan kategori pengaruh kuat. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0,341 atau 34,1% yang berarti bahwa sebesar 34,1% kontribusi yang dimiliki faktor kinerja yang dimiliki, dukungan kepada calon dan karena adanya ikatan primordial terhadap penyelenggaraan rekrutmen untuk menjelaskan atau mempengaruhi model rekrutmen tertutup, sedangkan sisanya 0,659 atau 65,9% (100%-34,1%) dipengaruhi oleh faktor lain.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat signifikansi atau keberartian pengaruh tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.16. Pengaruh Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Secara Simultan Terhadap Rekrutmen Tertutup

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	859.622	3	286.541	11.391	.000 ^a
	Residual	1660.221	66	25.155		
	Total	2519.843	69			

a. Predictors: (Constant), Ikatan Primordial, Dukungan, Kinerja

b. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Berdasarkan hasil analisis dengan uji Anova atau F test pada tabel di atas, ternyata diperoleh nilai Fhitung adalah 11,391 yang dapat digunakan untuk

melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan tingkat kesalahan 5% dan derajat kebebasan $df_1 = 4$ (jumlah independen dan dependen) dan $df_2 = 68$ ($70 - 2$), dengan F_{tabel} sebesar 2.51. Karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($11,391 > 2,51$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga variabel kinerja, dukungan dan ikatan primordial secara bersama-sama dapat dipergunakan untuk memprediksi model rekrutmen.

Kemudian untuk melihat koefisien regresi antara variabel kinerja, dukungan dan ikatan primordial secara simultan terhadap variabel rekrutmen tertutup, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.17. Regresi Berganda Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Tertutup

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	20.959	6.623		3.164	.002		
	Kinerja	.160	.123	.139	1.304	.197	.878	1.139
	Dukungan	.479	.112	.439	4.274	.000	.947	1.055
	Ikatan Primordial	.203	.097	.224	2.106	.039	.881	1.135

a. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi berganda di atas terbentuk persamaan regresi :

$$Y = a + \beta_0 X_1 + \beta_0 X_2 + \beta_0 X_3$$

$$Y = 20,959 + 0,160 \text{Kinerja} + 0,479 \text{Dukungan} + 0,203 \text{Ikatan Primordial}$$

Dengan persamaan Rekrutmen Tertutup $Y = 20,959 + 0,160(1) + 0,479(1) + 0,203(1)$, maka nilai $Y = 21,801$ artinya jika X_1 , X_2 dan X_3 meningkat 1 point, maka kekuatan hubungan dengan rekrutmen tertutup (Y_1) akan meningkat sebesar nilai beta dari masing-masing variabel kinerja (X_1), dukungan (X_2) dan ikatan primordial (X_3).

Untuk menguji keberartian koefisien regresi dilakukan Uji T. Dengan tingkat kesalahan 5%, dan derajat kebebasan (df) = 67 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen) dengan t_{tabel} sama dengan 1,671. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Variabel Kinerja memiliki nilai signifikansi $0,197 > 0,05$ dan T_{hitung} sebesar $1,304 < T_{tabel} = 1,671$, maka H_0 diterima, jadi "tidak ada

- pengaruh yang signifikan antara variabel X1 dengan Y1". Artinya kinerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap rekrutmen tertutup.
- b. Variabel Dukungan memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan Thitung sebesar $4,274 > T_{tabel} = 1,671$, maka H_0 ditolak, jadi "ada pengaruh yang signifikan antara variabel X2 dengan Y1". Artinya dukungan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap rekrutmen tertutup.
- c. Variabel Ikatan Primordial memiliki nilai signifikansi $0,039 < 0,05$ dan Thitung sebesar $2,106 > T_{tabel} = 1,671$, maka H_0 ditolak, jadi "ada pengaruh yang signifikan antara variabel X3 dengan Y1". Artinya ikatan primordial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap rekrutmen tertutup.

5.2.2. Pengaruh Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka

a. Pengaruh Kinerja Terhadap Rekrutmen Terbuka

Untuk mengetahui koefisien korelasi dan koefisien determinasi antara variabel kinerja dengan variabel rekrutmen terbuka, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.18. Korelasi Kinerja Terhadap Rekrutmen Terbuka

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.406 ^a	.165	.153	5.701	1.588

a. Predictors: (Constant), Kinerja

b. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Berdasarkan tabel hasil analisis korelasi di atas menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara variabel independen (X1) dengan variabel dependen (Y2) yang ditunjukkan dalam nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,406. Hal ini menunjukkan ada pengaruh antara variabel kinerja dengan variabel rekrutmen terbuka dengan kategori pengaruh kuat. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0,165 atau 16,5% yang berarti bahwa sebesar 16,5% kontribusi yang dimiliki faktor kinerja yang dimiliki seorang calon dengan penyelenggaraan

rekrutmen untuk menjelaskan atau mempengaruhi model rekrutmen terbuka, sedangkan 0,835 atau 83,5% (100%-16,5%) dipengaruhi oleh faktor lain.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat signifikansi atau keberartian pengaruh tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.19. Pengaruh Kinerja dengan Rekrutmen Terbuka

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	436.846	1	436.846	13.441	.000 ^a
	Residual	2210.140	68	32.502		
	Total	2646.986	69			

a. Predictors: (Constant), Kinerja

b. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Berdasarkan hasil analisis dengan uji Anova atau F test pada tabel di atas, ternyata diperoleh nilai Fhitung adalah 13,441 yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan tingkat kesalahan 5% dan derajat kebebasan $df1 = 2$ (jumlah independen dan dependen) dan $df2 = 68$ ($70 - 2$), dengan Ftabel sebesar 3,14. Karena Fhitung lebih besar dari Ftabel ($13,441 > 3,14$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga variabel kinerja dapat dipergunakan untuk memprediksi model rekrutmen.

Kemudian untuk melihat koefisien regresi antara variabel kinerja dengan variabel rekrutmen tertutup, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.20. Regresi Kinerja Terhadap Rekrutmen Terbuka

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	36.408	6.196		5.876	.000		
	Kinerja	.479	.131	.406	3.666	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi di atas terbentuk persamaan regresi :

$$Y = a + \beta_0 X_1$$

$$Y = 36,408 + 0,479 \text{Kinerja}$$

Dengan persamaan Rekrutmen Terbuka $Y = 36,408 + 0,479(1)$, maka nilai $Y_1 = 36,887$ artinya jika X_1 ditingkatkan 1 point, maka kekuatan hubungan dengan Y_2 akan meningkat sebesar nilai beta dari variabel X_1 . Dalam hal ini apabila kinerja calon ditingkatkan 1 point maka kekuatan hubungan dengan rekrutmen terbuka meningkat sebesar nilai beta dari kinerja tersebut.

Untuk menguji keberartian koefisien regresi dilakukan Uji T. Dengan tingkat kesalahan 5%, dan derajat kebebasan (df) = 69 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen) dengan t tabel sama dengan 1,671. Dari tabel di atas menunjukkan t hitung untuk Kinerja adalah 3,666. Karena $3,666 > 1,671$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y_2 . Artinya kinerja yang dimiliki oleh calon berpengaruh secara signifikan terhadap variabel model rekrutmen terbuka.

b. Pengaruh Dukungan Terhadap Rekrutmen Terbuka

Untuk mengetahui koefisien korelasi dan koefisien determinasi antara variabel dukungan dengan variabel rekrutmen terbuka, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.21. Korelasi Dukungan Terhadap Rekrutmen Terbuka

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.530 ^a	.281	.271	5.290	1.411

a. Predictors: (Constant), Dukungan

b. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Berdasarkan tabel hasil analisis korelasi di atas menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara variabel independen (X_2) dengan variabel dependen (Y_2) yang ditunjukkan dalam nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,530. Hal ini menunjukkan ada pengaruh antara variabel dukungan terhadap variabel rekrutmen terbuka dengan kategori pengaruh kuat. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0,281 atau 28,1% yang berarti bahwa sebesar 28,1% kontribusi yang dimiliki faktor dukungan kepada calon dalam penyelenggaraan rekrutmen untuk menjelaskan atau mempengaruhi model rekrutmen terbuka, sedangkan sisanya 0,719 atau 71,9% ($100\% - 28,1\%$) dipengaruhi oleh faktor lain.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat signifikansi atau keberartian pengaruh tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.22. Pengaruh Dukungan Terhadap Rekrutmen Terbuka

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	744.251	1	744.251	26.598	.000 ^a
	Residual	1902.735	68	27.981		
	Total	2646.986	69			

a. Predictors: (Constant), Dukungan

b. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Berdasarkan hasil analisis dengan uji Anova atau F test pada tabel di atas, ternyata diperoleh nilai Fhitung adalah 26,598 yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan tingkat kesalahan 5% dan derajat kebebasan $df_1 = 2$ (jumlah independen dan dependen) dan $df_2 = 68$ ($70 - 2$), dengan Ftabel sebesar 3,14. Karena Fhitung lebih besar dari Ftabel ($26,598 > 3,14$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga variabel kinerja dapat dipergunakan untuk memprediksi model rekrutmen.

Kemudian untuk melihat koefisien regresi antara variabel dukungan terhadap variabel rekrutmen terbuka, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.23. Regresi Dukungan Terhadap Rekrutmen Terbuka

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	35.880	4.525		7.930	.000		
	Dukungan	.594	.115	.530	5.157	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi di atas terbentuk persamaan regresi :

$$Y = a + \beta_0 X_2$$

$$Y = 35,880 + 0,594 \text{Dukungan}$$

Dengan persamaan Rekrutmen Tertutup $Y_2 = 35,880 + 0,594(1)$, maka nilai $Y_2 = 36,474$ artinya jika X_2 ditingkatkan 1 point, maka kekuatan hubungan

dengan Y2 akan meningkat sebesar nilai beta dari variabel X2. Dalam hal ini apabila dukungan kepada calon meningkat 1 point maka kekuatan hubungan dengan rekrutmen terbuka meningkat sebesar nilai beta dari kinerja tersebut.

Untuk menguji keberartian koefisien regresi dilakukan Uji T. Dengan tingkat kesalahan 5%, dan derajat kebebasan (df) = 69 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen) dengan t_{tabel} sama dengan 1,671. Dari tabel di atas menunjukkan thitung untuk dukungan adalah 5,157. Karena $5,157 > 1,671$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y2. Artinya adanya dukungan kepada calon berpengaruh secara signifikan terhadap variabel model rekrutmen terbuka.

c. Pengaruh Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka

Untuk mengetahui koefisien korelasi dan koefisien determinasi antara variabel ikatan primordial dengan variabel rekrutmen terbuka, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5,24. Korelasi Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.313 ^a	.098	.085	5.925	1.592

a. Predictors: (Constant), Ikatan Primordial

b. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Berdasarkan tabel hasil analisis korelasi di atas menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara variabel independen (X3) dengan variabel dependen (Y2) yang ditunjukkan dalam nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,313. Hal ini menunjukkan ada hubungan antara variabel ikatan primordial dengan variabel rekrutmen terbuka namun pada kategori pengaruh lemah. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0,098 atau 9,8% yang berarti bahwa sebesar 9,8% kontribusi yang dimiliki faktor ikatan primordial dalam penyelenggaraan rekrutmen untuk dapat menjelaskan atau mempengaruhi model rekrutmen terbuka, sedangkan 0,902 atau 90,2% ($100\% - 9,8\%$) dipengaruhi oleh faktor lain.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat signifikansi atau keberartian pengaruh tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.25. Pengaruh Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	260.088	1	260.088	7.410	.008 ^a
	Residual	2386.898	68	35.101		
	Total	2646.986	69			

a. Predictors: (Constant), Ikatan Primordial

b. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Berdasarkan hasil analisis dengan uji Anova atau F test pada tabel di atas, ternyata diperoleh nilai Fhitung adalah 7,410. Nilai ini yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan tingkat kesalahan 5% dan derajat kebebasan $df1 = 2$ (jumlah independen dan dependen) dan $df2 = 68$ ($70 - 2$), dengan Ftabel sebesar 3,14. Karena Fhitung lebih besar dari Ftabel ($7,410 > 3,14$) dan nilai signifikan $0,008 < 0,05$, sehingga variabel ikatan primordial dapat dipergunakan untuk memprediksi model rekrutmen.

Kemudian untuk melihat koefisien regresi antara variabel ikatan primordial terhadap variabel rekrutmen terbuka, dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.26. Regresi Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	46.486	4.646		10.005	.000		
	Ikatan Primordial	.291	.107	.313	2.722	.008	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi di atas terbentuk persamaan regresi :

$$Y = a + \beta_0 X_3$$

$$Y = 46,486 + 0,291 \text{Ikatan Primordial}$$

Dengan persamaan Rekrutmen Tertutup $Y = 46,486 + 0,291(1)$, maka nilai $Y_2 = 46,777$ artinya jika X_3 ditingkatkan 1 point, maka kekuatan hubungan dengan Y_2 akan meningkat sebesar nilai beta dari variabel X_3 . Dalam hal ini apabila ikatan primordial meningkat 1 point maka kekuatan hubungan dengan rekrutmen terbuka meningkat sebesar nilai beta dari ikatan primordial tersebut.

Untuk menguji keberartian koefisien regresi dilakukan Uji T. Dengan tingkat kesalahan 5%, dan derajat kebebasan (df) = 69 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen) dengan t tabel sama dengan 1,671. Dari tabel di atas menunjukkan thitung untuk ikatan primordial adalah 2,722. Karena $2,722 > 1,671$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X3 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y2. Artinya faktor ikatan primordial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel model rekrutmen tertutup.

d. Pengaruh Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka

Untuk mengetahui koefisien korelasi dan koefisien determinasi antara variabel kinerja, dukungan dan ikatan primordial secara simultan terhadap variabel rekrutmen terbuka, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.27. Korelasi Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.629 ^a	.396	.368	4.923	1.752

a. Predictors: (Constant), Ikatan Primordial, Dukungan, Kinerja

b. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Berdasarkan tabel hasil analisis korelasi di atas menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara variabel independen (X1, X2 dan X3) dengan variabel dependen (Y2) yang ditunjukkan dalam nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,629. Hal ini menunjukkan ada pengaruh antara variabel kinerja, dukungan dan ikatan primordial dengan variabel rekrutmen terbuka dengan kategori pengaruh kuat. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu 0,396 atau 39,6% yang berarti bahwa sebesar 39,6% kontribusi yang dimiliki faktor kinerja yang dimiliki, dukungan kepada calon dan adanya faktor ikatan primordial dalam penyelenggaraan rekrutmen untuk menjelaskan atau mempengaruhi model rekrutmen terbuka, sedangkan sisanya 0,604 atau 60,4% ($100\% - 39,6\%$) dipengaruhi oleh faktor lain.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat signifikansi atau keberartian pengaruh tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.28. Pengaruh Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Terhadap Rekrutmen Terbuka

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1047.617	3	349.206	14.410	.000 ^a
	Residual	1599.369	66	24.233		
	Total	2646.986	69			

a. Predictors: (Constant), Ikatan Primordial, Dukungan , Kinerja

b. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Berdasarkan hasil analisis dengan uji Anova atau F test pada tabel di atas, ternyata diperoleh nilai Fhitung adalah 14,410 yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kesalahan 5% dan derajat kebebasan $df1 = 4$ (jumlah independen dan dependen) dan $df2 = 68$ ($70 - 2$), dengan Ftabel sebesar 2,51. Karena Fhitung lebih besar dari Ftabel ($14,410 > 2,51$) dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga variabel kinerja, dukungan dan ikatan primordial secara bersama-sama dapat dipergunakan untuk memprediksi model rekrutmen.

Kemudian untuk melihat koefisien regresi antara variabel kinerja, dukungan dan ikatan primordial secara simultan terhadap variabel rekrutmen terbuka, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.29. Regresi Berganda Kinerja, Dukungan dan Ikatan Primordial Secara Simultan Terhadap Rekrutmen Terbuka

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.364	6.501		2.825	.006		
	Kinerja	.323	.120	.274	2.682	.009	.878	1.139
	Dukungan	.506	.110	.452	4.598	.000	.947	1.055
	Ikatan Primordia	.133	.095	.143	1.403	.165	.881	1.135

a. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi berganda di atas terbentuk persamaan regresi :

$$Y = a + \beta_0 X_1 + \beta_0 X_2 + \beta_0 X_3$$

$$Y = 18,364 + 0,323 \text{Kinerja} + 0,506 \text{Dukungan} + 0,133 \text{Ikatan Primordial}$$

Dengan persamaan Rekrutmen Terbuka $Y_2 = 18,364 + 0,323(1) + 0,506(1) + 0,133(1)$, maka nilai $Y_2 = 19,326$ artinya jika X_1 , X_2 dan X_3 ditingkatkan 1 point, maka kekuatan hubungan dengan rekrutmen terbuka (Y_2) akan meningkat sebesar nilai beta dari masing-masing variabel kinerja (X_1), dukungan (X_2) dan ikatan primordial (X_3).

Untuk menguji keberartian koefisien regresi dilakukan Uji T. Dengan tingkat kesalahan 5%, dan derajat kebebasan (df) = 67 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen) dengan t tabel sama dengan 1,671. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Variabel Kinerja memiliki nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ dan T hitung sebesar $2,682 > T$ tabel = 1,671, maka H_0 ditolak, jadi “ada pengaruh yang signifikan antara variabel X_1 dengan Y_2 ”. Artinya kinerja secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap rekrutmen terbuka.
- b. Variabel Dukungan memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan T hitung sebesar $4,598 > T$ tabel = 1,671, maka H_0 ditolak, jadi “ada pengaruh yang signifikan antara variabel X_2 dengan Y_2 ”. Artinya dukungan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap rekrutmen terbuka.
- c. Variabel Ikatan Primordial memiliki nilai signifikansi $0,165 > 0,05$ dan T hitung sebesar $1,403 < T$ tabel = 1,671, maka H_0 diterima, jadi “tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X_3 dengan Y_2 ”. Artinya ikatan primordial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap rekrutmen terbuka.

Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas, dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses penentuan calon dalam pilkada partai politik harus memperhatikan beberapa faktor penting diantaranya berkaitan dengan *performance* kandidat itu sendiri, berapa besar dukungan masyarakat (*grass roots*) terhadap calon yang akan dipilih oleh partai pengusung dan seberapa kuatnya sentimen primordial yang masih berlaku dalam masyarakat.

Dalam tahap pencalonan partai politik tidak hanya berinteraksi dengan para kandidat yang ingin mencalonkan dalam pemilihan dan berinteraksi dengan partai-partai politik, tetapi juga harus berinteraksi dengan elemen-elemen masyarakat atau kelompok-kelompok kepentingan dalam pilkada. Dinamika politik pilkada terutama tampak pada tahap pencalonan atau penentuan calon di partai politik. Tidak jarang terjadi konflik internal di dalam satu partai apabila tidak adanya kesamaan persepsi di dalam melihat faktor-faktor tersebut misalnya antara pimpinan partai di tingkat pusat dan di tingkat daerah (wilayah), antara pengurus tingkat pusat dan daerah ataupun antara sesama pengurus di tingkat pusat atau di tingkat daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 6 dan No. 17 tahun 2005 bahwa hanya melalui partai politik yang merupakan satu-satunya jalur dalam pencalonan baik melalui satu partai politik maupun gabungan (koalisi) beberapa partai politik. Sehingga dengan demikian partai politik harus membuka peluang kepada berbagai elemen masyarakat untuk menjadi kandidat selain para kader partai politik untuk berkompetisi dalam pilkada. Hal ini sangat tergantung pada keinginan partai politik tersebut sehingga seringkali kurang memperhatikan faktor-faktor tadi atau hanya memperhatikan satu aspek saja misalnya mengedepankan isu putra daerah atau latar belakang suku untuk menarik suara sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan aspek lain seperti bagaimana *track record* dari calon tersebut dan bagaimana kemauan dari para pemilih atau masyarakat umum.

Regulasi pilkada mengatur bahwa proses penjaringan calon partai politik atau gabungan partai politik harus dilakukan secara “demokratis dan transparan” artinya adanya keterbukaan proses rekrutmen tersebut dari akses masyarakat. Namun pada kenyataannya hampir semua proses pencalonan dalam pilkada kurang memperhatikan urgensi dari pada akses publik. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya proses seleksi calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, masyarakat bahkan sama sekali tidak mengetahui, mengapa suatu partai tertentu memilih atau mencalonkan figur tertentu yang menurut masyarakat kurang memiliki kapasitas dan kurang dikenal oleh masyarakat. Sehingga tidak jarang adanya dorongan masyarakat untuk

mengajukan calon yang dianggap berkompeten untuk dipilih melalui jalur perseorangan (independen).

Dengan demikian dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pencalonan, maka partai politik harus melaksanakan seleksi calon secara terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang memenuhi kriteria melalui mekanisme konvensi yang dimulai dari tingkat yang paling rendah sehingga dapat berpeluang memperoleh kandidat yang berkualitas, dekat dan berakar di masyarakat dan pada akhirnya dapat membawa kemenangan bagi partai tersebut dalam pemilihan.

5.3. Dampak Rekrutmen Terhadap Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional

Menurut Wan Usman bahwa untuk menjelaskan ketahanan suatu bangsa (ketahanan nasional) dapat dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh dengan nama *Catastrophe Theory* yang menyatakan bahwa suatu ketahanan negara atau bangsa dapat secara tiba-tiba mengalami kejatuhan (terjadinya *Catastrophe Jump*)⁷⁸. Ketahanan Nasional suatu negara atau bangsa mengandung unsur kestabilan. Negara mampu mencapai kondisi yang stabil atau bertahan dari berbagai perubahan (ATHG) karena didukung oleh faktor kekuatan yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara agar dapat menghadapi perubahan lingkungan strategiknya di waktu sekarang dan yang akan datang dapat berkembang.

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa aspek kehidupan politik merupakan salah satu unsur dari kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara dan bangsa Indonesia yang menopang agar ketahanan nasional tetap stabil atau mampu bertahan dari berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan strategis. Untuk menciptakan kehidupan politik yang mendukung ketahanan suatu negara maka dalam segala kegiatan politik harus dilaksanakan secara demokratis yakni adanya partisipasi masyarakat di dalamnya.

⁷⁸ Wan Usman, dkk., *Op. Cit.*, hal. 101.

Pilkada yang diselenggarakan di Indonesia untuk membentuk pemerintahan di daerah pada hakekatnya identik dengan pelaksanaan pemilihan presiden dalam membentuk pemerintahan secara nasional maupun pemilu untuk memilih wakil rakyat di legislatif. Kegiatan pemilihan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk dari suatu negara atau pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan politik yang demokratis. Terselenggaranya pemerintahan yang demokratis tentunya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Demokrasi sebagaimana menurut Abraham Lincoln didefinisikan sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi negara terletak ditangan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di mana adanya partisipasi masyarakat dalam menentukan pemerintahan sendiri. Sehingga pejabat pemerintah memegang jabatan atas nama rakyat dan tetap bertanggung jawab kepada rakyat.

Dalam pilkada mencakup beberapa tahap termasuk pada proses rekrutmen calon oleh partai politik. Proses rekrutmen calon juga dalam hal ini harus dilaksanakan secara demokratis dalam arti bahwa adanya partisipasi masyarakat baik dalam penjaringan nama calon, seleksi maupun dalam melaksanakan penilaian terhadap *track record* calon yang akan menjadi kontestan. Sehingga calon yang ditetapkan oleh partai untuk menjadi "pasangan calon" kepala daerah dalam pilkada dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan adanya kesesuaian aspirasi masyarakat dengan calon yang ditetapkan maka masyarakat akan memberikan partisipasi yang tinggi dalam penyelenggaraan pilkada tersebut misalnya tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya (pencoblosan).

Proses pencalonan dalam pilkada DKI Jakarta ditinjau dari ketahanan daerah dengan melihat dari dua aspek yakni aspek keamanan dan kesejahteraan, nampak jelas bahwa calon yang diajukan oleh partai-partai politik telah merepresentasikan kedua aspek tersebut pada calon gubernur dan calon wakil gubernur, dari aspek keamanan misalnya, PKS mengajukan nama Adang Darajatun sebagai calon gubernur dengan latar belakang purnawirawan kepolisian (mantan Wakapolri) dan koalisi partai menetapkan Prijanto dengan latar belakang

militer (mantan Asisten Teritorial TNI AD) sebagai calon wakil gubernur mendampingi Fauzi Bowo. Sedangkan dari aspek kesejahteraan, umumnya partai politik berusaha mengajukan nama calon yang dianggap mampu untuk mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta berbekal pendidikan, pengalaman dan keahlian calon tersebut. Misalnya koalisi partai menetapkan Fauzi Bowo sebagai calon gubernur dengan pertimbangan memiliki pengalaman sebagai birokrat, memiliki keahlian dibidang perkotaan yang diperoleh melalui pendidikan di berbagai perguruan tinggi. Begitu pula penetapan Dani Anwar oleh PKS, yang dianggap memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif dengan latar belakang pengusaha. Dengan demikian maka calon yang ditetapkan merupakan representasi dari aspek keamanan dan kesejahteraan yang merupakan cakupan dari ketahanan daerah sekaligus dapat mewakili dari berbagai lapisan masyarakat pemilih yang pada akhirnya akan mendukung calon yang telah ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, terdapat 3.775.038 pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang terdiri dari 3.645.066 suara yang dinyatakan sah dan 113.972 suara yang tidak sah. Sementara sekitar 2,1 juta yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini penggunaan suara akan dapat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam salah satu aspek atau tahap ini.

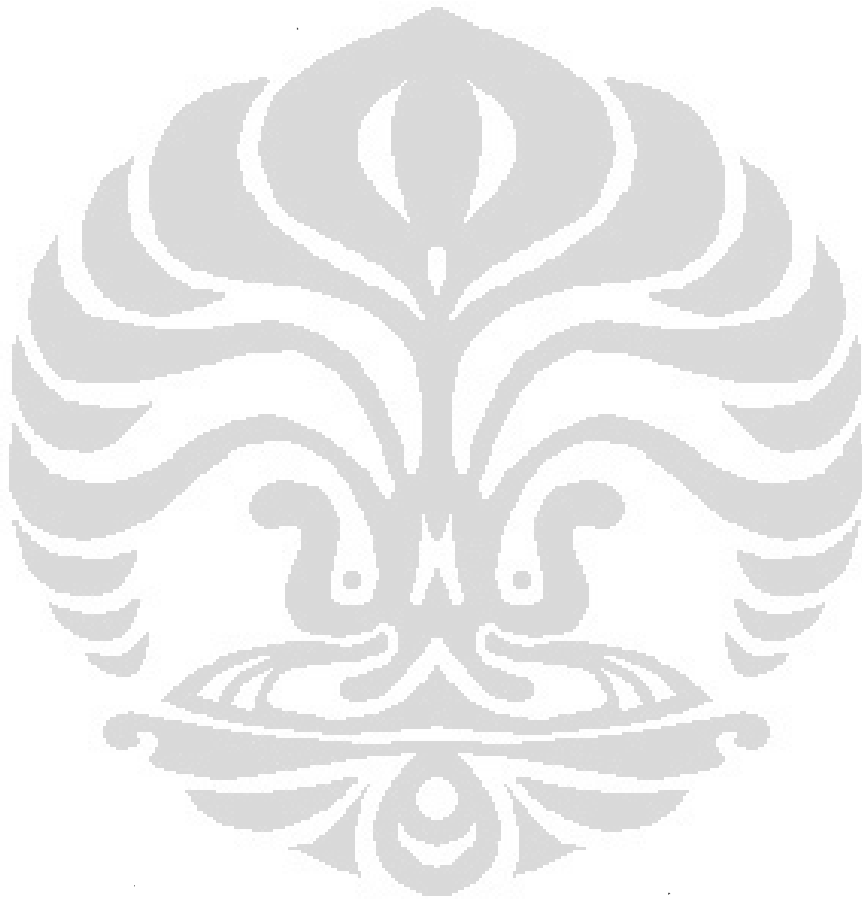
Adapun perolehan suara kedua pasangan calon kepala daerah dari jumlah suara sah pada tahap pemilihan (pencoblosan) sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5. 30. Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2007-2012

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase (%)
1.	Adang Dorodjatun - Dani Anwar	1.535.555	42,13
2.	Fauzi Bowo - Prijanto	2.109.511	57,87
Total Suara		3.645.066	100,00

Sumber : Data diolah dari KPUD DKI Jakarta

Kemudian ketika terbentuknya pemerintahan di daerah maka akan memperoleh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat yang dapat ditunjukkan pada dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan selama pemerintahannya. Partisipasi masyarakat yang tinggi, baik pada saat pelaksanaan pilkada maupun pemerintahan yang mendapat legitimasi masyarakat maka tentunya akan menciptakan kondisi kehidupan politik yang lebih baik dan akhirnya menunjang ketahanan daerah khususnya Provinsi DKI Jakarta maupun ketahanan nasional Indonesia pada skala yang lebih besar.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, bahwa proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai politik dalam menentukan bakal calon kepala daerah pada Pilkada DKI Jakarta Periode Tahun 2007-2012 adalah lebih cenderung menerapkan model rekrutmen terbuka daripada model rekrutmen tertutup. Partai politik dalam rangka memperoleh calon yang berkualitas, mempunyai kapabilitas dan dikenal oleh masyarakat maka telah membuka ruang bagi publik untuk munculnya nama bakal calon tidak hanya diperuntukkan bagi kader-kader partai politik melainkan juga tokoh-tokoh lain yang bukan anggota partai politik. Dalam melaksanakan proses seleksi telah melibatkan semua unsur partai misalnya melalui mekanisme konvensi yang dinilai lebih demokratis walaupun hasilnya pada akhirnya harus mendapat "restu" dari pimpinan pusat partai.

Aspek transparansi dan ruang partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap partai politik wajib memperhatikan aspirasi atau tanggapan masyarakat. Partai politik juga masih mengangkat aspek latar belakang status sosial, suku atau putra daerah bakal calon dengan tujuan untuk menarik dukungan atau suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat dan menyebabkan partai bersikap pragmatis yang hanya memperjuangkan kepentingan partai dalam merebut atau mempertahankan kekuasaan dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat.

Kedua, Faktor kinerja, dukungan dan ikatan primordial berpengaruh secara signifikan terhadap rekrutmen calon. Besarnya pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara variabel kinerja, dukungan dan ikatan primordial terhadap variabel rekrutmen terbuka tergolong kuat. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat ditarik sub kesimpulan sebagai berikut :

- a. Besarnya pengaruh variabel kinerja terhadap variabel rekrutmen terbuka tergolong kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang mencakup tingkat pendidikan, keahlian/keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang bakal calon akan menjadi faktor yang sangat penting dalam proses rekrutmen bakal calon pada pelaksanaan pilkada.
- b. Besarnya pengaruh variabel dukungan dengan variabel rekrutmen terbuka tergolong kuat. Adanya dukungan yang diberikan kepada seorang bakal calon dari berbagai unsur baik dari dalam partai (unsur partai misalnya Kino, organisasi binaan partai atau organisasi sayap partai lainnya) maupun dari kelompok-kelompok masyarakat menjadi pertimbangan dalam rekrutmen bakal calon.
- c. Besarnya pengaruh antara variabel ikatan primordial dengan variabel rekrutmen terbuka termasuk dalam kategori lemah. Faktor ikatan primordial atau ikatan karena status sosial, adanya hubungan kedekatan dan kesamaan suku, etnis, agama dan latar belakang sosial yang dimiliki oleh bakal calon kurang menjadi faktor yang penting dalam proses rekrutmen yang demokratis.

Ketiga, Untuk menciptakan kehidupan politik yang mendukung ketahanan nasional suatu negara atau daerah maka dalam segala kegiatan politik harus dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yakni adanya partisipasi masyarakat di dalamnya. Pilkada adalah merupakan salah satu kegiatan politik untuk membentuk pemerintahan di daerah harus diselenggarakan secara demokratis. Sehingga pemerintah di daerah dapat mencerminkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam pilkada yang dilaksanakan di DKI Jakarta Periode 2007-2012 yang mencakup beberapa tahap termasuk pada proses rekrutmen bakal calon oleh partai politik, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum model yang diterapkan adalah model rekrutmen yang terbuka di mana bakal calon berasal dari umum bukan hanya dari partai, lebih mengutamakan kinerja dan popularitas bakal calon namun masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat misalnya dalam proses seleksi masih kurangnya akses masyarakat baik untuk memperoleh informasi maupun memberikan penilaian mengenai *track record* bakal calon.

Proses rekrutmen yang ideal yakni adanya partisipasi masyarakat baik dalam penjaringan nama bakal calon, seleksi maupun dalam melaksanakan penilaian terhadap *track record* bakal calon sampai pada proses penetapan calon yang akan menjadi kontestan dalam pilkada. Sehingga "pasangan calon" yang telah ditetapkan dapat mencerminkan aspirasi dan keinginan masyarakat dan akan mendukung dalam penyelenggaraan pilkada. Dan akhirnya ketika terbentuknya pemerintahan di daerah akan memperoleh legitimasi dari masyarakat dengan demikian dapat menciptakan kehidupan politik yang mendukung pada Ketahanan Wilayah DKI Jakarta khususnya dan Ketahanan Nasional pada umumnya.

6.2. Saran

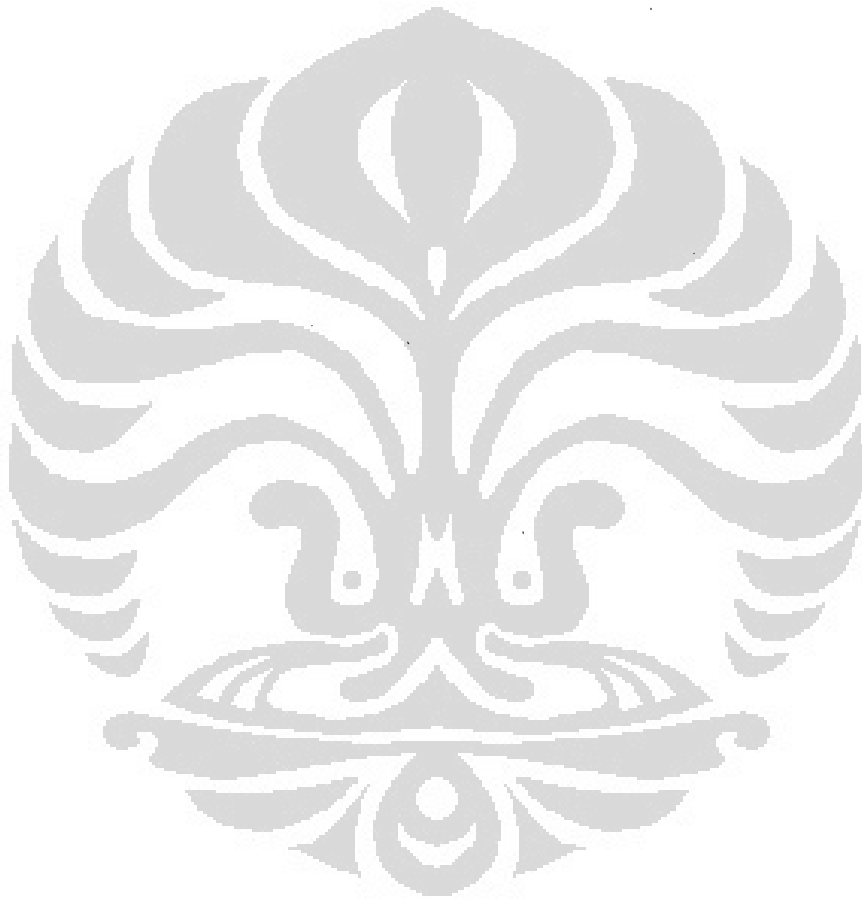
Mengacu kesimpulan di atas, dalam rangka upaya penyempurnaan pelaksanaan proses rekrutmen bakal calon dalam pemilihan kepala daerah, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat (publik) dalam pencalonan sesuai regulasi pilkada, maka seharusnya partai politik melakukan seleksi secara terbuka ke masyarakat dalam hal penjaringan nama bakal calon, seleksi calon melalui mekanisme konvensi, konferensi di daerah oleh partai atau sejenisnya mulai dari tingkat kepengurusan yang terendah misalnya di tingkat ranting. Sehingga akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses rekrutmen lebih terbuka dan calon yang ditetapkan mencerminkan aspirasi masyarakat (*grass roots*).

Kedua, mengingat bahwa pilkada pada hakikatnya adalah bagian dari pemilu di daerah dalam rangka pembentukan pemerintahan daerah dan peserta kompetisi pilkada adalah pasangan calon dan bukan partai politik seperti halnya dalam pemilu legislatif, maka semestinya terbuka peluang bagi munculnya para kandidat bakal calon kepala daerah perorangan (*independen*) yang memperoleh dukungan dari masyarakat di luar jalur partai politik.

Ketiga, bahwa agar ketahanan daerah tetap stabil atau lebih meningkat, maka salah satu aspek yang harus diciptakan adalah kehidupan politik termasuk pelaksanaan rekrutmen dalam penyelenggaraan pilkada harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Partai politik harus mempromosikan kandidat yang berkualitas yakni memiliki kapasitas, integritas, legitimasi dan populer (dikenal)

di mata masyarakat. Kemudian proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat dari parpol, *track record* masing-masing kandidat dan proses hingga penentuan daftar calon.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Ed. Revisi., Rineka Cipta, Jakarta : 2007.
- Achmad Herry, *Pilkada Langsung Sembilan Kunci Sukses Tim Sukses*, Galang Press, Yogyakarta : 2005.
- Adman Nursal, *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2004.
- Almond, Gabriel A. and G. Bingham Powell, Jr., *Cooperative Politics Today : A World View*, Fourth Edition, Scott, Foresman and Company, London : 1988.
- _____, *Budaya Politik, Tingkalku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Cetakan Kedua, Alibahasa Sahat Simamora, Media Presindo, Jakarta : 1990.
- Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta : 2003.
- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah : Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta : 2003.
- Bhuwono Agung Nugroho, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, Penerbit Andi, Yogyakarta : 2005.
- B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta : 2005.
- Cochran, William G., *Teknik Penarikan Sampel*, Edisi Ketiga, (Terjemahan Rudiansyah), Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta : 2005.
- Creswel, John W., *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*, Alibahasa Angkatan III&IV KIK UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah, Penerbit KIK Pres, Jakarta : 2003.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Rineka Cipta : 1991.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2002.
- Endang Tarmudi, *Primordialisme & Konflik Golongan : Polarisasi Politik Kalangan Islam Indonesia Pasca Orde Baru*, PMB-LIPI, Jakarta : 2000.
- Haryanto, *Sistem Politik : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta : 1984.
- Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta : 2002.

- Irawan Prasetya, dkk., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIA-LAN Press, Jakarta : 1992.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung : 2004.
- J. Suparanto, *Prosposal Penelitian dengan Contoh*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta : 2004.
- Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah : Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, Kerjasama Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya : 2006.
- Kessler, Ronald C., Ricard H. Prices and Camille B Wortman (1985), *Social Factors in Psychopathology : Social Support and Coping Processes*, dalam *Annual Review of Psychology* : 1990.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi), PT Remaja Rosdakarya, Bandung : 2006.
- Lili Romli (Ed)., *Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta : 2005.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta : 1989.
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta : 1998.
- _____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta : 2006.
- Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press : 2000.
- M. Khoirul Anwar dan Vina Salviana DS., *Perilaku Partai Politik*, UMM Press, Malang : 2006.
- Pheni Chalid, dkk., *Pilkada Langsung : Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance, Partnership for Reform in Indonesia* dengan Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta : 2005.
- Pipit R. Kartawidjaya dan Mulyana W. Kusumah, *Kisah Mini Sistem Kepartaian*, Closs, Berlin : 2003.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta : 1987.
- Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung : 2004.

- SM Oetarto, dkk., *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*, Samitra Media Utama, Jakarta : 2004.
- Sri Nuryanti, (Ed)., *Analisis Proses dan Hasil Pilkada Langsung di Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta : 2006.
- Soemarno Soedarsono, *Hakekat Ketahanan Nasional*, Caraka Indonesia, Jakarta : 2000.
- Stanislaus S. Uyanto, *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta : 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung : 1999.
- Sunardi, RM., *Pembinaan Ketahanan Bangsa : Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Kuanternita Adidarma, Jakarta : 2004.
- _____, *Pembinaan Kebangsaan Indonesia : Dalam Rangka Menjaga Integritas Negara dan Pembentukan Jati Diri Bangsa*, PT Kuanternita Adidarma, Jakarta : 2004.
- Suyadi Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, BPFE, Yogyakarta : 1999.
- Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*, Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD), Jakarta : 2005.
- Tri Widodo W. Utomo, dkk., (Ed) *Pilkada Langsung : Antara Tuntutan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Harapan Membangun Demokrasi Lokal*, PKP2AIII LAN, Samarinda : 2005.
- T.M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta : 1987.
- Wan Usman, dkk., *Daya Tahan Bangsa*, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia : 2003.

2. Artikel :

- Fitriyah, *Sistem dan Proses Pilkada Secara Langsung*, Analisis CSIS, Vol. 34, No. 3, Jakarta, 2005.
- Gregorius Sahdan, *Pilkada dan Prospek Demokrasi Lokal*, Analisis CSIS, Vol. 34 No. 1, Jakarta, 2005.
- Gregorius Sahdan, *Pilkada Langsung, Beberapa Catatan Kritis*, Analisis CSIS, Vol. 34, No. 2, 2005.
- Solahuddin Wahid, *Perspektif Teoritik Pilkada Langsung*, Swara Politika Vol. 6, No. 1, April 2005.

Dede Mariana, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung : Relevansi Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Demokratisasi Politik Lokal*, Governance Vol. 1 No. 1 (Oktober –Desember 2004).

Kompas, *Partai-Partai Politik : Ideologi dan Program 2004-2009*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta : 2004.

3. Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen) :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemennya, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung : 2006.

Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1, LN. No. 6 Tahun 1957, TLN. No. 1143.

Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 5, LN. No. 38 Tahun 1974, TLN. No. 3037.

Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 22, LN. No. 60 Tahun 1999, TLN. No. 3839.

Undang-Undang Otonomi Daerah 2004, Harijaya Presindo, Jakarta : 2004.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penerbit Mitra Karya, Jakarta : 2005.

Komisi Pemilihan Umum, *Partai Politik Peserta Pemilu 2004*, Jakarta : 2003.

Komisi Pemilihan Umum, *Pemilu Legislatif 2004: Memilih Langsung*, Jakarta : 2005.

Komisi Pemilihan Umum, *Pemilu Presiden 2004: Memilih Langsung*, Jakarta : 2005.

4. Website :

<http://www.kpu.go.id>., Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu 2004.

HASIL ANALISIS VALIDITAS VARIABEL REKRUTMEN TERTUTUP (Y1)

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
P1	Pearson Correlation	1	.729**	.275	.537**	.358	.291	.351
	Sig. (2-tailed)		.000	.142	.002	.052	.119	.057
	N	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.729**	1	.148	.375*	.362*	.242	.141
	Sig. (2-tailed)	.000		.437	.041	.050	.197	.456
	N	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.275	.148	1	.485**	.481**	.062	.264
	Sig. (2-tailed)	.142	.437		.007	.007	.743	.158
	N	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.537**	.375*	.485**	1	.211	.258	.667**
	Sig. (2-tailed)	.002	.041	.007		.263	.169	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.358	.362*	.481**	.211	1	.309	.315
	Sig. (2-tailed)	.052	.050	.007	.263		.097	.090
	N	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	.291	.242	.062	.258	.309	1	.271
	Sig. (2-tailed)	.119	.197	.743	.169	.097		.147
	N	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.351	.141	.264	.667**	.315	.271	1
	Sig. (2-tailed)	.057	.456	.158	.000	.090	.147	
	N	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	.632**	.446*	.063	.492**	.232	.265	.498**
	Sig. (2-tailed)	.000	.014	.742	.006	.216	.158	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.325	.074	.483**	.302	.377*	-.111	.481**
	Sig. (2-tailed)	.080	.698	.007	.105	.040	.559	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.537**	.375*	.485**	.893**	.380*	.326	.749**
	Sig. (2-tailed)	.002	.041	.007	.000	.038	.079	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	.928**	.668**	.278	.547**	.269	.196	.424*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.136	.002	.151	.300	.019
	N	30	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.754**	.532**	.124	.450*	.304	.171	.401*
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.513	.013	.102	.365	.028
	N	30	30	30	30	30	30	30

HASIL ANALISIS VALIDITAS VARIABEL REKRUTMEN TERTUTUP (Y1)

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
P13	Pearson Correlation	.695**	.408*	.395*	.520**	.229	.100	.323
	Sig. (2-tailed)	.000	.025	.031	.003	.223	.598	.081
	N	30	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	.381*	.200	.062	.165	.238	.061	.290
	Sig. (2-tailed)	.038	.289	.744	.385	.206	.748	.120
	N	30	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	.059	.271	.220	.369*	.240	.216	.044
	Sig. (2-tailed)	.755	.148	.242	.045	.201	.251	.819
	N	30	30	30	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	1.000**	.729**	.275	.537**	.358	.291	.351
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.142	.002	.052	.119	.057
	N	30	30	30	30	30	30	30
P17	Pearson Correlation	.189	.044	.117	.331	-.156	.296	.251
	Sig. (2-tailed)	.316	.817	.538	.074	.410	.112	.181
	N	30	30	30	30	30	30	30
P18	Pearson Correlation	.228	.050	.234	.335	.125	.311	.348
	Sig. (2-tailed)	.226	.792	.212	.070	.512	.095	.060
	N	30	30	30	30	30	30	30
P19	Pearson Correlation	.070	-.131	.330	.121	.194	-.182	.386*
	Sig. (2-tailed)	.714	.492	.075	.526	.306	.335	.035
	N	30	30	30	30	30	30	30
P20	Pearson Correlation	.137	-.133	.285	.196	.248	-.108	.443*
	Sig. (2-tailed)	.471	.483	.127	.300	.186	.570	.014
	N	30	30	30	30	30	30	30
Tot skor	Pearson Correlation	.832**	.583**	.495**	.718**	.514**	.375*	.638**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.005	.000	.004	.041	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30

HASIL ANALISIS VALIDITAS VARIABEL REKRUTMEN TERTUTUP (Y1)

		P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14
P1	Pearson Correlation	.632**	.325	.537**	.928**	.754**	.695**	.381*
	Sig. (2-tailed)	.000	.080	.002	.000	.000	.000	.038
	N	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.446*	.074	.375*	.668**	.532**	.408*	.200
	Sig. (2-tailed)	.014	.698	.041	.000	.002	.025	.289
	N	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.063	.483**	.485**	.278	.124	.395*	.062
	Sig. (2-tailed)	.742	.007	.007	.136	.513	.031	.744
	N	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.492**	.302	.893**	.547**	.450*	.520**	.165
	Sig. (2-tailed)	.006	.105	.000	.002	.013	.003	.385
	N	30	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.232	.377*	.380*	.269	.304	.229	.238
	Sig. (2-tailed)	.216	.040	.038	.151	.102	.223	.206
	N	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	.265	-.111	.326	.196	.171	.100	.061
	Sig. (2-tailed)	.158	.559	.079	.300	.365	.598	.748
	N	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.498**	.481**	.749**	.424*	.401*	.323	.290
	Sig. (2-tailed)	.005	.007	.000	.019	.028	.081	.120
	N	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	1	.159	.492**	.603**	.918**	.748**	.499**
	Sig. (2-tailed)		.402	.006	.000	.000	.000	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.159	1	.411*	.455*	.184	.271	.463**
	Sig. (2-tailed)	.402		.024	.012	.331	.148	.010
	N	30	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.492**	.411*	1	.547**	.504**	.399*	.165
	Sig. (2-tailed)	.006	.024		.002	.005	.029	.385
	N	30	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	.603**	.455*	.547**	1	.679**	.636**	.369*
	Sig. (2-tailed)	.000	.012	.002		.000	.000	.045
	N	30	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.918**	.184	.504**	.679**	1	.716**	.446*
	Sig. (2-tailed)	.000	.331	.005	.000		.000	.013
	N	30	30	30	30	30	30	30

HASIL ANALISIS VALIDITAS VARIABEL REKRUTMEN TERTUTUP (Y1)

		P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14
P13	Pearson Correlation	.748**	.271	.399*	.636**	.716**	1	.313
	Sig. (2-tailed)	.000	.148	.029	.000	.000		.093
	N	30	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	.499**	.463**	.165	.369*	.446*	.313	1
	Sig. (2-tailed)	.005	.010	.385	.045	.013	.093	
	N	30	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	.119	.044	.369*	-.010	.072	.056	.176
	Sig. (2-tailed)	.533	.819	.045	.959	.706	.767	.352
	N	30	30	30	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	.632**	.325	.537**	.928**	.754**	.695**	.381*
	Sig. (2-tailed)	.000	.080	.002	.000	.000	.000	.038
	N	30	30	30	30	30	30	30
P17	Pearson Correlation	.396*	-.187	.151	.211	.232	.399*	.036
	Sig. (2-tailed)	.030	.321	.424	.264	.218	.029	.850
	N	30	30	30	30	30	30	30
P18	Pearson Correlation	.311	.120	.335	.174	.284	.191	.133
	Sig. (2-tailed)	.094	.527	.070	.358	.129	.313	.484
	N	30	30	30	30	30	30	30
P19	Pearson Correlation	.129	.837**	.308	.245	.147	.090	.347
	Sig. (2-tailed)	.496	.000	.098	.191	.438	.637	.060
	N	30	30	30	30	30	30	30
P20	Pearson Correlation	.261	.785**	.350	.326	.221	.208	.308
	Sig. (2-tailed)	.164	.000	.058	.079	.240	.270	.098
	N	30	30	30	30	30	30	30
Tot skor	Pearson Correlation	.779**	.521**	.757**	.816**	.788**	.740**	.488**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	.000	.000	.006
	N	30	30	30	30	30	30	30

HASIL ANALISIS VALIDITAS VARIABEL REKRUTMEN TERTUTUP (Y1)

		P15	P16	P17	P18	P19	P20	Totskor
P1	Pearson Correlation	.059	1.000**	.189	.228	.070	.137	.832**
	Sig. (2-tailed)	.755	.000	.316	.226	.714	.471	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.271	.729**	.044	.050	-.131	-.133	.583**
	Sig. (2-tailed)	.148	.000	.817	.792	.492	.483	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.220	.275	.117	.234	.330	.285	.495**
	Sig. (2-tailed)	.242	.142	.538	.212	.075	.127	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.369*	.537**	.331	.335	.121	.196	.718**
	Sig. (2-tailed)	.045	.002	.074	.070	.526	.300	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.240	.358	-.156	.125	.194	.248	.514**
	Sig. (2-tailed)	.201	.052	.410	.512	.306	.186	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	.216	.291	.296	.311	-.182	-.108	.375*
	Sig. (2-tailed)	.251	.119	.112	.095	.335	.570	.041
	N	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.044	.351	.251	.348	.386*	.443*	.638**
	Sig. (2-tailed)	.819	.057	.181	.060	.035	.014	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	.119	.632**	.396*	.311	.129	.261	.779**
	Sig. (2-tailed)	.533	.000	.030	.094	.496	.164	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.044	.325	-.187	.120	.837**	.785**	.521**
	Sig. (2-tailed)	.819	.080	.321	.527	.000	.000	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.369*	.537**	.151	.335	.308	.350	.757**
	Sig. (2-tailed)	.045	.002	.424	.070	.098	.058	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	-.010	.928**	.211	.174	.245	.326	.816**
	Sig. (2-tailed)	.959	.000	.264	.358	.191	.079	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.072	.754**	.232	.284	.147	.221	.788**
	Sig. (2-tailed)	.706	.000	.218	.129	.438	.240	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30

HASIL ANALISIS VALIDITAS VARIABEL REKRUTMEN TERTUTUP (Y1)

		P15	P16	P17	P18	P19	P20	Totskor
P13	Pearson Correlation	.056	.695**	.399*	.191	.090	.208	.740**
	Sig. (2-tailed)	.767	.000	.029	.313	.637	.270	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	.176	.381*	.036	.133	.347	.308	.488**
	Sig. (2-tailed)	.352	.038	.850	.484	.060	.098	.006
	N	30	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	1	.059	-.032	.397*	.149	.113	.314
	Sig. (2-tailed)		.755	.868	.030	.431	.552	.092
	N	30	30	30	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	.059	1	.189	.228	.070	.137	.832**
	Sig. (2-tailed)	.755		.316	.226	.714	.471	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P17	Pearson Correlation	-.032	.189	1	.284	-.270	-.092	.311
	Sig. (2-tailed)	.868	.316		.128	.149	.627	.094
	N	30	30	30	30	30	30	30
P18	Pearson Correlation	.397*	.228	.284	1	.169	.210	.472**
	Sig. (2-tailed)	.030	.226	.128		.371	.266	.008
	N	30	30	30	30	30	30	30
P19	Pearson Correlation	.149	.070	-.270	.169	1	.870**	.360
	Sig. (2-tailed)	.431	.714	.149	.371		.000	.051
	N	30	30	30	30	30	30	30
P20	Pearson Correlation	.113	.137	-.092	.210	.870**	1	.443*
	Sig. (2-tailed)	.552	.471	.627	.266	.000		.014
	N	30	30	30	30	30	30	30
Totskor	Pearson Correlation	.314	.832**	.311	.472**	.360	.443*	1
	Sig. (2-tailed)	.092	.000	.094	.008	.051	.014	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL ANALISIS VALIDITAS REKRUTMEN TERBUKA (Y2)

		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7
p1	Pearson Correlation	1	.040	.501**	-.014	.319	.449*	.397*
	Sig. (2-tailed)		.835	.005	.942	.086	.013	.030
	N	30	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.040	1	.181	-.020	-.307	.076	-.009
	Sig. (2-tailed)	.835		.338	.916	.099	.689	.964
	N	30	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.501**	.181	1	-.276	.617**	.306	.381*
	Sig. (2-tailed)	.005	.338		.140	.000	.100	.038
	N	30	30	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	-.014	-.020	-.276	1	-.307	-.389*	-.200
	Sig. (2-tailed)	.942	.916	.140		.099	.034	.290
	N	30	30	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	.319	-.307	.617**	-.307	1	.343	.015
	Sig. (2-tailed)	.086	.099	.000	.099		.064	.939
	N	30	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	.449*	.076	.306	-.389*	.343	1	.324
	Sig. (2-tailed)	.013	.689	.100	.034	.064		.080
	N	30	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.397*	-.009	.381*	-.200	.015	.324	1
	Sig. (2-tailed)	.030	.964	.038	.290	.939	.080	
	N	30	30	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	.528**	.039	.853**	.188	.592**	.139	.233
	Sig. (2-tailed)	.003	.839	.000	.319	.001	.465	.215
	N	30	30	30	30	30	30	30
p9	Pearson Correlation	.271	.052	.173	-.191	.089	.464**	.330
	Sig. (2-tailed)	.147	.784	.360	.311	.640	.010	.075
	N	30	30	30	30	30	30	30
p10	Pearson Correlation	.583**	.014	.305	-.185	.329	.882**	.355
	Sig. (2-tailed)	.001	.942	.101	.327	.075	.000	.054
	N	30	30	30	30	30	30	30
p11	Pearson Correlation	.456*	-.133	.598**	-.295	.227	.437*	.727**
	Sig. (2-tailed)	.011	.482	.000	.114	.227	.016	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p12	Pearson Correlation	.391*	-.197	.446*	-.361	.183	.523**	.622**
	Sig. (2-tailed)	.033	.296	.014	.050	.332	.003	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p13	Pearson Correlation	.701**	-.067	.335	.000	.345	.514**	.213
	Sig. (2-tailed)	.000	.723	.070	1.000	.062	.004	.259
	N	30	30	30	30	30	30	30

Table Caption

HASIL ANALISIS VALIDITAS REKRUTMEN TERBUKA (Y2)

		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7
p14	Pearson Correlation	.444*	-.091	.780**	.172	.671**	.047	.154
	Sig. (2-tailed)	.014	.633	.000	.363	.000	.805	.417
	N	30	30	30	30	30	30	30
p15	Pearson Correlation	.025	.072	.160	-.353	.205	.092	.038
	Sig. (2-tailed)	.896	.704	.399	.056	.276	.630	.842
	N	30	30	30	30	30	30	30
p16	Pearson Correlation	.397*	-.009	.381*	-.200	.015	.324	1.000**
	Sig. (2-tailed)	.030	.964	.038	.290	.939	.080	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p17	Pearson Correlation	.642**	-.061	.210	-.065	.363*	.874**	.271
	Sig. (2-tailed)	.000	.750	.266	.733	.049	.000	.147
	N	30	30	30	30	30	30	30
p18	Pearson Correlation	.400*	.381*	.234	-.170	.072	.493**	.308
	Sig. (2-tailed)	.029	.038	.214	.371	.705	.006	.098
	N	30	30	30	30	30	30	30
p19	Pearson Correlation	.221	.147	-.353	-.060	-.167	.166	-.258
	Sig. (2-tailed)	.241	.437	.056	.753	.377	.380	.169
	N	30	30	30	30	30	30	30
p20	Pearson Correlation	-.153	.170	-.268	.195	.065	-.104	-.272
	Sig. (2-tailed)	.421	.369	.152	.302	.733	.584	.146
	N	30	30	30	30	30	30	30
Tot Skor	Pearson Correlation	.757**	.216	.568**	-.178	.426*	.730**	.501**
	Sig. (2-tailed)	.000	.251	.001	.347	.019	.000	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30

Table Caption

HASIL ANALISIS VALIDITAS REKRUTMEN TERBUKA (Y2)

		p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14
p1	Pearson Correlation	.528**	.271	.583**	.456*	.391*	.701**	.444*
	Sig. (2-tailed)	.003	.147	.001	.011	.033	.000	.014
	N	30	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.039	.052	.014	-.133	-.197	-.067	-.091
	Sig. (2-tailed)	.839	.784	.942	.482	.296	.723	.633
	N	30	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.853**	.173	.305	.598**	.446*	.335	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.360	.101	.000	.014	.070	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	.188	-.191	-.185	-.295	-.361	.000	.172
	Sig. (2-tailed)	.319	.311	.327	.114	.050	1.000	.363
	N	30	30	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	.592**	.089	.329	.227	.183	.345	.671**
	Sig. (2-tailed)	.001	.640	.075	.227	.332	.062	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	.139	.464**	.882**	.437*	.523**	.514**	.047
	Sig. (2-tailed)	.465	.010	.000	.016	.003	.004	.805
	N	30	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.233	.330	.355	.727**	.622**	.213	.154
	Sig. (2-tailed)	.215	.075	.054	.000	.000	.259	.417
	N	30	30	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	1	.092	.236	.422*	.222	.358	.915**
	Sig. (2-tailed)		.628	.210	.020	.239	.052	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p9	Pearson Correlation	.092	1	.528**	.399*	.343	.194	.000
	Sig. (2-tailed)	.628		.003	.029	.064	.305	1.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p10	Pearson Correlation	.236	.528**	1	.519**	.589**	.511**	.136
	Sig. (2-tailed)	.210	.003		.003	.001	.004	.474
	N	30	30	30	30	30	30	30
p11	Pearson Correlation	.422*	.399*	.519**	1	.875**	.309	.328
	Sig. (2-tailed)	.020	.029	.003		.000	.097	.076
	N	30	30	30	30	30	30	30
p12	Pearson Correlation	.222	.343	.589**	.875**	1	.221	.099
	Sig. (2-tailed)	.239	.064	.001	.000		.240	.602
	N	30	30	30	30	30	30	30
p13	Pearson Correlation	.358	.194	.511**	.309	.221	1	.498**
	Sig. (2-tailed)	.052	.305	.004	.097	.240		.005
	N	30	30	30	30	30	30	30

Table Caption

HASIL ANALISIS VALIDITAS REKRUTMEN TERBUKA (Y2)

		p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14
p14	Pearson Correlation	.915**	.000	.136	.328	.099	.498**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	1.000	.474	.076	.602	.005	
	N	30	30	30	30	30	30	30
p15	Pearson Correlation	.085	-.046	.000	-.074	-.079	-.238	-.045
	Sig. (2-tailed)	.655	.809	1.000	.699	.678	.205	.815
	N	30	30	30	30	30	30	30
p16	Pearson Correlation	.233	.330	.355	.727**	.622**	.213	.154
	Sig. (2-tailed)	.215	.075	.054	.000	.000	.259	.417
	N	30	30	30	30	30	30	30
p17	Pearson Correlation	.259	.436*	.909**	.340	.399*	.563**	.150
	Sig. (2-tailed)	.166	.016	.000	.066	.029	.001	.430
	N	30	30	30	30	30	30	30
p18	Pearson Correlation	.114	.462*	.499**	.190	.278	.373*	.048
	Sig. (2-tailed)	.549	.010	.005	.313	.138	.042	.800
	N	30	30	30	30	30	30	30
p19	Pearson Correlation	-.405*	.047	.289	-.275	.000	.121	-.393*
	Sig. (2-tailed)	.027	.805	.121	.142	1.000	.523	.032
	N	30	30	30	30	30	30	30
p20	Pearson Correlation	-.131	.066	-.047	-.431*	-.376*	.043	-.023
	Sig. (2-tailed)	.491	.727	.806	.018	.041	.822	.902
	N	30	30	30	30	30	30	30
Tot skor	Pearson Correlation	.500**	.559**	.815**	.534**	.512**	.622**	.406*
	Sig. (2-tailed)	.005	.001	.000	.002	.004	.000	.026
	N	30	30	30	30	30	30	30

Table Caption

HASIL ANALISIS VALIDITAS REKRUTMEN TERBUKA (Y2)

		p15	p16	p17	p18	p19	p20	Totskor
p1	Pearson Correlation	.025	.397*	.642**	.400*	.221	-.153	.757**
	Sig. (2-tailed)	.896	.030	.000	.029	.241	.421	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.072	-.009	-.061	.381*	.147	.170	.216
	Sig. (2-tailed)	.704	.964	.750	.038	.437	.369	.251
	N	30	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.160	.381*	.210	.234	-.353	-.268	.568**
	Sig. (2-tailed)	.399	.038	.266	.214	.056	.152	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	-.353	-.200	-.065	-.170	-.060	.195	-.178
	Sig. (2-tailed)	.056	.290	.733	.371	.753	.302	.347
	N	30	30	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	.205	.015	.363*	.072	-.167	.065	.426*
	Sig. (2-tailed)	.276	.939	.049	.705	.377	.733	.019
	N	30	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	.092	.324	.874**	.493**	.166	-.104	.730**
	Sig. (2-tailed)	.630	.080	.000	.006	.380	.584	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.038	1.000**	.271	.308	-.258	-.272	.501**
	Sig. (2-tailed)	.842	.000	.147	.098	.169	.146	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	.085	.233	.259	.114	-.405*	-.131	.500**
	Sig. (2-tailed)	.655	.215	.166	.549	.027	.491	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30
p9	Pearson Correlation	-.046	.330	.436*	.462*	.047	.066	.559**
	Sig. (2-tailed)	.809	.075	.016	.010	.805	.727	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
p10	Pearson Correlation	.000	.355	.909**	.499**	.289	-.047	.815**
	Sig. (2-tailed)	1.000	.054	.000	.005	.121	.806	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p11	Pearson Correlation	-.074	.727**	.340	.190	-.275	-.431*	.534**
	Sig. (2-tailed)	.699	.000	.066	.313	.142	.018	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30
p12	Pearson Correlation	-.079	.622**	.399*	.278	.000	-.376*	.512**
	Sig. (2-tailed)	.678	.000	.029	.138	1.000	.041	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30
p13	Pearson Correlation	-.238	.213	.563**	.373*	.121	.043	.622**
	Sig. (2-tailed)	.205	.259	.001	.042	.523	.822	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30

Table Caption

HASIL ANALISIS VALIDITAS REKRUTMEN TERBUKA (Y2)

		p15	p16	p17	p18	p19	p20	Totskor
p14	Pearson Correlation	-.045	.154	.150	.048	-.393*	-.023	.406*
	Sig. (2-tailed)	.815	.417	.430	.800	.032	.902	.026
	N	30	30	30	30	30	30	30
p15	Pearson Correlation	1	.038	.067	.027	.000	-.138	.124
	Sig. (2-tailed)		.842	.725	.889	1.000	.468	.514
	N	30	30	30	30	30	30	30
p16	Pearson Correlation	.038	1	.271	.308	-.258	-.272	.501**
	Sig. (2-tailed)	.842		.147	.098	.169	.146	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30
p17	Pearson Correlation	.067	.271	1	.465**	.250	-.003	.773**
	Sig. (2-tailed)	.725	.147		.010	.182	.987	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p18	Pearson Correlation	.027	.308	.465**	1	.398*	.329	.736**
	Sig. (2-tailed)	.889	.098	.010		.029	.076	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p19	Pearson Correlation	.000	-.258	.250	.398*	1	.260	.222
	Sig. (2-tailed)	1.000	.169	.182	.029		.165	.239
	N	30	30	30	30	30	30	30
p20	Pearson Correlation	-.138	-.272	-.003	.329	.260	1	.142
	Sig. (2-tailed)	.468	.146	.987	.076	.165		.453
	N	30	30	30	30	30	30	30
Totskor	Pearson Correlation	.124	.501**	.773**	.736**	.222	.142	1
	Sig. (2-tailed)	.514	.005	.000	.000	.239	.453	
	N	30	30	30	30	30	30	30

Table Caption

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL ANALISIS VALIDITAS VARIABEL KEMAMPUAN (X1)

		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7
p1	Pearson Correlation	1	.428*	.299	.272	.457*	.247	.307
	Sig. (2-tailed)		.018	.109	.145	.011	.187	.099
	N	30	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.428*	1	.410*	.374*	.336	.340	.457*
	Sig. (2-tailed)	.018		.025	.042	.069	.066	.011
	N	30	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.299	.410*	1	.984**	.656**	.970**	.480**
	Sig. (2-tailed)	.109	.025		.000	.000	.000	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	.272	.374*	.984**	1	.674**	.985**	.442*
	Sig. (2-tailed)	.145	.042	.000		.000	.000	.014
	N	30	30 ^a	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	.457*	.336	.656**	.674**	1	.693**	.464**
	Sig. (2-tailed)	.011	.069	.000	.000		.000	.010
	N	30	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	.247	.340	.970**	.985**	.693**	1	.465**
	Sig. (2-tailed)	.187	.066	.000	.000	.000		.010
	N	30	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.307	.457*	.480**	.442*	.464**	.465**	1
	Sig. (2-tailed)	.099	.011	.007	.014	.010	.010	
	N	30	30	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	-.130	-.123	.230	.279	-.076	.294	.103
	Sig. (2-tailed)	.495	.517	.221	.135	.690	.114	.586
	N	30	30	30	30	30	30	30
p9	Pearson Correlation	.223	.354	.270	.338	.299	.304	.561**
	Sig. (2-tailed)	.237	.055	.149	.067	.108	.103	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
p10	Pearson Correlation	.084	-.126	.341	.379*	.067	.383*	.109
	Sig. (2-tailed)	.658	.506	.065	.039	.723	.037	.567
	N	30	30	30	30	30	30	30
p11	Pearson Correlation	.067	-.097	.241	.280	.226	.289	.068
	Sig. (2-tailed)	.726	.610	.199	.134	.231	.122	.721
	N	30	30	30	30	30	30	30
p12	Pearson Correlation	.109	-.087	.262	.297	-.023	.303	.041
	Sig. (2-tailed)	.566	.647	.161	.111	.903	.104	.830
	N	30	30	30	30	30	30	30
Totskor	Pearson Correlation	.451*	.434*	.819**	.840**	.633**	.837**	.602**
	Sig. (2-tailed)	.012	.017	.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30

Table Caption

HASIL ANALISIS VALIDITAS VARIABEL KEMAMPUAN (X1)

		p8	p9	p10	p11	p12	Totskor
p1	Pearson Correlation	-.130	.223	.084	.067	.109	.451*
	Sig. (2-tailed)	.495	.237	.658	.726	.566	.012
	N	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	-.123	.354	-.126	-.097	-.087	.434*
	Sig. (2-tailed)	.517	.055	.506	.610	.647	.017
	N	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.230	.270	.341	.241	.262	.819**
	Sig. (2-tailed)	.221	.149	.065	.199	.161	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	.279	.338	.379*	.280	.297	.840**
	Sig. (2-tailed)	.135	.067	.039	.134	.111	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	-.076	.299	.067	.226	-.023	.633**
	Sig. (2-tailed)	.690	.108	.723	.231	.903	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	.294	.304	.383*	.289	.303	.837**
	Sig. (2-tailed)	.114	.103	.037	.122	.104	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.103	.561**	.109	.068	.041	.602**
	Sig. (2-tailed)	.586	.001	.567	.721	.830	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	1	.480**	.501**	.320	.456*	.446*
	Sig. (2-tailed)		.007	.005	.084	.011	.014
	N	30	30	30	30	30	30
p9	Pearson Correlation	.480**	1	.230	.254	.250	.607**
	Sig. (2-tailed)	.007		.222	.176	.183	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p10	Pearson Correlation	.501**	.230	1	.659**	.844**	.611**
	Sig. (2-tailed)	.005	.222		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p11	Pearson Correlation	.320	.254	.659**	1	.825**	.570**
	Sig. (2-tailed)	.084	.176	.000		.000	.001
	N	30	30	30	30	30	30
p12	Pearson Correlation	.456*	.250	.844**	.825**	1	.591**
	Sig. (2-tailed)	.011	.183	.000	.000		.001
	N	30	30	30	30	30	30
Totskor	Pearson Correlation	.446*	.607**	.611**	.570**	.591**	1
	Sig. (2-tailed)	.014	.000	.000	.001	.001	
	N	30	30	30	30	30	30

Table Caption

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

a. Footnote

HASIL ANALISIS VALIDITAS VARIABEL DUKUNGAN (X2)

		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7
p1	Pearson Correlation	1	.613**	.877**	.370*	.432*	.377*	.466**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.044	.017	.040	.009
	N	30	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.613**	1	.638**	.410*	.313	.224	.300
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.025	.092	.235	.107
	N	30	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.877**	.638**	1	.434*	.483**	.374*	.340
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.017	.007	.042	.066
	N	30	30	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	.370*	.410*	.434*	1	.684**	.604**	.249
	Sig. (2-tailed)	.044	.025	.017		.000	.000	.185
	N	30	30	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	.432*	.313	.483**	.684**	1	.652**	.146
	Sig. (2-tailed)	.017	.092	.007	.000		.000	.442
	N	30	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	.377*	.224	.374*	.604**	.652**	1	.383*
	Sig. (2-tailed)	.040	.235	.042	.000	.000		.036
	N	30	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.466**	.300	.340	.249	.146	.383*	1
	Sig. (2-tailed)	.009	.107	.066	.185	.442	.036	
	N	30	30	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	.648**	.357	.597**	.223	.564**	.456*	.285
	Sig. (2-tailed)	.000	.053	.000	.237	.001	.011	.127
	N	30	30	30	30	30	30	30
p9	Pearson Correlation	.619**	.437*	.669**	.350	.708**	.345	.170
	Sig. (2-tailed)	.000	.016	.000	.058	.000	.062	.368
	N	30	30	30	30	30	30	30
p10	Pearson Correlation	.292	.043	.299	.043	.451*	.079	-.068
	Sig. (2-tailed)	.117	.822	.108	.820	.012	.677	.722
	N	30	30	30	30	30	30	30
p11	Pearson Correlation	.332	.064	.381*	-.029	.397*	.227	.024
	Sig. (2-tailed)	.073	.737	.038	.877	.030	.228	.900
	N	30	30	30	30	30	30	30
p12	Pearson Correlation	.570**	.358	.653**	.220	.461*	.458*	.419*
	Sig. (2-tailed)	.001	.052	.000	.243	.010	.011	.021
	N	30	30	30	30	30	30	30
Tot skor	Pearson Correlation	.752**	.519**	.768**	.522**	.763**	.615**	.418*
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.003	.000	.000	.022
	N	30	30	30	30	30	30	30

HASIL ANALISIS VALIDITAS VARIABEL DUKUNGAN (X2)

		p8	p9	p10	p11	p12	Totskor
p1	Pearson Correlation	.648**	.619**	.292	.332	.570**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.117	.073	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.357	.437*	.043	.064	.358	.519**
	Sig. (2-tailed)	.053	.016	.822	.737	.052	.003
	N	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.597**	.669**	.299	.381*	.653**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.108	.038	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	.223	.350	.043	-.029	.220	.522**
	Sig. (2-tailed)	.237	.058	.820	.877	.243	.003
	N	30	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	.564**	.708**	.451*	.397*	.461*	.763**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.012	.030	.010	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	.456*	.345	.079	.227	.458*	.615**
	Sig. (2-tailed)	.011	.062	.677	.228	.011	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.285	.170	-.068	.024	.419*	.418*
	Sig. (2-tailed)	.127	.368	.722	.900	.021	.022
	N	30	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	1	.878**	.695**	.790**	.705**	.885**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p9	Pearson Correlation	.878**	1	.737**	.732**	.678**	.895**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p10	Pearson Correlation	.695**	.737**	1	.867**	.629**	.653**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p11	Pearson Correlation	.790**	.732**	.867**	1	.812**	.711**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p12	Pearson Correlation	.705**	.678**	.629**	.812**	1	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30
Totskor	Pearson Correlation	.885**	.895**	.653**	.711**	.835**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL VALIDITAS VARIABEL IKATAN PRIMORDIAL (X3)

		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7
p1	Pearson Correlation	1	.802**	.726**	.325	.569**	.559**	.247
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.079	.001	.001	.188
	N	30	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.802**	1	.617**	.414*	.382*	.592**	.308
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.023	.037	.001	.097
	N	30	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.726**	.617**	1	.497**	.466**	.504**	.426*
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.005	.009	.005	.019
	N	30	30	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	.325	.414*	.497**	1	.298	.536**	.639**
	Sig. (2-tailed)	.079	.023	.005		.110	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	.569**	.382*	.466**	.298	1	.125	.334
	Sig. (2-tailed)	.001	.037	.009	.110		.512	.072
	N	30	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	.559**	.592**	.504**	.536**	.125	1	.301
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.005	.002	.512		.106
	N	30	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.247	.308	.426*	.639**	.334	.301	1
	Sig. (2-tailed)	.188	.097	.019	.000	.072	.106	
	N	30	30	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	.371*	.421*	.511**	.503**	.409*	.498**	.558**
	Sig. (2-tailed)	.043	.021	.004	.005	.025	.005	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
p9	Pearson Correlation	.391*	.455*	.536**	.684**	.461*	.616**	.654**
	Sig. (2-tailed)	.033	.011	.002	.000	.010	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
p10	Pearson Correlation	.348	.348	.658**	.692**	.507**	.450*	.479**
	Sig. (2-tailed)	.059	.060	.000	.000	.004	.013	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30
p11	Pearson Correlation	.158	.304	.256	.401*	.054	.383*	.260
	Sig. (2-tailed)	.405	.102	.173	.028	.777	.037	.165
	N	30	30	30	30	30	30	30
p12	Pearson Correlation	.168	.346	.405*	.600**	.164	.364*	.303
	Sig. (2-tailed)	.376	.061	.027	.000	.386	.048	.104
	N	30	30	30	30	30	30	30
Totskor	Pearson Correlation	.657**	.696**	.772**	.773**	.552**	.697**	.643**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30

HASIL VALIDITAS VARIABEL IKATAN PRIMORDIAL (X3)

		p8	p9	p10	p11	p12	Totskor
p1	Pearson Correlation	.371*	.391*	.348	.158	.168	.657**
	Sig. (2-tailed)	.043	.033	.059	.405	.376	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p2	Pearson Correlation	.421*	.455*	.348	.304	.346	.696**
	Sig. (2-tailed)	.021	.011	.060	.102	.061	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p3	Pearson Correlation	.511**	.536**	.658**	.256	.405*	.772**
	Sig. (2-tailed)	.004	.002	.000	.173	.027	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p4	Pearson Correlation	.503**	.684**	.692**	.401*	.600**	.773**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000	.028	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p5	Pearson Correlation	.409*	.461*	.507**	.054	.164	.552**
	Sig. (2-tailed)	.025	.010	.004	.777	.386	.002
	N	30	30	30	30	30	30
p6	Pearson Correlation	.498**	.616**	.450*	.383*	.364*	.697**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.013	.037	.048	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p7	Pearson Correlation	.558**	.654**	.479**	.260	.303	.643**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.007	.165	.104	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p8	Pearson Correlation	1	.862**	.742**	.471**	.545**	.804**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.009	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p9	Pearson Correlation	.862**	1	.814**	.402*	.550**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.028	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p10	Pearson Correlation	.742**	.814**	1	.507**	.742**	.855**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.004	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
p11	Pearson Correlation	.471**	.402*	.507**	1	.617**	.559**
	Sig. (2-tailed)	.009	.028	.004		.000	.001
	N	30	30	30	30	30	30
p12	Pearson Correlation	.545**	.550**	.742**	.617**	1	.680**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30
Totskor	Pearson Correlation	.804**	.871**	.855**	.559**	.680**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

KUISIONER
REKRUTMEN DALAM PENENTUAN CALON KEPALA DAERAH
PADA PILKADA DKI JAKARTA (2007-2012)

A. Pengantar

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pengurus Partai.

Saya, Yohanis Tandisosang (Mahasiswa Program S2 Kajian Strategik Ketahanan Nasional Universitas Indonesia), mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisisioner berikut yang berkaitan dengan pelaksanaan penetapan calon dalam Pilkada Provinsi DKI Jakarta. Kuisisioner ini dimaksudkan untuk kepentingan akademik (penelitian) pada Program Magister Kajian Strategik Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.

Pengisian kuisisioner ini tidak ada hubungan atau berpengaruh terhadap kredibilitas/penilaian Bapak/Ibu di Partai. Selain itu, kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak/Ibu dalam kuisisioner ini dijamin sesuai dengan standar profesionalisme dan etika penelitian. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

1. Berilah tanda "X" pada salah satu jawaban (kolom sebelah kanan) yang Bapak/Ibu pilih sesuai dengan pertanyaan/pernyataan.
2. Jika ingin merubah pilihan, maka jawaban sebelumnya dapat diberi tanda "X" kemudian memberi tanda "X" pada jawaban terakhir.
3. Jawaban dalam kuisisioner tidak ada yang salah artinya semua jawaban benar.
4. Pilihan jawaban terdapat lima alternatif yaitu : sangat setuju (SS) atau sangat penting (SP), setuju (ST) atau penting (PT) , ragu- ragu/netral (RG), tidak setuju (TS) atau tidak penting (TP) dan sangat tidak setuju (STS) atau sangat tidak penting (STP).

C. Data Responden

Nama* :

Umur/Jenis Kelamin :Tahun / L / P

Agama :

Pendidikan terakhir :

Masa Keanggotaan di Partai :Tahun

Jabatan di Partai :

Pekerjaan di luar partai :

* Ditulis bila tidak keberatan

DAFTAR PERNYATAAN

I. Model Rekrutmen Dalam Penentuan Calon

No.	Butir Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
A. Model Tertutup						
1.	Menurut anda, dalam penjaringan lebih diprioritaskan bagi calon dari kader partai.	SS	ST	RG	TS	STS
2.	Menurut anda, calon dari kader partai dianggap lebih berkualitas dan mempunyai potensi.	SS	ST	RG	TS	STS
3.	Menurut anda, pendaftaran tidak perlu terbuka untuk masyarakat.	SS	ST	RG	TS	STS
4.	Menurut anda, calon dari luar partai dianggap kurang memberikan kontribusi bagi partai bila terpilih.	SS	ST	RG	TS	STS
5.	Menurut anda, nama bakal calon sebaiknya dimunculkan dari pengurus pusat partai.	SS	ST	RG	TS	STS
6.	Menurut anda, untuk dapat menang dan menguntungkan partai sebaiknya mencalonkan kembali pejabat yang sedang berkuasa.	SS	ST	RG	TS	STS
7.	Menurut anda, tidak perlu dibentuk tim/panitia pelaksana seleksi cukup ditentukan oleh pimpinan partai.	SS	ST	RG	TS	STS
8.	Menurut anda, penetapan calon adalah kewenangan pengurus pusat partai.	SS	ST	RG	TS	STS
9.	Menurut anda, bakal calon yang dipilih oleh pengurus pusat dan menjadi kebijakan partai.	SS	ST	RG	TS	STS
10.	Menurut anda, dalam menetapkan calon lebih ditentukan pengurus partai tingkat atas (DPP atau pimpinan partai).	SS	ST	RG	TS	STS
11.	Menurut anda, peranan pengurus partai di tingkat rendah dalam seleksi kurang.	SS	ST	RG	TS	STS
12.	Menurut anda, sebaiknya pengurus partai di tingkat daerah cukup melaksanakan kebijakan partai.	SS	ST	RG	TS	STS
13.	Menurut anda, sebaiknya memilih figur yang sudah mapan secara ekonomi.	SS	ST	RG	TS	STS
14.	Menurut anda, masyarakat akan lebih memilih calon yang memiliki latar belakang status sosial.	SS	ST	RG	TS	STS
15.	Menurut anda, sebainya memilih calon yang penduduk asli (putra daerah).	SS	ST	RG	TS	STS
16.	Menurut anda, calon bukan penduduk asli kurang memahami daerah tersebut.	SS	ST	RG	TS	STS
17.	Menurut anda, saat ini pemilih akan cenderung memilih calon yang berasal dari suku/etnis yang sama.	SS	ST	RG	TS	STS

B. Model Terbuka

1.	Menurut anda, calon yang memiliki potensi dan berkualitas bukan hanya ada di partai (kader).	SS	ST	RG	TS	STS
2.	Menurut anda, menjaring banyak calon dari masyarakat berpeluang untuk mendapatkan calon yang tepat.	SS	ST	RG	TS	STS
3.	Menurut anda, seleksi melalui konvensi untuk mendapatkan calon yang memiliki visi sesuai dengan partai dan berkompeten.	SS	ST	RG	TS	STS
4.	Menurut anda, sebaiknya informasi mengenai bakal calon dapat diakses oleh umum/masyarakat.	SS	ST	RG	TS	STS
5.	Menurut anda, masyarakat memiliki ikut berperan dalam seleksi calon.	SS	ST	RG	TS	STS
6.	Menurut anda, seleksi yang <i>fair</i> dan demokratis melalui konvensi partai dari tingkat yang paling rendah.	SS	ST	RG	TS	STS
7.	Menurut anda, partai membentuk tim/panitia seleksi yang independen dan mempunyai kewenangan menentukan calon.	SS	ST	RG	TS	STS
8.	Menurut anda, proses seleksi lebih transparan dan melibatkan unsur masyarakat dalam menilai <i>track record</i> calon.	SS	ST	RG	TS	STS
9.	Menurut anda, adanya penilaian terhadap visi dan misi serta program-program calon.	SS	ST	RG	TS	STS
10.	Menurut anda, dalam seleksi harus menerapkan sistem kompetisi murni dan transparansi.	SS	ST	RG	TS	STS
11.	Menurut anda, mengutamakan tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki calon	SS	ST	RG	TS	STS
12.	Menurut anda, didasarkan pada kemampuan teknis/manajerial calon.	SS	ST	RG	TS	STS
13.	Menurut anda, calon sebaiknya mengakar dan dipercaya masyarakat.	SS	ST	RG	TS	STS
14.	Menurut anda, memunculnya figur-figur yang masih <i>fresh</i> dan energik.	SS	ST	RG	TS	STS
15.	Menurut anda, sebaiknya memilih calon yang lebih dikenal (populer) di masyarakat.	SS	ST	RG	TS	STS

2. Faktor –Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penentuan Calon

No	Butir Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
A. Faktor Kinerja Calon						
1.	Menurut anda, tingkat pendidikan umum dan keahlian yang dimiliki cukup penting dalam menetapkan calon.	SP	PT	RG	TP	STP
2.	Menurut anda, partai akan mempertimbangkan jenis pelatihan/training yang dimiliki seorang calon.	SP	PT	RG	TP	STP
3.	Menurut anda, pengalaman berorganisasi di partai bagi seorang calon cukup penting.	SP	PT	RG	TP	STP
4.	Menurut anda, pengalaman organisasi calon di masyarakat cukup berpengaruh dalam seleksi.	SP	PT	RG	TP	STP
5.	Menurut anda, penting adanya kesesuaian profesi/pekerjaan calon dengan jabatan yang akan diemban nanti.	SP	PT	RG	TP	STP
6.	Menurut anda, partai akan memprioritaskan calon yang memiliki prestasi dalam penyelesaian problem masyarakat dan bangsa.	SP	PT	RG	TP	STP
7.	Menurut anda, prestasi tersebut akan mendukung dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.	SP	PT	RG	TP	STP
8.	Menurut anda, salah satu kriteria calon adalah memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian tugas.	SP	PT	RG	TP	STP
9.	Menurut anda, calon harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.	SP	PT	RG	TP	STP
10.	Menurut anda, kedisiplinan dalam menjalankan tugas sangat penting bagi calon.	SP	PT	RG	TP	STP
11.	Menurut anda, kedisiplinan juga terkait dengan ketepatan waktu dalam tugas.	SP	PT	RG	TP	STP
12.	Menurut anda, calon yang terpilih harus memiliki loyalitas terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku.	SP	PT	RG	TP	STP
B. Faktor Dukungan						
1.	Menurut anda, calon harus memiliki keterikatan emosional dengan masyarakat (massa).	SP	PT	RG	TP	STP
2.	Menurut anda, setiap calon paling tidak memperoleh restu dari ormas misalnya kelompok tokoh agama/alim ulama.	SP	PT	RG	TP	STP
3.	Menurut anda, banyaknya simpati dari kalangan profesi dan pelaku ekonomi/bisnis akan berpengaruh dalam seleksi.	SP	PT	RG	TP	STP
4.	Menurut anda, calon paling tidak didukung oleh kelompok penekan misalnya akademisi atau LSM.	SP	PT	RG	TP	STP
5.	Menurut anda, calon sebaiknya memperoleh dukungan dari birokrat atau pemerintah yang sedang berkuasa.	SP	PT	RG	TP	STP
6.	Menurut anda, dengan mengetahui tentang calon maka masyarakat akan membantu calon tersebut.	SP	PT	RG	TP	STP

7.	Menurut anda, harus tersedia informasi yang cukup agar masyarakat akan mendukung calon tersebut.	SP	PT	RG	TP	STP
8.	Menurut anda, masyarakat akan memberikan bantuan berupa masukan, saran atau ide kepada calon.	SP	PT	RG	TP	STP
9.	Menurut anda, bantuan juga berupa kesediaan untuyk memberikan suara kepada calon partai.	SP	PT	RG	TP	STP
10.	Menurut anda, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan untuk memenangkan kandidatnya.	SP	PT	RG	TP	STP
11.	Menurut anda, para pendukung akan meluangkan waktu untuk membantu demi kemenangan calon.	SP	PT	RG	TP	STP
12.	Menurut anda, dukungan dari masyarakat dapat berupa memberikan bantuan dana dalam rangka memenangkan calonnya.	SP	PT	RG	TP	STP

C. Faktor Ikatan Primordial

1.	Menurut anda, partai akan memilih calon yang memiliki latar belakang status sosial (misalnya keturunan atau trah) dalam masyarakat.	SP	PT	RG	TP	STP
2.	Menurut anda, peran sosial yang diperankan dalam masyarakat merupakan faktor penting untuk memilih calon tersebut.	SP	PT	RG	TP	STP
3.	Menurut anda, partai akan lebih cenderung pada calon yang memiliki status ekonomi atau kemampuan finansial.	SP	PT	RG	TP	STP
4.	Menurut anda, akan lebih memilih calon yang mempunyai hubungan/ ikatan kekeluargaan.	SP	PT	RG	TP	STP
5.	Menurut anda, saat ini pemilih akan cenderung pada calon yang masih memiliki hubungan sebagai rekan atau teman.	SP	PT	RG	TP	STP
6.	Menurut anda, akan memilih calon yang mempunyai profesi yang sama dengan pemilih.	SP	PT	RG	TP	STP
7.	Menurut anda, pemilih akan cenderung memilih calon yang berasal dari almamater (sekolah) yang sama.	SP	PT	RG	TP	STP
8.	Menurut anda, masyarakat akan memilih calon yang menganut agama yang sama.	SP	PT	RG	TP	STP
9.	Menurut anda, akan memilih calon yang menganut agama yang sama dengan agama mayoritas pemilih.	SP	PT	RG	TP	STP
10.	Menurut anda, akan memilih calon yang berasal dari suku (etnis) yang merupakan penduduk mayoritas.	SP	PT	RG	TP	STP
11.	Menurut anda, pemilih akan lebih cenderung memilih calon yang merupakan putra daerah/penduduk asli setempat.	SP	PT	RG	TP	STP
12.	Menurut anda, saat ini masyarakat masih memperhitungkan unsur ras atau etnis calon dalam pemilihan.	SP	PT	RG	TP	STP

Terima Kasih

REKAPITULASI DATA VARIABEL KINERJA (X1)

No. Res	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	Totskor
1	4	4	4	2	2	2	2	2	2	4	4	4	36
2	2	2	2	2	4	2	4	4	4	5	4	3	38
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	2	2	38
5	5	3	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	52
6	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	38
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	50
9	5	4	5	4	4	4	3	5	5	4	4	4	51
10	4	5	5	5	5	5	2	4	5	5	5	5	55
11	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	52
12	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
13	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	53
14	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	47
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
17	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3	39
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
22	4	4	4	4	2	4	4	2	2	2	2	3	37
23	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	46
24	5	5	5	2	2	2	5	5	5	5	5	5	51
25	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	39
26	5	5	5	4	4	4	3	5	5	4	4	4	52
27	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	57
28	4	4	4	4	3	5	5	2	2	2	2	4	41
29	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	51
30	4	4	4	4	3	4	4	2	2	2	2	3	38
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
32	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
34	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	50
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
37	4	3	5	4	4	2	4	3	5	3	5	3	45
38	5	4	5	5	5	2	2	4	4	4	4	5	49
39	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	45
40	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	53
41	5	4	5	5	5	2	2	5	5	5	5	4	52
42	5	1	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	53
43	5	2	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	52
44	5	2	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	53
45	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
46	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	52
47	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	50
48	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	50
49	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	40
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
51	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	49
52	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	49
53	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	46
54	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	49
55	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	49
56	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	46
57	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	49
58	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	49
59	4	4	5	4	3	2	2	4	4	4	3	2	41
60	5	5	5	4	4	4	3	4	4	5	3	5	51
61	4	4	4	5	4	4	2	5	5	5	2	4	48
62	5	4	4	2	4	4	4	4	5	4	5	4	49
63	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	5	4	48
64	3	2	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	46
65	5	3	5	5	4	3	3	3	3	4	4	4	46
66	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	49
67	4	3	3	3	4	3	2	3	2	3	4	4	38
68	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	41
69	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	46
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

REKAPITULASI DATA VARIABEL DUKUNGAN (X2)

No. Res	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	Totskor
1	2	2	2	5	5	5	2	3	2	2	4	2	36
2	2	2	2	2	5	5	2	5	5	5	5	5	45
3	2	2	2	4	5	5	4	4	2	4	4	4	42
4	2	2	2	5	5	4	2	2	2	4	2	2	34
5	3	3	2	5	5	5	5	5	4	4	3	3	47
6	3	2	2	5	5	5	2	4	2	4	4	4	42
7	4	4	2	4	5	5	2	4	2	5	5	5	47
8	2	4	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	43
9	4	3	2	3	5	5	4	3	3	5	5	5	47
10	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
11	2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	47
12	2	4	2	2	4	4	4	2	2	4	4	4	38
13	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	48
14	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	36
15	2	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	32
16	2	3	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	32
17	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	44
18	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	32
19	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	32
20	4	3	2	3	5	5	4	3	3	5	5	5	47
21	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	50
22	2	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	32
23	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	44
24	2	2	2	2	2	2	2	4	2	4	2	2	28
25	2	2	2	2	2	2	2	4	2	5	2	5	36
26	1	1	1	2	2	2	1	4	2	4	5	5	30
27	4	3	2	3	5	5	4	3	3	5	5	5	47
28	1	1	1	2	2	2	1	4	2	4	5	5	30
29	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	44
30	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	44
31	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	44
32	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	2	2	34
33	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	32
34	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	32
35	4	3	2	3	5	5	4	3	3	5	5	5	47
36	4	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	49
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
38	2	2	2	4	4	4	2	4	2	3	2	3	34
39	2	2	2	5	5	5	1	1	1	5	5	2	36
40	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	40
41	2	2	2	5	5	5	2	4	4	4	2	1	38
42	5	1	1	2	2	5	5	4	4	4	2	1	36
43	4	4	4	4	5	4	2	2	2	4	4	2	41
44	4	4	4	4	5	5	5	2	2	2	2	2	41
45	4	4	4	4	5	4	2	2	2	2	4	2	41
46	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	2	40
47	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	44
48	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	37
49	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	38
50	2	2	2	2	2	2	2	4	3	4	4	3	30
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	38
52	4	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	38
53	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	30
54	4	2	4	4	4	4	4	3	2	4	3	3	42
55	4	3	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4	40
56	3	3	3	2	3	3	2	4	4	4	4	4	38
57	4	3	3	2	2	2	2	3	4	4	4	4	39
58	4	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	38
59	2	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	38
60	4	4	3	3	4	4	2	2	2	4	3	4	34
61	3	3	2	2	5	5	2	4	2	4	2	4	42
62	2	2	2	2	2	2	4	3	2	5	2	4	38
63	3	3	3	3	2	2	4	3	2	4	4	4	33
64	4	4	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	37
65	3	3	3	4	4	4	2	3	3	3	3	3	35
66	4	3	3	4	4	4	2	2	2	4	4	3	38
67	4	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	38
68	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	38
69	2	2	2	2	2	2	4	3	3	3	3	2	40
70	2	2	2	4	4	4	4	4	5	4	5	5	33
													44

REKAPITULASI DATA VARIABEL IKATAN PRIMORDIAL (X3)

No. Res	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	Totskor
1	4	4	2	4	4	5	4	2	4	2	2	2	39
2	4	4	5	3	4	5	4	2	4	5	4	4	48
3	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	2	4	48
4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	57
5	5	4	4	3	5	5	4	4	4	4	3	3	48
6	3	3	2	2	4	4	3	2	4	4	3	2	36
7	5	4	4	4	2	5	2	2	2	3	5	5	43
8	5	4	4	2	4	5	4	4	5	5	2	4	48
9	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	57
10	4	3	3	3	3	5	2	2	2	3	3	3	36
11	5	5	5	5	4	5	4	2	4	4	2	4	49
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	46
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	51
14	4	4	3	3	4	5	3	3	4	4	3	3	43
15	4	4	4	5	4	4	5	4	3	5	4	3	49
16	2	2	2	3	2	4	2	2	2	2	2	4	29
17	4	3	3	2	4	2	2	2	2	2	2	2	30
18	4	4	3	2	2	2	4	2	4	2	3	4	36
19	4	2	3	2	2	4	4	2	2	4	3	3	35
20	2	2	2	3	2	4	2	4	5	5	4	5	40
21	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	44
22	4	2	2	3	2	3	4	2	4	2	4	3	35
23	4	3	3	2	4	2	2	2	2	2	2	2	30
24	4	4	4	2	4	2	2	2	2	4	2	4	36
25	5	5	5	2	2	5	2	2	2	2	2	2	36
26	4	2	5	4	4	4	4	3	4	5	2	3	44
27	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	57
28	4	2	5	5	4	4	4	3	4	5	2	3	45
29	4	3	3	2	4	3	3	2	2	2	2	3	33
30	4	3	3	2	4	2	2	2	2	2	2	2	30
31	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	57
32	4	2	3	3	2	2	4	2	4	4	3	3	36
33	4	3	3	4	3	4	4	5	4	4	5	4	47
34	2	2	2	3	2	2	4	4	5	5	4	5	40
35	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	44
36	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	46
37	5	4	4	2	4	5	2	4	4	2	2	2	40
38	5	4	5	2	5	5	1	2	2	5	1	2	39
39	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	45
40	4	2	4	4	5	5	2	2	2	4	4	5	43
41	4	4	4	2	5	5	4	2	2	4	5	5	46
42	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	50
43	4	3	5	4	4	4	3	5	5	3	4	4	48
44	4	4	3	4	3	4	5	4	5	3	3	4	46
45	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	53
46	4	4	4	4	3	5	3	4	4	4	4	4	47
47	3	3	3	3	4	5	4	3	3	3	2	2	38
48	3	3	3	3	4	5	4	3	3	3	1	1	36
49	4	4	4	2	2	5	2	2	4	4	1	2	36
50	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	45
51	4	4	4	4	4	5	3	3	4	4	3	4	46
52	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	47
53	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	2	43
54	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	45
55	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	47
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
57	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	47
58	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	46
59	4	5	4	4	5	5	3	3	3	4	3	3	46
60	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	42
61	4	4	2	3	4	5	3	3	3	4	3	4	42
62	2	2	2	4	4	4	5	4	4	4	2	5	42
63	2	2	2	2	4	5	4	3	3	3	2	2	34
64	3	3	4	4	4	5	2	2	2	2	2	2	35
65	4	4	4	2	2	5	3	2	2	2	2	2	34
66	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	46
67	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	47
68	4	4	5	4	2	4	2	4	4	4	4	4	45
69	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	3	3	45
70	4	4	4	4	5	5	2	2	2	2	2	2	38

TABEL FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN

1. Model Rekrutmen Tertutup (Y1)

p1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	24	34.3	34.3	34.3
	4.00	31	44.3	44.3	78.6
	5.00	15	21.4	21.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	35	50.0	50.0	50.0
	3.00	15	21.4	21.4	71.4
	4.00	18	25.7	25.7	97.1
	5.00	2	2.9	2.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	5	7.1	7.1	7.1
	2.00	55	78.6	78.6	85.7
	3.00	4	5.7	5.7	91.4
	4.00	3	4.3	4.3	95.7
	5.00	3	4.3	4.3	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	5.7	5.7	5.7
	2.00	43	61.4	61.4	67.1
	3.00	14	20.0	20.0	87.1
	4.00	7	10.0	10.0	97.1
	5.00	2	2.9	2.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	6	8.6	8.6	8.6
	2.00	41	58.6	58.6	67.1
	3.00	15	21.4	21.4	88.6
	4.00	5	7.1	7.1	95.7
	5.00	3	4.3	4.3	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.4	1.4	1.4
	3.00	3	4.3	4.3	5.7
	4.00	38	54.3	54.3	60.0
	5.00	28	40.0	40.0	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	13	18.6	18.6	18.6
	3.00	1	1.4	1.4	20.0
	4.00	34	48.6	48.6	68.6
	5.00	22	31.4	31.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.4	1.4	1.4
	2.00	34	48.6	48.6	50.0
	3.00	7	10.0	10.0	60.0
	4.00	23	32.9	32.9	92.9
	5.00	5	7.1	7.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.4	1.4	1.4
	3.00	2	2.9	2.9	4.3
	4.00	55	78.6	78.6	82.9
	5.00	12	17.1	17.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	10.0	10.0	10.0
	3.00	5	7.1	7.1	17.1
	4.00	44	62.9	62.9	80.0
	5.00	14	20.0	20.0	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	2.9	2.9	2.9
	2.00	19	27.1	27.1	30.0
	3.00	8	11.4	11.4	41.4
	4.00	33	47.1	47.1	88.6
	5.00	8	11.4	11.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	2.9	2.9	2.9
	2.00	14	20.0	20.0	22.9
	3.00	6	8.6	8.6	31.4
	4.00	40	57.1	57.1	88.6
	5.00	8	11.4	11.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.9	2.9	2.9
	3.00	4	5.7	5.7	8.6
	4.00	58	82.9	82.9	91.4
	5.00	6	8.6	8.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	4.3	4.3	4.3
	2.00	45	64.3	64.3	68.6
	3.00	7	10.0	10.0	78.6
	4.00	14	20.0	20.0	98.6
	5.00	1	1.4	1.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	7	10.0	10.0	10.0
	2.00	32	45.7	45.7	55.7
	3.00	9	12.9	12.9	68.6
	4.00	21	30.0	30.0	98.6
	5.00	1	1.4	1.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	4.3	4.3	4.3
	2.00	22	31.4	31.4	35.7
	3.00	4	5.7	5.7	41.4
	4.00	32	45.7	45.7	87.1
	5.00	9	12.9	12.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.4	1.4	1.4
	2.00	16	22.9	22.9	24.3
	3.00	5	7.1	7.1	31.4
	4.00	33	47.1	47.1	78.6
	5.00	15	21.4	21.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

2. Model Rekrutmen Terbuka (Y2)

p1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	5.7	5.7	5.7
	3.00	8	11.4	11.4	17.1
	4.00	47	67.1	67.1	84.3
	5.00	11	15.7	15.7	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	4.3	4.3	4.3
	3.00	7	10.0	10.0	14.3
	4.00	48	68.6	68.6	82.9
	5.00	12	17.1	17.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	7.1	7.1	7.1
	4.00	48	68.6	68.6	75.7
	5.00	17	24.3	24.3	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	5.7	5.7	5.7
	3.00	10	14.3	14.3	20.0
	4.00	40	57.1	57.1	77.1
	5.00	16	22.9	22.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	7.1	7.1	7.1
	3.00	10	14.3	14.3	21.4
	4.00	44	62.9	62.9	84.3
	5.00	11	15.7	15.7	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	4.3	4.3	4.3
	2.00	5	7.1	7.1	11.4
	3.00	12	17.1	17.1	28.6
	4.00	43	61.4	61.4	90.0
	5.00	7	10.0	10.0	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	5.7	5.7	5.7
	3.00	5	7.1	7.1	12.9
	4.00	42	60.0	60.0	72.9
	5.00	19	27.1	27.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.9	2.9	2.9
	3.00	9	12.9	12.9	15.7
	4.00	44	62.9	62.9	78.6
	5.00	15	21.4	21.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	4.3	4.3	4.3
	3.00	7	10.0	10.0	14.3
	4.00	41	58.6	58.6	72.9
	5.00	19	27.1	27.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	5.7	5.7	5.7
	3.00	11	15.7	15.7	21.4
	4.00	42	60.0	60.0	81.4
	5.00	13	18.6	18.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	10.0	10.0	10.0
	3.00	13	18.6	18.6	28.6
	4.00	37	52.9	52.9	81.4
	5.00	13	18.6	18.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	4.3	4.3	4.3
	3.00	9	12.9	12.9	17.1
	4.00	47	67.1	67.1	84.3
	5.00	11	15.7	15.7	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	4.3	4.3	4.3
	3.00	17	24.3	24.3	28.6
	4.00	41	58.6	58.6	87.1
	5.00	9	12.9	12.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.4	1.4	1.4
	2.00	5	7.1	7.1	8.6
	3.00	9	12.9	12.9	21.4
	4.00	38	54.3	54.3	75.7
	5.00	17	24.3	24.3	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.4	1.4	1.4
	3.00	10	14.3	14.3	15.7
	4.00	44	62.9	62.9	78.6
	5.00	15	21.4	21.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

3. Faktor Kinerja Calon (X1)

p1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.4	1.4	1.4
	3.00	5	7.1	7.1	8.6
	4.00	38	54.3	54.3	62.9
	5.00	26	37.1	37.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.4	1.4	1.4
	2.00	4	5.7	5.7	7.1
	3.00	7	10.0	10.0	17.1
	4.00	51	72.9	72.9	90.0
	5.00	7	10.0	10.0	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.4	1.4	1.4
	3.00	6	8.6	8.6	10.0
	4.00	37	52.9	52.9	62.9
	5.00	26	37.1	37.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	7.1	7.1	7.1
	3.00	13	18.6	18.6	25.7
	4.00	41	58.6	58.6	84.3
	5.00	11	15.7	15.7	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	4.3	4.3	4.3
	3.00	12	17.1	17.1	21.4
	4.00	50	71.4	71.4	92.9
	5.00	5	7.1	7.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	8	11.4	11.4	11.4
	3.00	8	11.4	11.4	22.9
	4.00	49	70.0	70.0	92.9
	5.00	5	7.1	7.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	8	11.4	11.4	11.4
	3.00	12	17.1	17.1	28.6
	4.00	45	64.3	64.3	92.9
	5.00	5	7.1	7.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	8	11.4	11.4	11.4
	3.00	8	11.4	11.4	22.9
	4.00	43	61.4	61.4	84.3
	5.00	11	15.7	15.7	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	8.6	8.6	8.6
	3.00	6	8.6	8.6	17.1
	4.00	45	64.3	64.3	81.4
	5.00	13	18.6	18.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	5.7	5.7	5.7
	3.00	6	8.6	8.6	14.3
	4.00	38	54.3	54.3	68.6
	5.00	22	31.4	31.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	8.6	8.6	8.6
	3.00	8	11.4	11.4	20.0
	4.00	43	61.4	61.4	81.4
	5.00	13	18.6	18.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.9	2.9	2.9
	3.00	9	12.9	12.9	15.7
	4.00	45	64.3	64.3	80.0
	5.00	14	20.0	20.0	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

4. Faktor Dukungan (X2)

p1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	4.3	4.3	4.3
	2.00	21	30.0	30.0	34.3
	3.00	15	21.4	21.4	55.7
	4.00	29	41.4	41.4	97.1
	5.00	2	2.9	2.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	5.7	5.7	5.7
	2.00	19	27.1	27.1	32.9
	3.00	25	35.7	35.7	68.6
	4.00	22	31.4	31.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	5.7	5.7	5.7
	2.00	25	35.7	35.7	41.4
	3.00	18	25.7	25.7	67.1
	4.00	23	32.9	32.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	24	34.3	34.3	34.3
	3.00	13	18.6	18.6	52.9
	4.00	27	38.6	38.6	91.4
	5.00	6	8.6	8.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	17	24.3	24.3	24.3
	3.00	4	5.7	5.7	30.0
	4.00	29	41.4	41.4	71.4
	5.00	20	28.6	28.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	19	27.1	27.1	27.1
	3.00	9	12.9	12.9	40.0
	4.00	25	35.7	35.7	75.7
	5.00	17	24.3	24.3	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	4.3	4.3	4.3
	2.00	31	44.3	44.3	48.6
	3.00	8	11.4	11.4	60.0
	4.00	25	35.7	35.7	95.7
	5.00	3	4.3	4.3	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.4	1.4	1.4
	2.00	16	22.9	22.9	24.3
	3.00	20	28.6	28.6	52.9
	4.00	30	42.9	42.9	95.7
	5.00	3	4.3	4.3	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.4	1.4	1.4
	2.00	29	41.4	41.4	42.9
	3.00	17	24.3	24.3	67.1
	4.00	22	31.4	31.4	98.6
	5.00	1	1.4	1.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	11	15.7	15.7	15.7
	3.00	13	18.6	18.6	34.3
	4.00	36	51.4	51.4	85.7
	5.00	10	14.3	14.3	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	1	1.4	1.4	1.4
	2.00	17	24.3	24.3	25.7
	3.00	13	18.6	18.6	44.3
	4.00	30	42.9	42.9	87.1
	5.00	9	12.9	12.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	1	1.4	1.4	1.4
	1.00	2	2.9	2.9	4.3
	2.00	18	25.7	25.7	30.0
	3.00	13	18.6	18.6	48.6
	4.00	24	34.3	34.3	82.9
	5.00	12	17.1	17.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

5. Faktor Ikatan Primordial (X3)

p1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	11	15.7	15.7	15.7
	3.00	4	5.7	5.7	21.4
	4.00	42	60.0	60.0	81.4
	5.00	13	18.6	18.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	15	21.4	21.4	21.4
	3.00	9	12.9	12.9	34.3
	4.00	37	52.9	52.9	87.1
	5.00	9	12.9	12.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	1	1.4	1.4	1.4
	2.00	13	18.6	18.6	20.0
	3.00	12	17.1	17.1	37.1
	4.00	32	45.7	45.7	82.9
	5.00	12	17.1	17.1	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	17	24.3	24.3	24.3
	3.00	14	20.0	20.0	44.3
	4.00	31	44.3	44.3	88.6
	5.00	8	11.4	11.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	16	22.9	22.9	22.9
	3.00	2	2.9	2.9	25.7
	4.00	42	60.0	60.0	85.7
	5.00	10	14.3	14.3	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	10	14.3	14.3	14.3
	3.00	2	2.9	2.9	17.1
	4.00	23	32.9	32.9	50.0
	5.00	35	50.0	50.0	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.4	1.4	1.4
	2.00	22	31.4	31.4	32.9
	3.00	11	15.7	15.7	48.6
	4.00	30	42.9	42.9	91.4
	5.00	6	8.6	8.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	28	40.0	40.0	40.0
	3.00	20	28.6	28.6	68.6
	4.00	18	25.7	25.7	94.3
	5.00	4	5.7	5.7	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	24	34.3	34.3	34.3
	3.00	8	11.4	11.4	45.7
	4.00	30	42.9	42.9	88.6
	5.00	8	11.4	11.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	21	30.0	30.0	30.0
	3.00	5	7.1	7.1	37.1
	4.00	35	50.0	50.0	87.1
	5.00	9	12.9	12.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p11

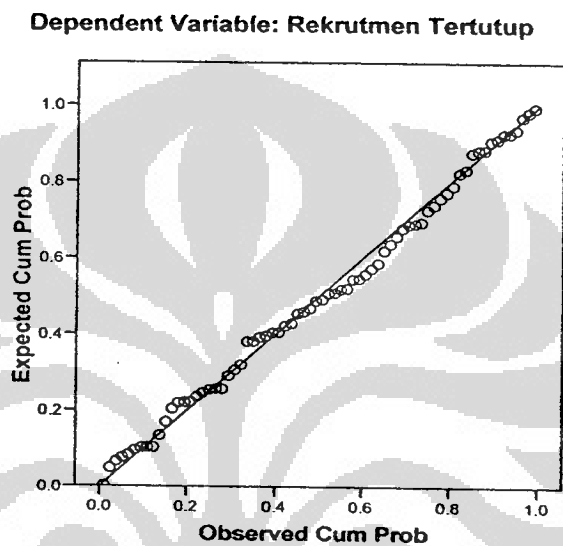
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	4.3	4.3	4.3
	2.00	28	40.0	40.0	44.3
	3.00	22	31.4	31.4	75.7
	4.00	13	18.6	18.6	94.3
	5.00	4	5.7	5.7	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

p12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.4	1.4	1.4
	2.00	22	31.4	31.4	32.9
	3.00	10	14.3	14.3	47.1
	4.00	28	40.0	40.0	87.1
	5.00	9	12.9	12.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

1. Uji Normalitas dan Asumsi Klasik Rekrutmen Tertutup
 - a. Uji Normalitas (Linearitas)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



- b. Uji Multikolinieritas

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	20.959	6.623		3.164	.002		
	Kinerja	.160	.123	.139	1.304	.197	.878	1.139
	Dukungan	.479	.112	.439	4.274	.000	.947	1.055
	Ikatan Primordial	.203	.097	.224	2.106	.039	.881	1.135

a. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Karena nilai VIF < 10 dan nilai Toleran > 0,1, maka model regresi linier berganda terbebas dari multikolinieritas atau memenuhi asumsi klasik.

c. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

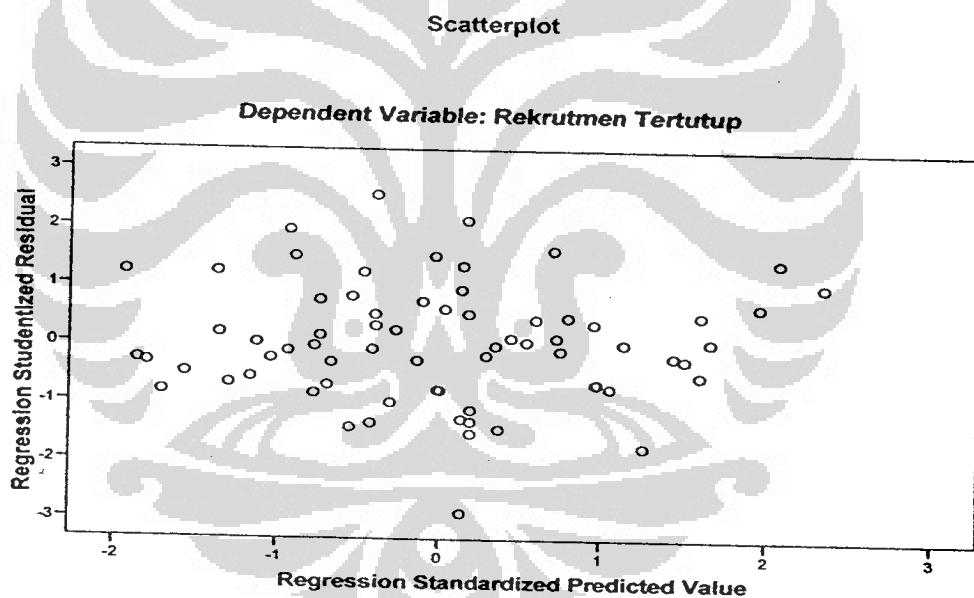
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.584 ^a	.341	.311	5.015	1.777

a. Predictors: (Constant), Ikatan Primordial, Dukungan, Kinerja

b. Dependent Variable: Rekrutmen Tertutup

Dengan jumlah variabel bebas (k) = 3, dengan sample (n) = 70, maka batas bawah (dl) = 1,52 dan batas atas (du) = 1,70. Karena nilai Durbin Watson 1,777 terletak di daerah *No Autocorelation*, sehingga model regresi linier berganda terbebas dari variabel pengganggu (autokorelasi).

d. Uji Heteroskedastisitas

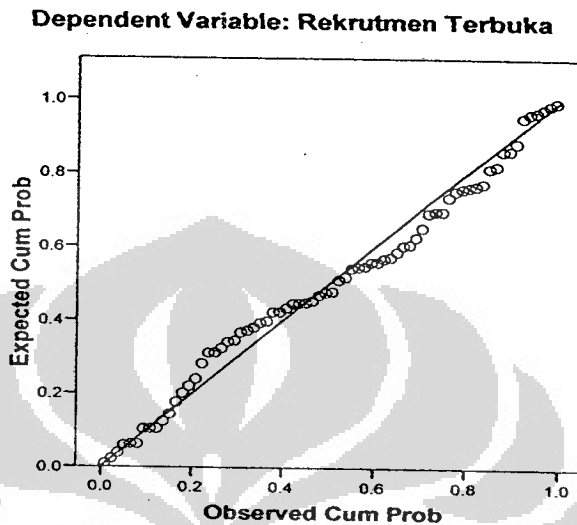


Model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik heterokedastisitas karena penyebaran titik data menunjukkan:

- Titik-titik data menyebar di atas dan di sekitar angka nol.
- Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah.
- Penyebaran titik-titik dan tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar, menyempit dan melebar kembali.
- Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

2. Uji Normalitas dan Asumsi Klasik Rekrutmen Terbuka
 - a. Uji Normalitas (Linearitas)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



b. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.364	6.501		2.825	.006		
	Kinerja	.323	.120	.274	2.682	.009	.878	1.139
	Dukungan	.506	.110	.452	4.598	.000	.947	1.055
	Ikatan Primordia	.133	.095	.143	1.403	.165	.881	1.135

a. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Karena nilai VIF < 10 dan nilai Toleran > 0,1, maka model regresi linier berganda terbebas dari multikolinieritas atau memenuhi asumsi klasik.

c. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

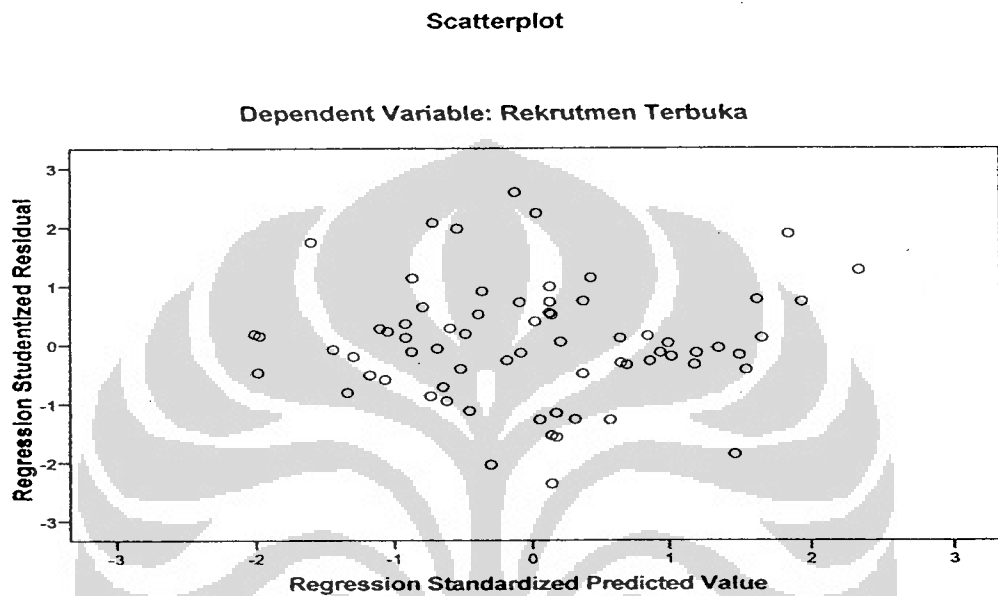
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.629 ^a	.396	.368	4.923	1.752

a. Predictors: (Constant), Ikatan Primordial, Dukungan, Kinerja

b. Dependent Variable: Rekrutmen Terbuka

Dengan jumlah variabel bebas (k) = 3, dengan sampel (n) = 70, maka batas bawah (d_l) = 1,52 dan batas atas (d_u) = 1,70. Karena nilai Durbin Watson 1,752 terletak di daerah *No Autocorelation*, sehingga model regresi linier berganda terbebas dari variabel pengganggu (autokorelasi).

d. Uji Heteroskedastisitas



Model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik heterokedastisitas karena penyebaran titik data menunjukkan :

- a) Titik-titik data menyebar di atas dan di sekitar angka nol.
- b) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah.
- c) Penyebaran titik-titik dan tidak membentuk pola bergelombang melebar, menyempit dan melebar kembali.
- d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.